



BADAN POM

LAPORAN KINERJA

2021



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



KATA PENGANTAR





KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Balai Besar POM di Semarang dapat senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima dan melindungi masyarakat Jawa Tengah.

Laporan Kinerja 2021 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja tahun 2021 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada tahun 2021. Laporan Kinerja 2021 merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM.

Balai Besar POM di Semarang telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di wilayah Jawa Tengah dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing pangsa pasar produk unggulan Jawa Tengah. Peningkatan kinerja tersebut tercermin melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Adanya perubahan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 kami jadikan sebagai tantangan yang mampu memicu pencapaian kinerja yang lebih baik.





Dengan tersusunnya Laporan Kinerja 2021 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai. selanjutnya laporan ini juga menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada tahun berikutnya. Dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi pengawas Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah.

Semarang, 18 Februari 2022

Kepala BBPOM di Semarang



Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt., M.Kes.





RINGKASAN EKSEKUTIF





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LK) Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LK semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, LK adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 juga bertujuan sebagai:

- ❖ Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
- ❖ Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Balai Besar POM di Semarang agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan dari 11 Sasaran Kegiatan, dengan ringkasan sebagai berikut.

SASARAN KEGIATAN		NPS
<i>CAPAIAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>		104,12
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	92,83
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	116,07





SASARAN KEGIATAN		NPS
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	103,46
<i>CAPAIAN INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>		104,53
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	103,13
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	102,71
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	100
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	112,28
<i>CAPAIAN LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>		102,70
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	100,41
SK 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	95,29
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	111,38
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	103,72
NPS TOTAL		103,78

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut dari 11 Sasaran Kegiatan yang ditetapkan yaitu :

- ❖ 3 (tiga) Sasaran kegiatan memperoleh NPS 'SANGAT BAIK'
- ❖ 8 (delapan) memperoleh NPS 'BAIK'

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) total tahun 2021 adalah sebesar 103,78%, dengan kriteria BAIK.

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di





lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 92,83% dengan kriteria BAIK;

2. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 116,07% dengan kriteria SANGAT BAIK;

3. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 103,46% dengan kriteria BAIK;

4. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 103,13% dengan kriteria BAIK;

5. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 102,71% dengan kriteria BAIK;

6. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 100% dengan kriteria BAIK;

7. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 112,28% dengan kriteria BAIK;

8. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal dengan NPS sebesar 100,41% dengan kriteria BAIK;

9. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Semarang yang optimal dengan NPS sebesar 95,29% dengan kriteria BAIK;

10. Pada tahun 2020 BBPOM di Semarang berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi





pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 111,38% dengan kriteria SANGAT BAIK;

11. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel dengan NPS sebesar 103,72% dengan kriteria BAIK dibuktikan dengan nilai IKPA 97.21 dan nilai EKA sebesar 86,22.

Dengan demikian dapat dikatakan seluruh capaian sasaran kegiatan tercapai. Hal tersebut tidak terlepas dari capaian 29 Indikator Kinerja Utama yang sangat berpengaruh terhadap capai sasaran kegiatan.

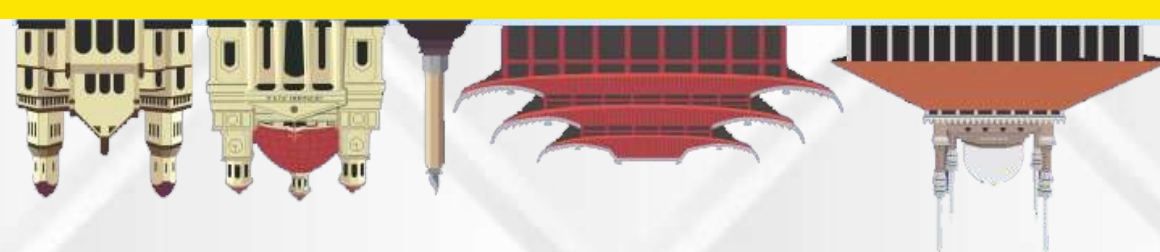
Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Semarang pada tahun 2021 antara 62,19% sampai dengan 125,00%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator "Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat" sebesar 62,19%, disebabkan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Sedangkan capaian indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal" sebesar 125,00%, dan meraih ranking 1 (satu) dari seluruh BB/BPOM hal tersebut merupakan hasil peningkatan pemanfaatan pengelolaan dan dan informasi di Balai Besar POM di Semarang.

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Semarang kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah khususnya Balai Besar POM di Semarang di masa mendatang.





DAFTAR ISI





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 ISU STRATEGIS BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2021	8
1.3.1 Aspek Strategis Organisasi	8
1.3.2 Analisis Lingkungan Strategis	10
1.3.3 Isu Internal	14
1.3.4 Isu Eksternal	17
BAB II	27
PERENCANAAN KINERJA	27
2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024	27
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021	37
2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	41
2.4 METODE PENGUKURAN DAN KRITERIA PENCAPAIAN	44
BAB III	45
AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	45
3.1.1 Profil Capaian Sasaran BBPOM di Semarang Tahun 2021	45
3.1.2 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) BBPOM Klaster 2	45
3.1.3 Indikator Kinerja Utama Sasaran BBPOM Di Semarang	47
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	48





3.3	TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT UTAMA ATAS HASIL EVALUASI (LHE) AKIP TAHUN 2020	148
3.4	REALISASI ANGGARAN BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2021	152
3.5	ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN	153
BAB IV		161
PENUTUP		161
4.1	KESIMPULAN	161
4.2	SARAN	163
LAMPIRAN		165
Lampiran 1 Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TW IV		- 1 -
Lampiran 2 Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan di uji sesuai standar		- 2 -
Lampiran 3 Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan di uji sesuai standar		- 2 -
Lampiran 4 Nilai SAKIP		- 3 -
Lampiran 5 Indeks RB		- 3 -
Lampiran 6 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi		- 4 -
Lampiran 7 Indeks Profesionalitas ASN		- 4 -
Lampiran 8 Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index)		- 5 -
Lampiran 9 terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan		- 5 -
Lampiran 10 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		- 6 -





DAFTAR GAMBAR





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Semarang	4
Gambar 1. 2 Perubahan Struktur Organisasi Loka POM (Menjadi) Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22	7
Gambar 1. 3 Profil Berdasarkan Gender, Usia, Pendidikan dan Jabatan Pegawai BBPOM di Semarang 2021	11
Gambar 1. 4 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di jawa tengah	13
Gambar 1. 5 Data Sarana Produksi	14
Gambar 1. 6 Data Sarana Distribusi.....	14
Gambar 2. 1 VISI, MISI, ARAHAN PRESIDEN, DAN AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024	28
Gambar 2. 2 VISI, MISI, TUJUAN BBPOM DI SEMARANG PERIODE 2020-2024	29
Gambar 2. 3 Peta Strategis BSC Level II Balai Besar POM di Semarang (2020- 2024) (semula)	35
Gambar 2. 4 Peta Strategis BSC Level II Balai Besar POM di Semarang (2020- 2024) (Menjadi)	36
Gambar 2. 5 Peta Strategis BSC Loka POM (2020-2024) (Menjadi)	37
Gambar 3. 1 Perbandingan Total NPS BBPOM Klaster 2 Tahun 2021	46
Gambar 3. 2 Diagram Profil Capaian Indikator Utama BBPOM di Semarang Tahun 2021.....	47
Gambar 3. 3 Perbandingan Hasil Pengukuran Klaster 2	47
Gambar 3. 4 Perbandingan Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat BBPOM Klaster 2	49
Gambar 3. 5 diagram Produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu	50
Gambar 3. 6 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat BBPOM Klaster 2.....	53
Gambar 3. 7 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu BBPOM Klaster 2	56
Gambar 3. 8 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu BBPOM Klaster 2.....	59
Gambar 3. 9 Perbandingan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat BBPOM Klaster 2.....	61
Gambar 3. 10 Grafik Perbandingan realisasi indeks kesadaran masyarakat dari tahun 2019-2021	64
Gambar 3. 11 Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) BBPOM Klaster 2	65
Gambar 3. 12 Perbandingan Realiasi IK 3.1 tahun 2020 dan 2021	67



Gambar 3. 13 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Klaster 2	68
Gambar 3. 14 Grafik Perbandingan IK 3.2 Realisasi tahun 2020-2021	75
Gambar 3. 15 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Klaster 2	75
Gambar 3. 16 Grafik Perbandingan IK 3.3 Realisasi tahun 2019-2021	77
Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Klaster 2	78
Gambar 3. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.1. Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya	81
Gambar 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM Klaster 2	82
Gambar 3. 20 Grafik Realisasi IK 4.2. tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya	84
Gambar 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi BBPOM Klaster 2	84
Gambar 3. 22 Grafik Perbandingan Realisasi IK 4.3 Tahun 2018-2019	86
Gambar 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi BBPOM Klaster 2	87
Gambar 3. 24 Realisasi IK 4.4. tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya....	89
Gambar 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM Klaster 2	89
Gambar 3. 26 Grafik Realisasi IK 4.5. tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya	91
Gambar 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM Klaster 2	92
Gambar 3. 28 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang dengan tahun sebelum-sebelumnya	94
Gambar 3. 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM Klaster 2	95
Gambar 3. 30 Perbandingan Realisasi IK 5.1 tahun 2020-2021	98
Gambar 3. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat Dan Makanan BBPOM Klaster 2	99
Gambar 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Sekolah Dengan PJAS Aman BBPOM Klaster 2	102
Gambar 3. 33 Perbandingan Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ...	105
Gambar 3. 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM Klaster 2	106
Gambar 3. 35 Perbandingan Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ...	109
Gambar 3. 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman BBPOM Klaster 2	110
Gambar 3. 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM Klaster 2	113





Gambar 3. 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM Klaster 2	116
Gambar 3. 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan BBPOM Klaster 2.....	119
Gambar 3. 40 Perbandingan Realisasi Indeks RB Tahun 2020-2021.....	122
Gambar 3. 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks RB BBPOM Klaster 2 ..	123
Gambar 3. 42 PERBANDINGAN REALISASI NILAI AKIP BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2017-2021	126
Gambar 3. 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP BBPOM Klaster 2...	127
Gambar 3. 44 PERBANDINGAN REALISASI INDEKS PROFESIONALITAS asn BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2020-2021	132
Gambar 3. 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Klaster 2	133
Gambar 3. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan BBPOM Klaster 2	136
Gambar 3. 47 Perbandingan Indeks pemanfaatan data dan informasi Tahun 2020-2021.....	138
Gambar 3. 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan data dan Informasi BBPOM Klaster 2	139
Gambar 3. 49 Nilai SMART EKA dan IKPA	144
Gambar 3. 50 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Klaster 2.....	145
Gambar 3. 51 GRAFIK PERBANDINGAN TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BBPOM DI SEMARANG 2020-2021.....	146
Gambar 3. 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM Klaster 2	147
Gambar 3. 53 Perbandingan realisasi anggaran tahun 2019-2021.....	152
Gambar 3. 54 Nilai capaian kinerja pada aplikasi simetris E-Performance Tahun 2021	159





DAFTAR TABEL





DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020-2024	9
Tabel 1. 2 KEBUTUHAN SDM BBPOM DI SEMARANG BERDASARKAN ABK TAHUN 2021.....	11
Tabel 1. 3 Penilaian/evaluasi klasifikasi UPT BPOM.....	36
Tabel 2. 1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2024 – 2024 ..	30
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2021 (Sebelum)	38
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2021 (Sesudah Revisi)	40
Tabel 2. 4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2021.....	42
Tabel 2. 5 KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA..	44
Tabel 3. 1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Bbpom Di Semarang Dan Bbpom Klaster 2 Tahun 2021	46
Tabel 3. 2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN PERTAMA.....	48
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	49
Tabel 3. 4 PROFIL MS DAN TMS HASIL SAMPLING OBAT SECARA ACAK TAHUN 2021.....	49
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	53
Tabel 3. 6 MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2021	54
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.3 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	55
Tabel 3. 8 HASIL SAMPLING TARGETED, PENGAWASAN PENANDAAN, DAN PENGUJIAN TAHUN 2021	57
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.4 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	58
Tabel 3. 10 MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2021	60
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.5 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	61
Tabel 3. 12 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KEDUA	64
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 2.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	65
Tabel 3. 14 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KETIGA.....	67





Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	68
Tabel 3. 16 RINCIAN KEGIATAN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA DI WILAYAH KERJA BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2021 .	72
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	75
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.3 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	78
Tabel 3. 19 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KEEMPAT	81
Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	82
Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	84
Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.3 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	87
Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.4 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	89
Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.5 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	92
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.6 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	95
Tabel 3. 26 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KELIMA.....	97
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 5.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	99
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 5.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	102
Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 5.3 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	106
Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 5.4 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	109
Tabel 3. 31 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KEENAM	111
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 6.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	112
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 6.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	115
Tabel 3. 34 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KETUJUH	117
Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 7.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	118
Tabel 3. 36 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KEDELAPAN	121
Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 8.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	123





Tabel 3. 38 KOMPONEN PENILAIAN NILAI AKIP	125
Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 8.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	126
Tabel 3. 40 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KESEMBILAN.....	132
Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 9.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	133
Tabel 3. 42 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KESEPULUH.....	135
Tabel 3. 43 NILAI PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM TAHUN 2021	136
Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 10.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	136
Tabel 3. 45 HASIL PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2021	138
Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 10.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	139
Tabel 3. 47 INDEKS PEMUTAHIRAN SIPT BBPOM DI SEMARANG	140
Tabel 3. 48 PROFIL BERITA AKTUAL BBPOM DI SEMARANGTAHUN 2021	141
Tabel 3. 49 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KESEBELAS	143
Tabel 3. 50 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 11.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	144
Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 11.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional.....	146
Tabel 3. 52 Tingkat Efisiensi Kegiatan	154
Tabel 3. 53 PROFIL TINGKAT EFISIENSI SETIAP SASARAN KEGIATAN BBPOM DI SEMARANG.....	155
Tabel 4. 1 Nilai Pencapaian 11 Sasaran Kegiatan.....	161





BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, maka arah kebijakan dan strategi untuk penguatan sistem Pengawasan Obat dan Makanan adalah dengan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan makanan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengawas dan penguatan laboratorium dan balai pengawas obat dan makanan; peningkatan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan perluasan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, BPOM masih memerlukan payung hukum berupa Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik, oleh karena itu pada RPJMN Tahun 2020-2024 diagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2021. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden



Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

BBPOM di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id, [Instagram](#), [Facebook](#), dan [Twitter: @bpomsemarang](#).

BBPOM di Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam menjalankan fungsinya, BBPOM di Semarang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana fungsi yang dijalankan meliputi:

FUNGSI BBPOM DI SEMARANG		
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan		
		8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
		9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan





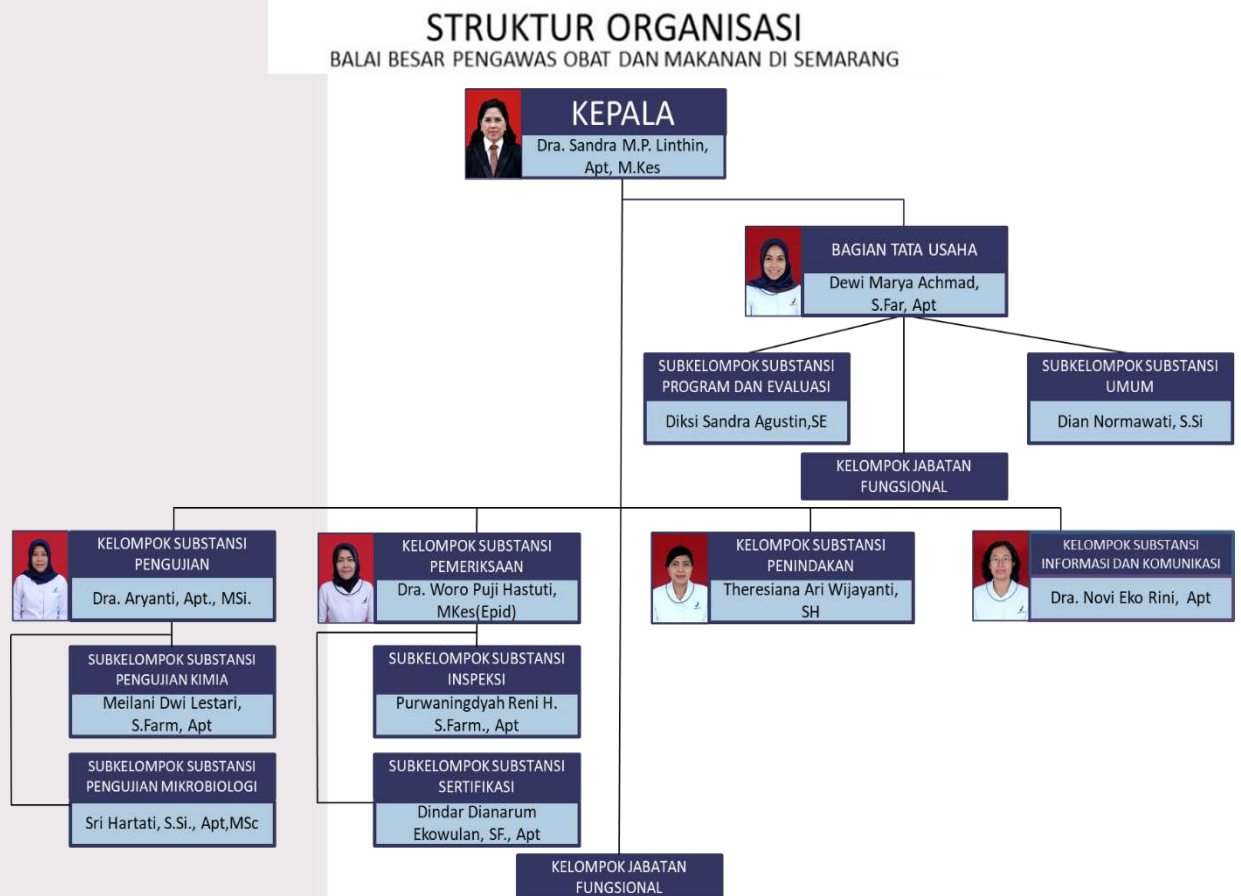
<p>2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan</p>			<p>10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber</p>
<p>3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian</p>			<p>11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p>
<p>4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan</p>			<p>12. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p>
<p>5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan</p>			<p>13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p>
<p>6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan</p>			<p>14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga</p>
<p>7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan</p>		<p>DLL</p>	<p>15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan</p>

Cakupan wilayah pengawasan BBPOM di Semarang adalah 22 Kabupaten dan 4 Kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Sisanya merupakan cakupan wilayah Loka POM, yaitu Loka POM di Kota Surakarta sebanyak 5 Kabupaten/ Kota dan Loka POM di Banyumas sebanyak 4 Kabupaten/ Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOM di Semarang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang per Januari 2022 seperti pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Semarang

Struktur organisasi BBPOM di Semarang terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Struktur Organisasi BBPOM di Semarang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas antara lain:

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan





keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

- a. Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- b. Subkelompok Substansi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Di lingkungan BBPOM di Semarang, selain Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Bagian Tata Usaha, juga terdapat Jabatan Fungsional terkait pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu:

2.1. Kelompok Substansi Pengujian, terdiri dari:





- a. Sub Kelompok Substansi Pengujian Kimia;
 - b. Sub Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi.
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
 - c. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
- 2.2. Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri dari:
- a. Sub Kelompok Substansi Inspeksi;
 - b. Sub Kelompok Substansi Sertifikasi.
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dalam bidang pemeriksaan dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
 - d. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
- 2.3. Kelompok Substansi Penindakan
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;





- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

2.4. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Setiap Kelompok dipimpin oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.



Gambar 1. 2 Perubahan Struktur Organisasi Loka POM (Menjadi) Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22

Terdapat perubahan Organisasi dan Tata Kerja pada Loka POM yaitu nomenklatur dibawah Kepala Loka POM yang sebelumnya "Kelompok Jabatan Fungsional"





menjadi “Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional” namun tanpa adanya perubahan tugas dan fungsi. Loka POM Kota Surakarta dan Loka POM Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 telah menjadi Satker mandiri.

1.4 ISU STRATEGIS BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2021

1.3.1 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai unit kerja Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dan efisien dalam mengontrol keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu:

- 1) Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
 - 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
 - 3) Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang
- Selain itu Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi Balai Besar POM di Semarang, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi Balai Besar POM di Semarangsesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan Balai Besar POM di Semarang.



Secara rinci, perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM Balai Besar POM di Semarang berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha
4. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.





Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.

1.3.2 Analisis Lingkungan Strategis

1) Internal

BBPOM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh:

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

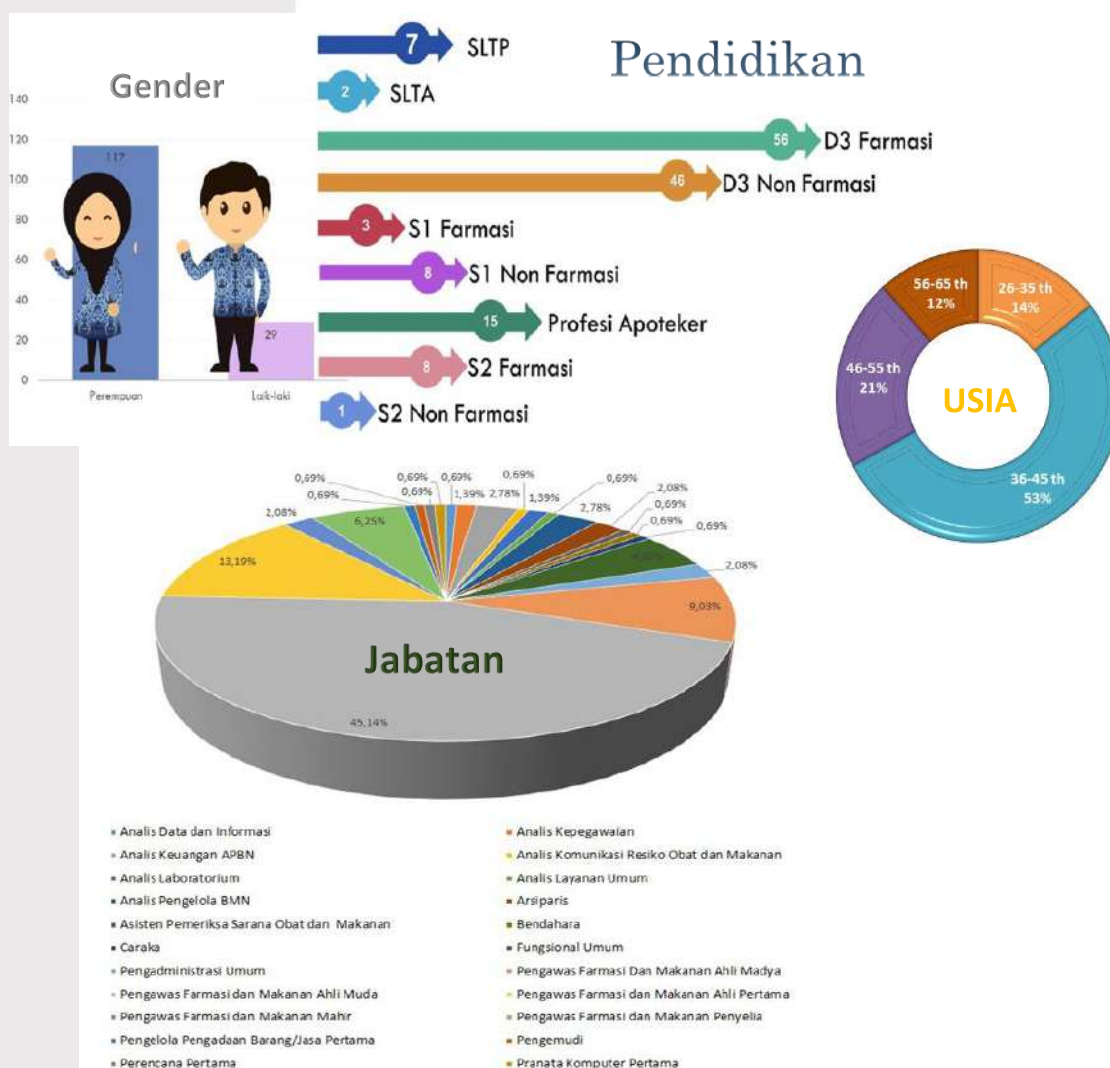
Pada Renstra BBPOM di Semarang 2020-2024, BBPOM di Semarang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja mengacu Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi BBPOM di Semarang memandang perlu menambah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM professional untuk menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang telah mengajukan usulan kebutuhan PPPK sejumlah 17 formasi dengan sebaran jabatan antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Komputer, Perencana, serta Arsiparis. Untuk saat ini jumlah SDM Balai Besar POM di Semarang per 24 Desember 2021 adalah 146 orang dengan persentase 20% laki-laki serta 80% perempuan. Terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM Balai Besar POM di Semarang, salah satu yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yang pada tahun 2020 memperoleh angka 85,57. Terkait hal tersebut, Balai Besar POM di Semarang berupaya melakukan pemetaan pegawai yang masih memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan kompetensi melalui peningkatan Pendidikan. Saat ini Balai Besar POM di Semarang masih memiliki 32 orang pegawai dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 21% dari keseluruhan pegawai.

No	Unit Kerja	Jumlah SDM berdasar ABK		Jumlah SDM berdasar ABK Bezzeting		Gap	
1	Bidang Pengujian	82	Orang	44	Orang	38	Orang
2	Bidang Pemeriksaan	59	Orang	33	Orang	26	Orang



3	Bidang Penindakan	13	Orang	7	Orang	6	Orang
4	Bidang Infokom	23	Orang	12	Orang	11	Orang
5	Bagian Tata Usaha	48	Orang	9	Orang	39	Orang
Total		225	Orang	105	Orang	120	Orang

Tabel 1. 2 KEBUTUHAN SDM BBPOM DI SEMARANG BERDASARKAN ABK TAHUN 2021



Gambar 1. 3 Profil Berdasarkan Gender, Usia, Pendidikan dan Jabatan Pegawai BBPOM di Semarang 2021





b) Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan program/kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2021 : Rp. 46.459.983.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 46.428.958.765,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 99,93 %. BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 sebesar : Rp. 417.201.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan kepada pihak ketiga atas permintaan pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

Rincian PNBP yang diperoleh Tahun 2021 dengan total Rp. 913.650.000,- berasal dari :

- a. Pengujian laboratorium : Rp. 475.200.000,-
- b. Penerbitan SKI dan SKE : Rp. 438.450.000,-

2) Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang bersama Loka POM di Surakarta dan Loka POM di Banyumas adalah seluruh propinsi JawaTengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 3.254.412 ha atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah. Pembagian wilayah kerja seperti gambar di bawah ini.





Wilayah kerja BBPOM di Semarang, meliputi:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Kota Semarang | 10. Kabupaten Semarang | 18. Kabupaten Kudus |
| 2. Kabupaten Grobogan | 11. Kabupaten Batang | 19. Kabupaten Blora |
| 3. Kabupaten Demak | 12. Kabupaten Boyolali | 20. Kota Magelang |
| 4. Kabupaten Kebumen | 13. Kabupaten Purworejo | 21. Kota Pekalongan |
| 5. Kabupaten Klaten | 14. Kabupaten Temanggung | 22. Kota Salatiga |
| 6. Kabupaten Pati | 15. Kabupaten Rembang | 23. Kabupaten Tegal |
| 7. Kabupaten Jepara | 16. Kabupaten Wonosobo | 24. Kota Tegal |
| 8. Kabupaten Kendal | 17. Kabupaten Pekalongan | 25. Kabupaten Brebes |
| 9. Kabupaten Magelang | | 26. Kabupaten Pemalang |



Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, meliputi:

1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Banjarnegara
4. Kabupaten Purbalingga

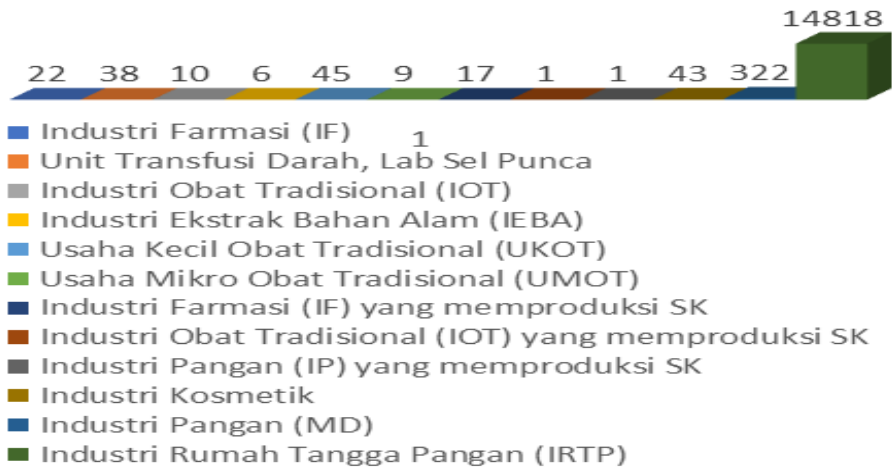
Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta, meliputi:

1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri

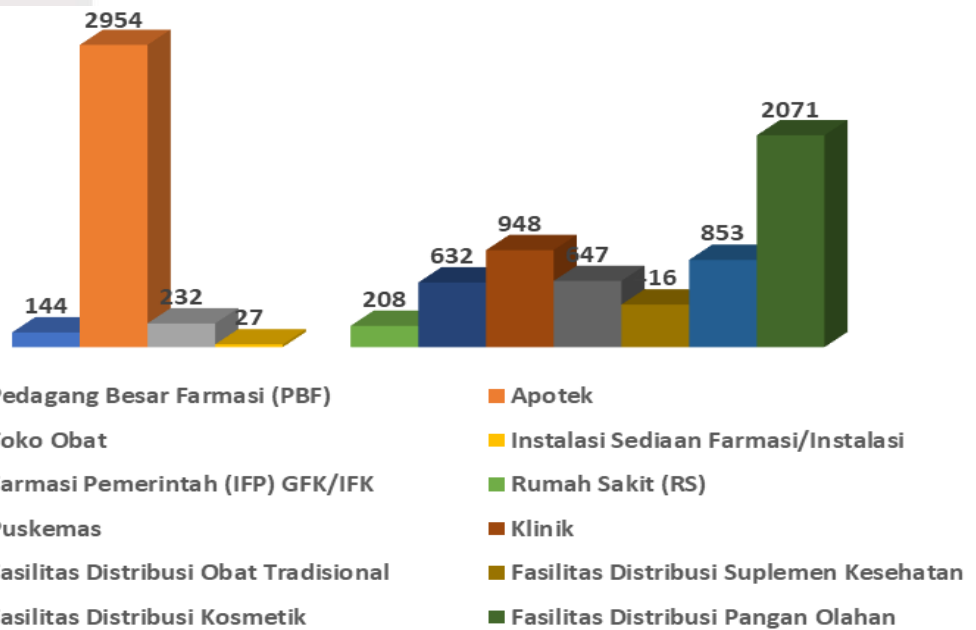
Gambar 1. 4 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah

BBPOM di Semarang bersama Loka POM di Surakarta dan Loka POM di Banyumas melakukan pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.





Gambar 1. 5 Data Sarana Produksi



Gambar 1. 6 Data Sarana Distribusi

1.3.3 Isu Internal

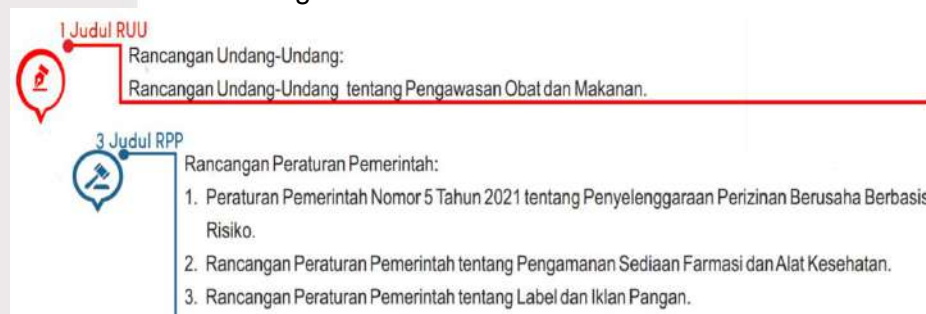
1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Pada Tahun 2021, telah ditetapkan 32 Peraturan BPOM, 21 Keputusan Kepala BPOM, 66 Rumusan Perjanjian. Selain itu BPOM telah melakukan pembahasan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang, 3 Rancangan Peraturan Pemerintah, 40 Rancangan Peraturan BPOM, 2 Rancangan Keputusan





Kepala BPOM. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, BPOM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.



Peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan tersebut mendukung tugas, fungsi dan kewenangan BPOM, namun payung hukum berupa Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah dibahas pada tahun 2021 diatas dibutuhkan untuk dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Saat ini, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

2. Struktur Organisasi

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BBPOM di Semarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan tugas BBPOM di Semarang. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud yaitu perubahan nomenklatur Bidang dan Seksi di Bidang Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi menjadi Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta Sub Bagian menjadi Kelompok Jabatan Fungsional, namun tanpa perubahan tugas dan fungsi semula. Selain itu, Loka POM Kota Surakarta dan Loka POM Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 telah menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri.

3. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021, jumlah SDM yang dimiliki BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per 22 April 2021 adalah sejumlah 4.812 orang yang tersebar di Unit Pusat dan UPT di seluruh Indonesia. Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM Tahun 2020-2024 diperoleh angka beban kerja (ABK) sebanyak 10.009 orang pegawai, sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai sebanyak 5.175 orang pada tahun 2021. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui





jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk gap (kekurangan) pegawai. Pengisian gap tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi, kenaikan jabatan, dan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) agar jumlah SDM BPOM tersebut memadai secara kompetensi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BPOM perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pegawai dan pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

BPOM telah mengembangkan aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) yang merupakan platform pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id> yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management* di lingkungan BPOM pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing data*, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau Unit lain. Kedua aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara mandiri.

Kekuatan SDM Balai Besar POM di Semarang per 24 Desember 2021 adalah 146 orang, diantaranya masih terdapat 21% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan ABK BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024 dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang.

4. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium.

Penerapan *Good Laboratory Practice* (GLP) memiliki konsekuensi terhadap konsistensi dan peningkatan kompetensinya untuk menerapkan “Pedoman Cara Berlaboratorium Yang Baik” dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Tujuan asesmen GLP yaitu untuk memastikan apakah penerapan GLP sesuai standar yang telah ditetapkan. Asesmen GLP merupakan salah satu indikator yang berperan dalam meningkatkan kapasitas dan





kapabilitas pengujian dalam rangka peningkatan cakupan pengawasan. Parameter asesmen GLP meliputi pemenuhan ruang lingkup, pemenuhan kompetensi dan pemenuhan peralatan laboratorium. Pelaksanaan kegiatan berupa wawancara, pengecekan bukti fisik, dan pengamatan lapangan. Penilaian Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Semarang oleh tim Penilai dari PPPOMN mendapatkan total nilai sebesar 81,2% diatas rata-rata capaian seluruh BB/BPOM yaitu sebesar 74,1%. Sehubungan dengan penerapan program Regionalisasi Laboratorium Tahun 2022, maka perlu dilakukan perencanaan pemenuhan dan intervensi yang harus dilakukan oleh Balai POM maupun unit kerja Pusat.

1.3.4 Isu Eksternal

1. Arahan Presiden

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Presiden menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

b. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang (UU). Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

e. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah





tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dalam rangka pelaksanaan arahan Presiden diatas, maka dilakukan implementasi penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission-Risk Based Analysis* (OSS RBA) yang dikembangkan dan dioperasionalkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku lembaga OSS. Sistem OSS RBA ini menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan perizinan sektor obat dan makanan yang dikembangkan dan dioperasionalkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Dukungan UMKM

BBPOM di Semarang terus mendorong peningkatan daya saing UMKM di Jawa Tengah, melalui pembinaan dan pendampingan sertifikasi produk dan fasilitasi gratis pengujian pangan dan obat tradisional dalam rangka registrasi produk.

BBPOM di Semarang bersinergi dengan lintas sektor sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis, berupaya membantu masyarakat pelaku usaha dalam sertifikasi dan izin edar produk, melalui Inovasi BPOM Simpatik (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Teknologi Informatika) dan inovasi Lakone Sekti (Layanan Komunikasi Efektif, Sertifikasi dan Registrasi) dengan mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3. Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat dan makanan ilegal (tanpa izin edar) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka BBPOM di Semarang secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan *full spectrum* mulai *pre market* hingga *post market*. Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal BBPOM di Semarang memperkuat pengawasan melalui koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor di bidang penegakan hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Bea & Cukai, dll.) guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin beragam dan kompleks.

4. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).





BPOM termasuk BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT di wilayah Provinsi Jawa Tengah diharapkan peran sertanya dalam mendukung Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) *Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”*

Kontribusi pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

2) *Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”*

Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui pengawalan pengembangan dan pendampingan industri obat tradisional spesifik lokal.

3) *Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (Health Security)”*

Peran BPOM pada area ini khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi Grand Design Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan termasuk Jejaring Regionalisasi Laboratorium.

4) *Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”*

Peran BPOM pada area ini melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.





Gambar 1. Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta. Setelah mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan. BPOM mempunyai tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria *Compliance* untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat





JKN. BBPOM di Semarang berupaya mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan Industri Farmasi (principal), kepercayaan Regulator, kepercayaan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan Klinik), serta mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.

5. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan *Good Regulatory Practices* yaitu *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Good Laboratory Practices* (GLP), dan *Good Clinical Practices* (GCP). Maka diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran *online* produk Obat dan Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM), terutama proses integrasi sistem BPOM dengan OSS, BKPM.

6. Perkembangan Teknologi Informasi

Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas adalah teknologi *smartphone*. Pemanfaatan *smartphone* dan media elektronik lain salah satunya digunakan untuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan jaringan internet atau dikenal dengan *e-commerce*. Karakter industri komunikasi yang mencakup jaringan internet ini memungkinkan pelaku usaha untuk bertransaksi dengan siapa saja dan di mana saja. Terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 saat ini seluruh masyarakat diharuskan untuk berada di rumah sehingga dengan adanya *e-commerce* ini maka setiap orang tidak perlu bertemu langsung untuk membeli apa yang mereka butuhkan, termasuk di dalamnya adalah obat dan makanan.

Dasar hukum *e-commerce* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi lainnya yang mengatur secara khusus tentang transaksi perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.





Kurangnya kesadaran konsumen dalam memastikan produk yang aman dengan membaca keterangan pada label serta rendahnya pengetahuan konsumen terkait izin edar menyebabkan pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan izin edar dalam memperdagangkan produknya terlebih yang diedarkan secara *online*. Hal ini dapat dilihat dari intensitas konsumen membaca keterangan yang tercantum pada label produk serta keterangan yang menjadi perhatian konsumen saat membeli produk *online*.

7. Pandemi Covid 19 di Jawa Tengah

Pandemi Covid 19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan saja tetapi berdampak pada krisis ekonomi. Perjalanan panjang pandemi sejak Maret tahun 2020 sampai saat ini membuat berbagai sektor mengalami guncangan yang keras. Pada akhir 2021, pandemi Covid 19 di Jawa Tengah sudah menurun namun dampak pandemi Covid 19 masih cukup berpengaruh di berbagai sektor.

a. Dampak Terhadap Sektor Perindustrian

Manufaktur tanah air masih menjadi *leading sector* perekonomian nasional di tengah tekanan pandemi Covid-19. Pada triwulan III/2021, sektor usaha industri pengolahan menyumbang 0,75% (Y-on-Y) terhadap pertumbuhan ekonomi, yang sebesar 3,51%. Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun ini agak sedikit melambat yang diperkirakan karena kasus Covid-19 naik pada Juli-Agustus terlebih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di beberapa wilayah, namun sumbangsih sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional masih tinggi.

Selama Covid-19 dan pemberlakuan PPKM level 4 di beberapa wilayah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan berbagai kebijakan guna mendukung keberlangsungan sektor manufaktur di masa pandemi, misalnya Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) bagi perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam sektor esensial dan kritikal. Melalui upaya tersebut, sektor manufaktur tetap mampu bertahan dari hantaman pandemi dan mampu meminimalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional tumbuh 9,71%, didukung oleh produksi farmasi dan obat-obatan untuk memenuhi permintaan domestik dalam penanganan Covid-19. Industri Makanan dan Minuman tumbuh 9,52% sejalan dengan peningkatan produksi CPO dan turunannya untuk memenuhi permintaan domestik luar negeri. Lima besar kontributor Produk Domestik Bruto (PDB) di periode ini adalah industri makanan dan minuman sebesar 6,66%,



industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 1,96%, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik sebesar 1,57%, industri alat angkutan 1,46%, serta industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 1,05%.

Dalam penanganan pandemi, oksigen untuk industri juga dialihkan menjadi oksigen medis dalam rangka penanganan pasien Covid-19, sehingga beberapa industri mengurangi produksinya. Hal ini membuat pertumbuhan sektor manufaktur menjadi lebih lambat, namun industri memberikan kontribusi yang besar bagi kesehatan masyarakat, sehingga ekonomi bisa kembali pulih. (Kementerian Perindustrian RI, 2021)

b. Dampak Terhadap Sektor Perekonomian Jawa Tengah

Kondisi perekonomian di 2021 pada triwulan III yaitu bulan Juli-September diwarnai dengan kebijakan PPKM oleh pemerintah akibat peningkatan kasus Covid-19 gelombang kedua atau yang dikenal dengan Covid-19 varian delta. Pelaksanaan PPKM di bulan Juli sangat berdampak komprehensif terhadap perputaran ekonomi terutama Jawa Tengah. Pada awalnya pelaksanaan PPKM hanya 2 minggu dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021, tetapi nyatanya terus diperpanjang dan sampai kepada PPKM berlevel, dimana semakin tinggi kasus Covid-19 menyebabkan level PPKM juga meningkat.

Sektor yang berdampak langsung pada PPKM yaitu sektor transportasi dan penyediaan makanan dan minuman di restoran serta jasa perusahaan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, ekonomi Jawa Tengah Kumulatif sampai dengan Triwulan III-2021 tumbuh 2,44% (C-to-C). Dibandingkan dengan Triwulan II-2021 (q-to-q), ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2021 tumbuh sebesar 1,66%. Terhambatnya distribusi barang yang masuk ke Jawa Tengah menyebabkan beberapa lapangan usaha terdampak. Pemenuhan bahan baku industri Jawa Tengah yang berasal dari luar wilayah membuat performa industri pengolahan di triwulan III turun sebesar -1,26% bila dibandingkan Triwulan II (sebelum PPKM darurat). Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2021 dengan kontribusi sebesar 33,61%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 59,37%. (<https://jateng.bps.go.id>, 2021)

Setelah peningkatan keberhasilan program vaksinasi dan penurunan kasus Covid 19, level PPKM secara bertahap semakin menurun terutama di Jawa Tengah dan terlihat geliat ekonomi di berbagai sektor. Dengan terbukanya lagi aktivitas ekonomi di Jawa Tengah





diharapkan akan ada peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

c. Peluang dan Dampak Terhadap Sektor Pertanian atas Klaim Tanaman Obat Herbal

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif 3,51 persen secara year on year (y-on-y). Pertanian tercatat sebagai salah satu sektor yang secara konsisten berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama selama masa pandemi. Pada triwulan III/2021, sektor pertanian tumbuh 1,35%.

Tanaman herbal seperti jahe, kunyit, temulawak laris manis diburu konsumen saat pandemi Covid-19. *Startup* pertanian mencatatkan peningkatan permintaan tanaman herbal, begitu juga pendapatan petani. Penjualan tanaman herbal di secara *online* melonjak selama pandemi Covid-19. Konsumen memburu produk yang dinilai dapat meningkatkan daya tahan tubuh, seperti empon-empon. Lonjakan permintaan utamanya terjadi ketika virus corona pertama kali muncul di Indonesia. Dari melonjaknya permintaan tanaman herbal tersebut muncul klaim-klaim atas obat herbal yang diyakini bisa mencegah atau bahkan mengobati Covid-19. Apalagi Jawa Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan sentra empon-empon dan masyarakatnya sudah secara turun temurun mengkonsumsinya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, setidaknya ada empat poin utama penyebab maraknya bermunculan klaim obat Covid-19 di Tanah Air sehingga meresahkan masyarakat. Pertama, hal itu terjadi karena buruknya politik manajemen penanganan wabah oleh pemerintah sejak awal. Kedua, kurangnya literasi kepada masyarakat terkait produk obat-obatan selama pandemi terjadi. Ketiga yang mengakibatkan maraknya klaim obat bermunculan untuk penyembuhan Covid-19 berkaitan dengan aspek psikologis konsumen. Terakhir karena lemahnya atau kurang optimalnya penanganan aspek hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi.

Indonesia memang memiliki berbagai macam obat herbal dan ramuan empiris. Berbagai ramuan yang berupa jamu seperti beras kencur, temulawak, sambiloto dan kunir asem memang sudah terjamin kesehatannya karena telah dikonsumsi secara turun temurun. Namun, akan sangat berbeda dengan obat Covid-19. Penyakit ini baru saja muncul pada awal 2020. Tentunya, ramuan dari nenek moyang masyarakat Indonesia tidak ada yang menjamin dapat menyembuhkan penyakit Covid-19. Peran BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT Badan POM di masa pandemi ini sangat vital





dalam pengawasan produk obat dan herbal di wilayah Jawa Tengah yang banyak diakui bisa mengatasi virus corona. BBPOM di Semarang menjalankan fungsinya dalam membina dan mendampingi proses penelitian serta mengedukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemahaman obat atau herbal tersebut sudah terdaftar secara spesifik dan memiliki indikasi untuk menyembuhkan korona atau tidak.

- d. Tingginya harapan masyarakat terhadap pengawalan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19.

Pengawalan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin COVID-19 sebelum dan sesudah di peredaran. Badan POM bertugas memberikan jaminan obat, termasuk di dalamnya produk biologi dan vaksin aman, memberikan manfaat/efikasi serta bermutu. Peran Badan POM dimulai dari sebelum diberikannya persetujuan izin edar atau pemberian persetujuan penggunaan saat kondisi kedaruratan atau *Emergency Use Authorization/EUA*, hingga setelah mendapatkan EUA dan didistribusikan ke masyarakat. Setelah Vaksin tiba di Jawa Tengah diharapkan instansi yang berwenang melakukan pengawalan mutu dan keamanan terhadap distribusi vaksin Covid-19 ke sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah Jawa Tengah yaitu gudang farmasi dan Puskesmas. BBPOM di Semarang juga berinisiatif memberikan Bimbingan Teknis Pengelolaan Vaksin Covid-19 sebagai persiapan untuk menjaga mutu dan keamanan Vaksin Covid-19 sampai akhirnya nanti diberikan kepada masyarakat.

1.4.3 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Berdasarkan penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan menjadi tantangan BBPOM di Semarang, diantaranya yaitu:

1. Masih maraknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri di Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Semarang dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
2. Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium BBPOM di Semarang yang cepat dan akurat.
3. Masih relatif rendahnya kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Semarang untuk melakukan pengawasan *post market* dan penguatan farmakovigilans.





4. Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BBPOM di Semarang dalam intensifikasi pengawasan baik *pre/postmarket* obat-obatan tersebut khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM di Provinsi Jawa Tengah.
6. Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*streetfoods*),
7. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, *total fertility rate* (TFR), *contraceptive prevalence rate* (CPR), *unmet need* dan *age fertility specific rate* (ASFR), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi di atas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen kesehatan sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Semarang untuk melakukan pengawasan *post market* di Provinsi Jawa Tengah.
8. Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BBPOM di Semarang dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet di Provinsi Jawa Tengah.
9. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang produksi obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi Pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
10. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BBPOM di Semarang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online* yang dapat memudahkan dan memperluas akses dan jangkauan masyarakat.
11. Dampak Pandemi terhadap peredaran obat dan makanan dan tugas pengawasan BPOM





BAB II PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

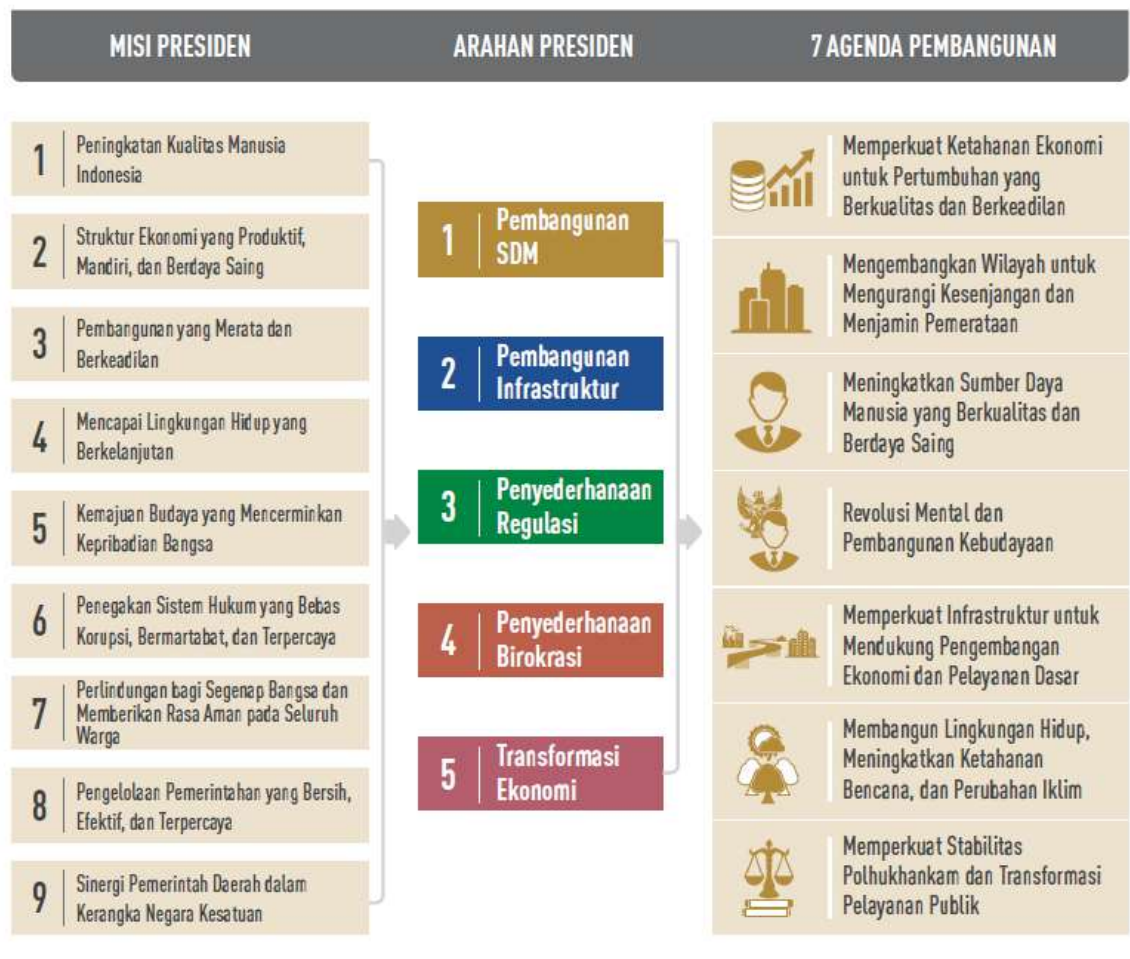
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024 tersebut, maka Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

VISI



*Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong*





Gambar 2.1 VISI, MISI, ARAHAN PRESIDEN, DAN AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar POM di Semarang telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor PR.01.02.104.05.20.1040 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Semarang tersebut disusun dengan mengacu/ berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 serta Rencana Strategis Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2020 – 2024.

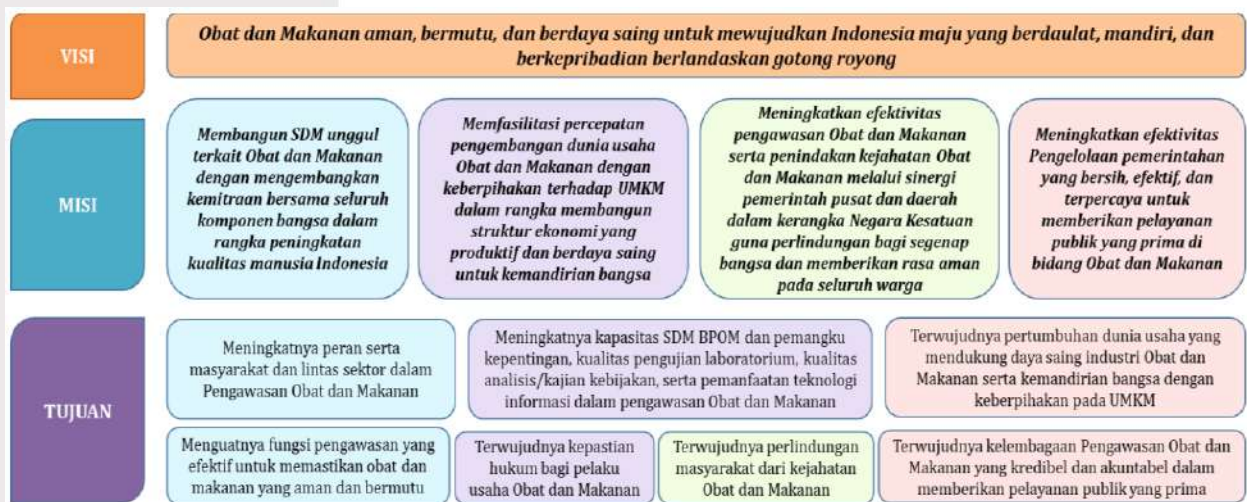
Renstra Balai Besar POM di Semarang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020 – 2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan





Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun kedepan, maka Balai Besar POM di Semarang perlu melakukan reviu terhadap Renstra Balai Besar POM di Semarang tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Visi Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Semarang tidak ada perubahan karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Semarang sebagai berikut:



Gambar 2. 2 VISI, MISI, TUJUAN BBPOM DI SEMARANG PERIODE 2020-2024

Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020 - 2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Semarang, sebagai berikut:



Tabel 2.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2024 – 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatkan peran masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak Lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan Edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
		3. Meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		
	2. Meningkatkan kapasitas SDM	1. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan	1. Penguatan pengelolaan SDM





MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Semarang yang berkinerja optimal 2. Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Balai Besar Pengawas POM di Semarang berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
			2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal		
		1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Indeks kepuasan Pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha
			2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang		





MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat 2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 1. Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko





MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			<p>ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 		
			<ol style="list-style-type: none"> Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 		
	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 	<p>Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.</p>	<p>Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 				





MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik 	<p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Semarang 	<p>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Penguatan pengelolaan sarana/prasana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Semarang yang optimal 4. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Semarang secara akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks RB Balai Besar POM di Semarang Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang 		
			<ol style="list-style-type: none"> Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang *) 		

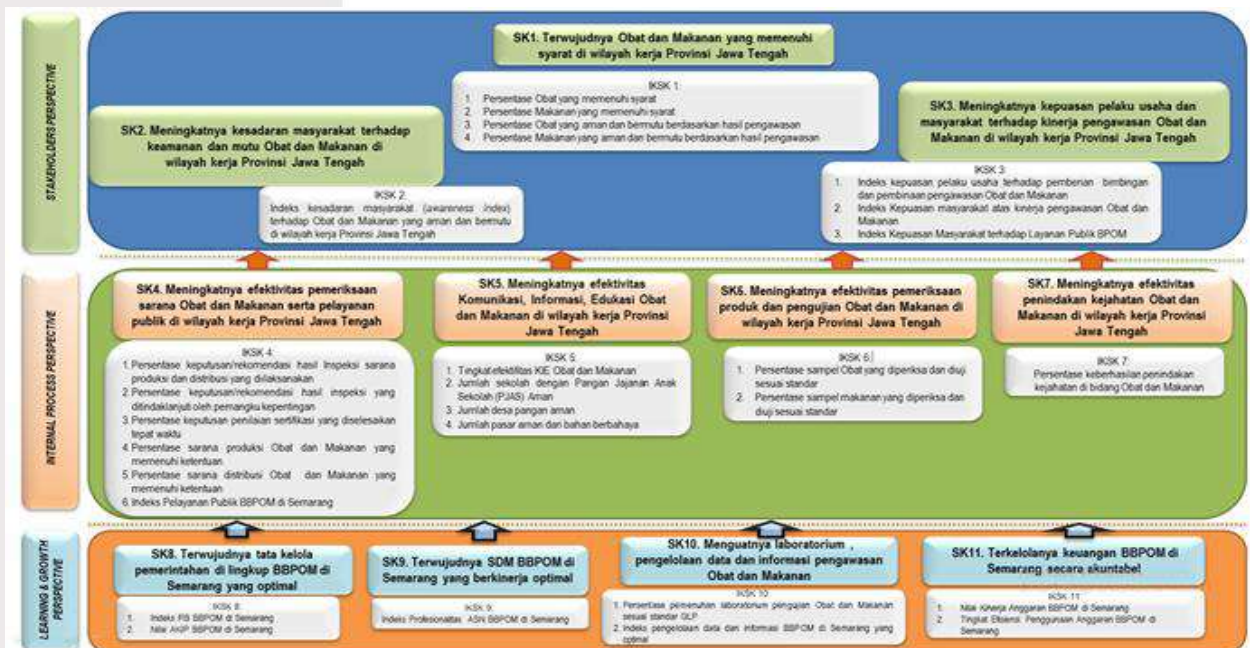




Secara umum tidak terdapat perubahan pada Peta Strategi yang memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Semarang karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang sebagai salah satu UPT BPOM. Namun terdapat penyesuaian terhadap target kinerja dan adanya penambahan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik serta terkait IKU BBPOM di Semarang khususnya terkait indikator Pasar, Perubahan nomenklatur indikator "Pasar aman dari Bahan Berbahaya" menjadi "Pasar Aman berbasis komunitas" merupakan kebijakan Pusat yang dilakukan karena adanya perubahan isu strategis yang dihadapi oleh pasar dimana awalnya hanya isu terkait Bahan Berbahaya menjadi isu cemaran mikrobiologi yang perlu penanganan dan pengawasan lebih intensif."

Penyesuaian terhadap target kinerja dan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Semarang akan dijelaskan lebih rinci setelah Peta Strategi Loka POM. Berikut revisi peta strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020 – 2024:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI SEMARANG (2020-2024)
(semula)

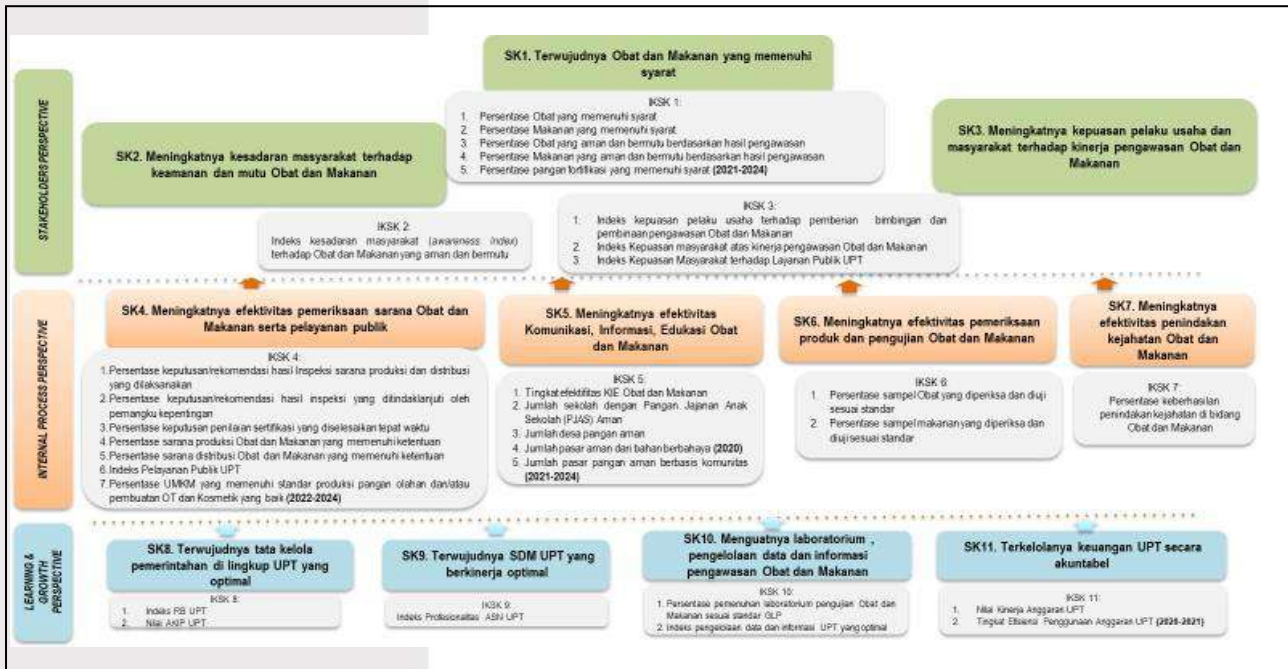


Gambar 2. 3 Peta Strategis BSC Level II Balai Besar POM di Semarang (2020-2024) (semula)





REVISI PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI SEMARANG (2020-2024) (Menjadi)



Gambar 2. 4 Peta Strategis BSC Level II Balai Besar POM di Semarang (2020-2024) (Menjadi)

Penilaian/evaluasi klasifikasi UPT BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM. Evaluasi penilaian klasifikasi UPT yang dilakukan pada tahun 2021 dilakukan secara mandiri dengan bersumber pada data Laporan Tahunan Balai Besar/Balai POM Koordinator dan Laporan Tahunan Loka POM Tahun 2020. Berdasarkan penilaian tersebut didapatkan skor klasifikasi untuk Balai Besar POM di Semarang, Loka POM di Kabupaten Banyumas dan Loka POM di Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Penilaian/evaluasi klasifikasi UPT BPOM

UNIT PELAKSANA TEKNIS	NILAI		KETERANGAN
	2020	2021	
Balai Besar POM di Semarang	1	0,996	Terjadi penurunan nilai yang dipengaruhi oleh menurunnya jumlah sarana karena terdampak pandemi
Loka POM di Kabupaten Banyumas	0,468	0,580	Terjadi peningkatan nilai sebesar 0,112 point
Loka POM di Kota Surakarta	0,524	0,580	Terjadi peningkatan nilai sebesar 0,056 point

Sumber : Monitoring dan Evaluasi Klasifikasi UPT BPOM di Jawa Tengah





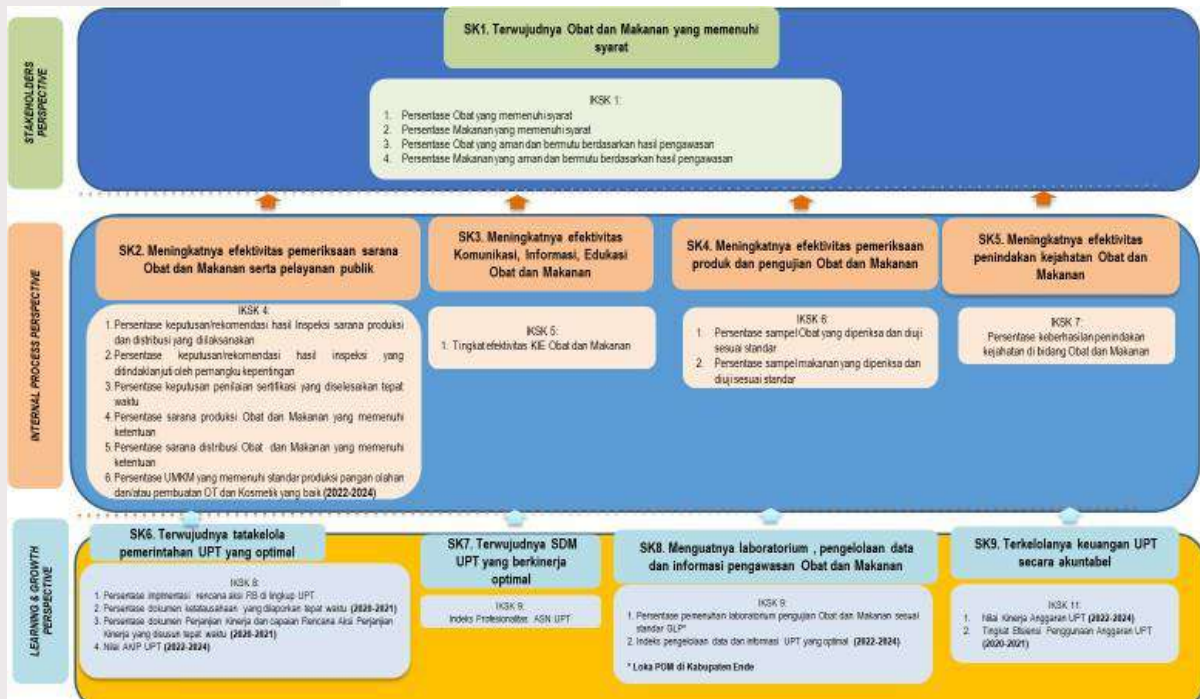
Berdasar penilaian 2021 tersebut Loka POM di Kabupaten Banyumas dan Loka POM Surakarta telah memenuhi Skor untuk naik menjadi Balai POM berdasarkan PerBPOM 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM

1. Total Skor > 0,7625	=	Balai Besar POM
2. Total Skor 0,5751 s.d. 0,7625	=	Balai POM Tipe A
3. Total Skor 0,3876 s.d. 0,575	=	Balai POM Tipe B
4. Total Skor 0,20 s.d. 0,3875	=	Loka POM

Sumber : PERBPOM 11/2018 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UPT DI LINGKUNGAN BPOM

Dan dua loka tersebut telah memenuhi kriteria untuk menjadi satker mandiri, salah satunya adalah memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit perencanaan, pelaksana, pengawasan, pelaporan dan akuntansi). Adapun Peta Strategi Loka POM tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LOKA POM (2020-2024)



Gambar 2. 5 Peta Strategis BSC Loka POM (2020-2024) (Menjadi

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Kinerja Balai Besar POM di Semarang digambarkan dalam Peta Strategi Level 2 Balai Besar POM di Semarang, dimana terdapat perubahan





indikator serta dilakukan penyesuaian target kinerja dengan menggunakan *baseline* baru berdasarkan target kinerja Tahun 2020. Dari 29 (dua puluh sembilan) IKU Balai Besar POM di Semarang secara umum meningkat. Namun demikian terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan target yaitu:

Indeks RB dan Nilai AKIP. Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM Tahun 2020-2024 sebelum dan sesudah revisi 8 November 2021 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2021 (Sebelum)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		2	Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	80
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di BBPOM di Semarang	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	84
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	73
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di BBPOM di Semarang	89,5
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET





INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,7
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		15	Indeks Pelayanan Publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	16	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86
		17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	41
		18	Jumlah desa pangan aman	19
		19	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,5
		21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,5
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
8	Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Semarang yang efektif	23	Indeks RB BBPOM di Semarang	92
		24	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	79
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94,5
		29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	91





Tabel 2. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2021 (Sesudah Revisi)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		2	Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	80
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.5
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di BBPOM di Semarang	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	87.1
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	70.73
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di BBPOM di Semarang	90
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		15	Indeks Pelayanan Publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	4.35
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	16	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.5





SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	41
		18	Jumlah desa pangan aman	19
		19	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
8	Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Semarang yang efektif	23	Indeks RB BBPOM di Semarang	86
		24	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	78.5
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	85.6
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	92.9
		29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	91

2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Berdasarkan RKT dan PK Tahun 2021 disusun RAPK Tahun 2021 dengan menetapkan target yang akan dicapai pada setiap interim/ triwulan serta anggaran yang dialokasikan sebagaimana Tabel 2.4

Target per interim dan kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan BBPOM di Semarang periode 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2021

Indikator Kinerja	TARGET TAHUNAN	TARGET (KUMULATIF)							Kegiatan	Sub Komponen	Komponen	Proporsi	Anggaran Per Indikator
		B3	B6	B9	B10	B11	B12*						
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	51	3165.QIA.005	36.44%	449,214,766	
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	80	80	80	80	52	3165.QIA.005	33.72%	185,449,547	
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	51	3165.QIA.001	13.57%	167,245,734	
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	52	3165.QIA.001	16.28%	89,534,953	
5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94	-	-	94	94	94	94	94	51	3165.QIA.008	50.00%	21,835,000	
6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di BBPOM di Semarang	75	-	-	-	-	-	-	-	51	3165.BDC.001	100.00%	6,280,222,000	
7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	87.1	-	-	-	-	-	-	87.1	52	3165.BAH.001	100.00%	88,260,000	
8 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	70.73	-	-	-	-	-	-	70.73	51	3165.QIC.004	100.00%	46,440,000	
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di BBPOM di Semarang	90	-	-	-	-	-	-	90	52	3165.BKB.001	100.00%	83,625,000	
10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	89	89	89	89	89	89	89	89	52	3165.QIC.001	50.00%	196,513,000	
11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	78	78	78	78	78	78	78	78	52	3165.QIC.004	50.00%	196,513,000	
12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	51	3165.BKB.001	100.00%	272,086,000	
13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	51	51	51	51	51	3165.QIC.001	100.00%	414,076,000	
14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	51	3165.QIC.004	100.00%	634,597,000	
15 Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	4.35	-	-	-	-	-	-	4.35	52	3165.BKB.001	100.00%	83,625,000	
16 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	51	3165.BMB.001	100.00%	99,000,000	
17 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	41	35.00%	55.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	41	51	3165.QDB.001	100.00%	461,135,000	
18 Jumlah desa pangan aman	19	35.00%	50.00%	85.00%	85.00%	95.00%	95.00%	19	52	3165.QDB.002	100.00%	935,317,000	





Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET TAHUNAN	TARGET (KUMULATIF)						Kegiatan	Proporsi	Anggaran Per Indikator
			B3	B6	B9	B10	B11	B12*			
5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	19 Jumlah pasar aman berbasis komunitas	10	25.00%	50.00%	70.00%	70.00%	90.00%	10	A	100.00%	251,895,000
			3165.QDB.003	51							
			3165.QDB.003	53							
6 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	20 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	15	45	75	80	95	100	A	50.00%	616,460,500
			3165.QIA.005	'051							
			3165.QIA.005	'052							
7 Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	21 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20	55	80	80	100	100	A	50.00%	296,819,500
			3165.QIA.001	51							
			3165.QIA.001	52							
8 Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Semarang	22 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5	20	30	50	70	72	72.5	A	100.00%	850,507,000
			3165.QCD.005	51							
			3165.QCD.005	52							
9 Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	23 Indeks RB BBPOM di Semarang	86	-	-	-	-	-	86	A, B, C	100.00%	19,460,000
			3165.BK8.001	51							
			3165.BK8.001	51							
10 Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	24 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	78.5	-	-	-	-	-	78.5	B	100.00%	14,935,000
			3165.BK8.001	51							
			3165.BK8.001	52							
11 Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	25 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	85.6	-	-	-	-	-	85.6	A	100.00%	475,991,000
			3165.ADD.001	51							
			3165.ADD.001	52							
26 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	26 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	-	-	-	-	-	79	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	100.00%	6,597,285,000
			3165.CAB.001	51							
			3165.CAB.001	54							
27 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	27 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2	2	2	2	2	2	2	A, B, C	100.00%	263,666,000
			3165.CAB.002	53							
			3165.CAB.003	54							
28 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	28 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	92.9	50	65	75	75	88	92.9	A	100.00%	25,542,717,000
			6384.EAA.004	'001							
			6384.EAA.004	'002							
29 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	29 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	91	91	91	91	91	91	91	A, AA, AB, B, D, E, G, W, X, Z	100.00%	825,558,000
			3165.BK8.001	51							
			3165.BK8.001	52							
Total Anggaran										46,459,983,000	





2.4 METODE PENGUKURAN DAN KRITERIA PENCAPAIAN

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja organisasi dari setiap pernyataan kinerja **diukur dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja**.

Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah capaian kinerja secara mandiri terhadap kinerja BBPOM di Semarang, guna memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk pengukuran kinerja dengan indikator kinerja lebih dari satu, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) diukur dengan pembobotan masing-masing indikator, yang ditentukan berdasarkan kontribusi indikator tersebut dalam pencapaian sasaran. Sasaran yang hanya memiliki satu indikator, pencapaian NPS diukur dengan faktor pengali pembobotan satu sehingga nilainya tetap sama dengan persentase pencapaian indikator kinerja sasaran.

Pada evaluasi/ laporan kinerja ini, pencapaian suatu indikator ditetapkan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	Blue
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	Orange
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	Green
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	Yellow
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	Red
Sangat Kurang	$< 50\%$	Grey



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Profil Capaian Sasaran BBPOM di Semarang Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara realisasi dicapai dengan target untuk setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam PK BBPOM di Semarang Tahun 2021. Hasil pengukuran capaian IKU selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja untuk masing-masing Sasaran Kegiatan, sebagai berikut:

- 8 (sepuluh) Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: SK1, SK3,SK4, SK5, SK6, SK8,SK9 dan SK 11 dalam kategori **BAIK**;
- 3 (satu) Sasaran Kegiatan, yaitu : SK2, SK7,SK10 dalam kategori **SANGAT BAIK**; serta
- Capaian Sasaran Kegiatan *Stakeholder Perspective* 104,12%, *Internal Process Perspective* 104,53%, dan *Learning & Growth Perspective* 102,70%; yang ketiganya tercapai dalam kategori **BAIK**; sehingga diperoleh:
- **Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)** total tahun 2020 adalah sebesar **103,78%**, dengan kriteria **BAIK**, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1

Berdasarkan nilai NPS, maka **Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2021 adalah *akuntable* dan berhasil mencapai sasaran dengan kriteria BAIK.**

Tahun 2021 merupakan tahun kedua periode Renstra 2020-2024, Sasaran Kegiatan Renstra 2020-2024 sama dengan tahun sebelumnya tetapi terdapat penambahan indikator kinerja Renstra 2020-2024 yaitu Indikator “Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat” pada SK1 dimana perhitungan di lakukan pada Triwulan ke IV. Jika dilihat NPS tahun 2021 dibandingkan dengan NPS 2020 (102,81) terjadi peningkatan 0,97 poin. Ini diartikan bahwa pencapaian **Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2020 ke tahun 2021 adalah semakin *akuntable*.**

3.1.2 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) BBPOM Klaster 2

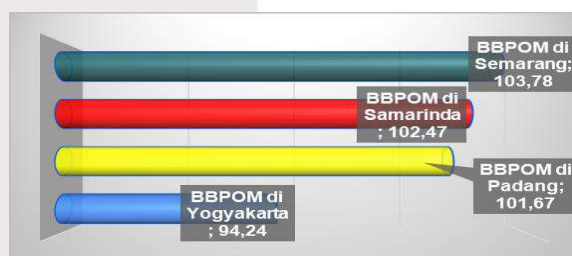
Berdasarkan pembagian klaster, BBPOM di Semarang masuk dalam Klaster 2 yang terdiri dari: BBPOM di Samarinda, BBPOM di Semarang, BBPOM di Padang, dan BBPOM di Yogyakarta. Pencapaian NPS BBPOM Klaster 2 dapat dilihat pada tabel 3.1, dan nilai capaian kinerja selengkapnya untuk tiap indikator dapat dilihat pada Lampiran.





Tabel 3. 1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Bbpom Di Semarang Dan Bbpom Klaster 2 Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN		NPS			
		Samarinda	Semarang	Padang	Yogyakarta
CAPAIAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE		103,27	104,12	97,17	97,81
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	107,04	92,83	103,5	91,01
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	99,13	116,07	88,43	106,21
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	103,63	103,46	99,57	96,21
CAPAIAN INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE		104,37	104,53	105,25	89,35
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	100,62	103,13	104,59	101,8
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	104,84	102,71	99,51	100,26
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	96,04	100	96,88	97,16
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	115,98	112,28	120	58,17
CAPAIAN LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		99,79	102,70	102,60	95,56
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	98,05	100,41	100,05	99,26
SK 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	100,28	95,29	102,39	98,96
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100,22	111,38	104,74	95,39
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	100,61	103,72	103,23	88,62
NPS TOTAL		102,48	103,78	101,67	94,24



Gambar 3. 1 Perbandingan Total NPS BBPOM Klaster 2 Tahun 2021

NPS Total untuk BBPOM Klaster 2 Tahun 2021, sebagaimana grafik di samping. BBPOM di Semarang berada pada urutan Pertama. Analisa, perbandingan, faktor keberhasilan, serta kendala dibahas secara rinci untuk tiap capaian indikator kinerja pada Bab ini di bagian 3.1.4.





3.1.3 Indikator Kinerja Utama Sasaran BBPOM Di Semarang

Profil capaian indikator kinerja Utama (IKU) tahun 2021 sebagian besar tercapai dengan kriteria baik, sebagai berikut :

- 4 (empat) IK, yaitu : IK 1.2, IK 2.1, IK 4.1, dan IK 7.1; **13,79%** tercapai dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
- 22 (dua puluh) IK, yaitu : IK 1.1, IK 1.4, IK 3.1, IK 3.2, IK 3.3, , IK 4.2, IK 4.3, IK 4.4, IK 4.5, IK 4.6, IK 5.1, IK 5.2, IK 5.3, IK 5.4, IK 6.1, IK 6.2, IK 8.1, IK 8.2, IK 9.1, IK 10.1, IK 11.1 dan IK 11.2; **75,86%** tercapai dengan kriteria **BAIK**;
- 1 (satu) IK, yaitu IK 1.3; **3,45%** tercapai dengan kriteria **CUKUP**,
- 1 (satu) IK, yaitu IK 1.5; **3,45%** tercapai dengan kriteria **KURANG**,
- 1 (satu) IK, yaitu: IK 10.2; **3,45%** tercapai dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**



Gambar 3. 2 Diagram Profil Capaian Indikator Utama BBPOM di Semarang Tahun 2021

Hasil pengukurannya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran.



Gambar 3. 3 Perbandingan Hasil Pengukuran Klaster 2

Jika dibandingkan dengan balai seklaster, maka urutan BBPOM di Semarang:

Ketiga, setelah BBPOM di Samarinda untuk capaian IK dengan kriteria SANGAT BAIK

Kedua, setelah BBPOM di Padang, untuk IK dengan kriteria BAIK

Analisa, perbandingan, faktor keberhasilan serta kendala tiap capaian indikator kinerja dibahas secara rinci pada Bab ini di bagian 3.2.





3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 CAPAIAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE

SK
1

Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat Di Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang

Pencapaian Sasaran Kegiatan pertama pada Tahun 2021 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN PERTAMA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5	86,67	95,77%	Baik
IK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	90,96	113,70%	Sangat Baik
IK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,2	74,12	83,09%	Cukup
IK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	84,80	109,42%	Baik
IK 1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94	58,46	62,19%	Kurang
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				92,83%	Baik

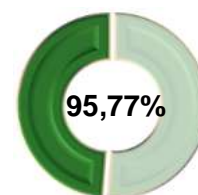
Sumber : Data Kinerja Triwulan IV yang di olah

NPS SK 1 sebesar **92,83%**, menggambarkan bahwa BBPOM di Semarang mampu Mewujudkan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerjanya dengan kategori **BAIK**.

IK 1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Semarang

- Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Realisasi indikator kinerja obat yang memenuhi syarat (MS) sebesar 86,67% jika dibanding dengan target 90,5%, maka diperoleh **capaian 95,77%** dengan kategori **BAIK**. Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional (OT), suplemen kesehatan (SK), dan kosmetik. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.75% dibandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2020 yaitu dari 84.02% tahun 2020 menjadi 86.67% ditahun 2021





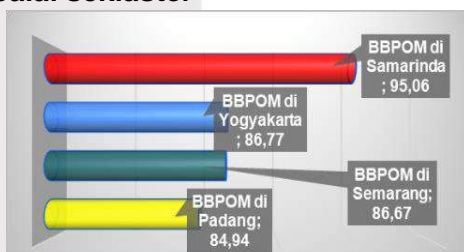
- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah**

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
86,67	90,5	91	91,5	92,3	83,6	92,25	93,5	94,75

Realisasi tahun 2021 belum melampaui target jangka menengah baik Renstra BBPOM di Semarang maupun Nasional. BBPOM di Semarang harus bekerja keras untuk meningkatkan 4,33% agar dapat mencapai target 2022.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 4 Perbandingan Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat BBPOM Klaster 2

Capaian IK ini, jika dibandingkan dengan 3 (tiga) balai seklaster maka BBPOM di Semarang pada urutan ke 3, terlihat dari grafik disamping, akan tetapi realisasi kinerja sebesar 86.67% masih diatas target nasional yaitu 83.6%

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Adanya perbedaan target

Tabel 3. 4 PROFIL MS DAN TMS HASIL SAMPLING OBAT SECARA ACAK TAHUN 2021

	MS	TMS	%TMS	
Obat	524	460	64	12,21%
Kosmetik	628	569	59	9,39%
SK	125	113	12	9,60%
OT	348	265	83	23,85%
Jumlah	1625	1407	218	13,41%

Target BBPOM di Semarang (90,5%) paling tinggi dibanding dengan balai seklaster, yaitu BBPOM di Samarinda (90,0%), BBPOM di Padang (85,5%), BBPOM di Yogyakarta (90,0%); serta diatas target nasional yaitu 83.6%

Perbedaan target ini berdasarkan kondisi banyaknya produk OT yang beredar di wilayah Jawa Tengah yang tidak memenuhi syarat, sehingga capaian indikator ini dalam kategori **Baik** walaupun di bawah balai seklaster.





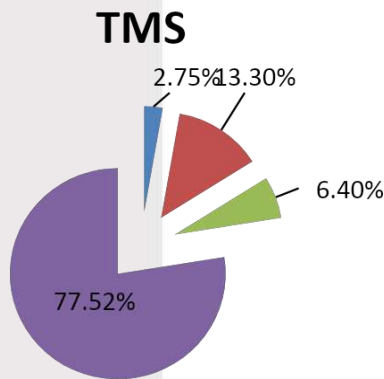
2. Kondisi peredaran produk obat di Jawa Tengah berbeda dengan provinsi lain

Prosentase obat yang MS diwilayah pengawasan BBPOM di Semarang tahun 2021 adalah sebesar 13,41%. Dibandingkan tahun 2020 jumlah yang TMS ini menurun sebesar 2,16% dari sebelumnya jumlah yang TMS sebesar 15,57%

Persentase komoditi yang paling banyak TMS adalah produk OT. Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 348 sampel OT, sebanyak **83 sampel (23,85%) TMS**, atau sebesar 38.07% dari total sampel TMS (83 sampel OT TMS dari 218) Dari 218 sampel yang TMS, jumlah produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu terdiri dari TMS mutu dan penandaan 2,75%; TMS mutu 13,3,%; produk TIE 6,4%%; jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan TMK penandaan yang mencapai 77,52%

Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi BBPOM di Semarang untuk terus meningkatkan pengawasan, pembinaan (KIE) pada pelaku usaha dalam meningkatkan kesadaran pentingnya informasi label produk.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Gambar 3. 5 diagram Produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu

Berdasarkan sampling secara acak/random, persentase obat beredar di Provinsi Jawa Tengah yang MS sebesar 86,67%, dan BBPOM di Semarang dinyatakan berhasil mencapai target dengan **kriteria Baik (95,77%)**. Capaian tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung, antara lain:

- a. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap produsen sehingga produk yang dihasilkan memenuhi syarat mutu dan kualitas, melalui pemeriksaan rutin maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar, workshop.
- b. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan serta sarana pelayanan kefarmasian untuk melakukan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk yang diedarkan merupakan produk yang sudah memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas, tidak kadaluwarsa serta disimpan dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.





- c. Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
- d. Pelaksanakan KIE mengenai Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang berkualitas.

Meski demikian, masih ditemukan obat yang TMS (13,41%) di Jawa Tengah walaupun sebagian besar berupa TMK penandaan (77,52%), dan TMS mutu hanya 16.05%. Faktor penyebabnya, antara lain:

1. Masih adanya produsen yang kurang patuh dalam menerapkan dan/ atau kurang memahami peraturan terkait penandaan produk.
2. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.

Adanya obat TMS di wilayah Jawa Tengah, menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalisasirnya. Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja persentase obat MS di tahun mendatang, adalah:

1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi / Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik.
2. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Selama masa pandemi Covid19 pengawasan ke sarana produksi / distribusi/ tetap dilakukan menggunakan metode daring maupun luring disesuaikan dengan kondisi Level PPKM.
3. Melaksanakan KIE tentang obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang berkualitas.
4. Menyelenggarakan pendampingan, pembinaan, dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB Bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
5. Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001: 2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen pengawasan, salah satunya dengan verifikasi Metode Analisa yang baru yang telah ditetapkan oleh P3OMN dan disesuaikan dengan tren produk beredar.
6. *Review* terhadap target tahun 2021-2024. Penetapan kembali target yang lebih *reasonable*, sesuai dengan kondisi peredaran obat di Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya.





- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu:

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pengujian yang didukung dengan kapasitas laboratorium yang memadai.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

1. PPKM ketat pada periode Juli-Agustus menyebabkan:
 - a. terbatasnya ruang gerak untuk sampling terutama untuk sampling metode acak.
 - b. kegiatan uji terhambat sehingga pengujian sampel tidak selesai pada bulan berjalan.
 - c. terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan ke sarana produksi dan distribusi serta KIE kepada masyarakat.
2. Ketersediaan jumlah sampel di sarana sering tidak mencukupi untuk PUK (Parameter Uji Kritis).
3. Untuk sampel obat, tidak semua zat aktif dalam pedoman sampling bisa dilakukan uji sehingga pilihan untuk pengambilan sampel menjadi terbatas.

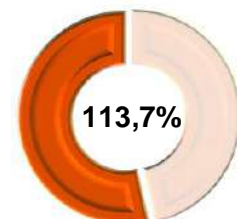
- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Capaian persentase obat, OT, SK, dan kosmetika yang MS tahun 2021 dalam kategori baik dan telah meningkat dibanding tahun 2020. Sesuai rekomendasi tahun 2020, mengingat jumlah TMK penandaan yang banyak, telah direkomendasikan agar materi terkait penandaan perlu ditambahkan pada bimtek untuk pelaku usaha.

IK 1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat BPOM di Semarang

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja makanan yang memenuhi syarat sebesar 90,96% jika dibanding dengan target 80,00%, maka diperoleh **capaian** indikator kinerja **113,7%** dengan kategori **SANGAT BAIK**. Capaian ini diperoleh dari persentase sampel acak yang memenuhi syarat. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 16.62% dibandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2020 yaitu dari 74,34% menjadi 90,96% ditahun 2021, melebihi target indikator kinerja Balai BPOM di Semarang yaitu 80%.





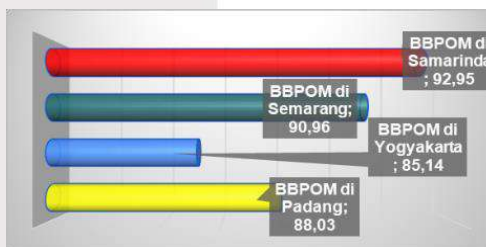
- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
90,96	80	82	84	86	80	83	84,2	86

Realisasi indikator kinerja ini melebihi target renstra 2024 yaitu sebesar 86%. Karena hal tersebut disarankan untuk revisi target pada tahun 2022.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 6 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat BBPOM Klaster 2

Grafik Capaian IK disamping jika dibandingkan dengan 3 (tiga) balai seklaster maka BBPOM di Semarang di posisi ke dua dibawah BBPOM di Samarinda namun lebih tinggi dari BBPOM di Padang dan BBPOM di Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target nasional Realisasi 2021 BBPOM di Semarang sudah melampaui diatas target nasional 2024 (86).

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Semarang 113,7% dengan kategori **Sangat Baik**. Hal yang mendukung pencapaian tersebut antara lain:

1. Adanya program Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.
2. Adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pangan memberikan efek jera kepada pelaku usaha untuk selalu mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
3. Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha pangan.
4. Meningkatnya kemampuan laboratorium dalam pengujian produk makanan dengan memutakhirkan metode analisa yang digunakan, memverifikasi metode analisa, dan mengikuti uji profisiensi untuk mempertahankan akreditasi laboratorium.





5. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap produsen sehingga produk yang dihasilkan memenuhi syarat mutu dan kualitas, melalui pemeriksaan rutin maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar, workshop.
 6. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi pangan untuk melakukan Cara Distribusi Pangan yang Baik sehingga produk yang diedarkan merupakan produk yang sudah memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas, tidak kadaluwarsa serta disimpan dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
 7. Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPMB, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran pangan untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
 8. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Persentase makanan yang memenuhi syarat dicapai melalui kegiatan sampling acak, penandaan dan pengujian.

Adapun Rincian realisasi indikator kinerja dapat dilihat pada tabel disamping:

Tabel 3. 6 MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2021

Jumlah Sampling	MS (MK Penandaan MS Hasil Uji)	TMK			TMS		
		TIE	Kedaluarsa	Rusak	MK Penandaan TMS Uji Lab	TMK Penandaan MS Uji Lab	TMK Penandaan TMS Uji Lab
634	576 (90,96%)	1	0	0	46(7,27%)	98 (15,48%)	8 (1,26%)
TMK Penandaan					116 (75,82% dari total sampel TMS%)		
Jumlah TMK & TMS					153 (24,17%)		

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**
1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan. Selama masa pandemi Covid-19 pembinaan ke sarana produksi tetap dilakukan baik menggunakan metode daring maupun secara luring dengan protokol kesehatan. Parameter tidak memenuhi syarat yang dominan pada sampel acak adalah TMK penandaan label terutama sampel pangan PIRT yang tidak mencantumkan nomor bets, sehingga pengawasan penandaan perlu lebih diintensifkan.
 2. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.





3. Perlunya pembinaan lebih intensif terkait penandaan produk kepada para pelaku usaha baik melalui penyelenggaraan bimbingan teknis maupun sosialisasi, terutama kepada para pelaku usaha PIRT.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.
5. Meningkatkan kemampuan laboratorium dalam pengujian produk makanan dengan memutakhirkan metode analisa yang digunakan, memverifikasi metode analisa, dan mengikuti uji profisiensi untuk mempertahankan akreditasi laboratorium.

IK 1.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 erbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 sebesar 74,12% apabila dibandingkan dengan target Balai tahun 2020 sebesar 89,20% maka nilai **capaiannya adalah 83,09%** dengan kriteria **CUKUP**. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4,33% dibandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2020 yaitu dari 78,45% menjadi 74,12% ditahun 2021



- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.3 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

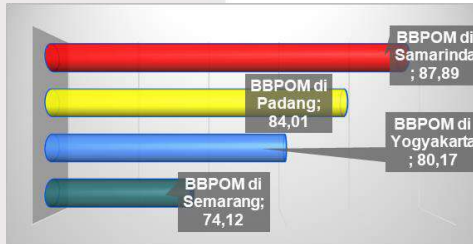
Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
89,20	89,2	89,4	89,6	90	87,5	88,5	89,5	91

Untuk mencapai target tahun 2022 sebesar 74,12%; maka BBPOM di Semarang harus menaikkan realisasi capaiannya lebih tinggi yaitu sebanyak 15,38%. Target tahun 2022 masih jauh pencapaiannya mengingat kondisi masih banyaknya obat TMK penandaan, sehingga diperlukan penyesuaian target atau kerja keras untuk mencapainya.





- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 7 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu BBPOM Klaster 2

Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Semarang paling rendah jika dibandingkan dengan 3 (tiga) balai yang seklaster, terlihat dari grafik di samping.

Target BBPOM di Semarang (89,20%) lebih tinggi dibanding BBPOM di Padang (84,00%), BBPOM di Yogyakarta (88,30%), dan sedikit di bawah target Samarinda (89,50%), serta di atas target nasional (76,5%).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa obat aman dan bermutu yang beredar di wilayah Jawa Tengah paling rendah daripada 3 provinsi lainnya, serta belum mencapai target nasional. Hal ini disebabkan karena banyak sampel TMK penandaan terutama sampel OT produksi UKOT dan UMOT.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Berdasarkan sampling *targeted*, BBPOM di Semarang dinyatakan Cukup berhasil (83,09%). Belum optimalnya capaian indikator ini disebabkan, antara lain:

1. Penetapan target yang cukup tinggi berakibat pada pencapaian indikator yang belum maksimal.
2. Adanya sampling *targeted* yang difokuskan pada sampel dengan riwayat TMS dan kasus, sehingga menambah persentase produk TMS.
3. Masih cukup banyak produk OT TMS di pasaran.
4. Produsen kurang patuh dalam menerapkan dan/ atau kurang memahami peraturan terkait penandaan produk.
5. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Persentase obat aman dan bermutu cukup tercapai melalui kegiatan sampling *targeted*, pengawasan penandaan dan pengujian. Adapun rincian hasil kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





Tabel 3. 8 HASIL SAMPLING TARGETED, PENGAWASAN PENANDAAN, DAN PENGUJIAN TAHUN 2021

Produk	Jumlah Sampling	MS (MK Penandaan MS Hasil Uji)	TMK (Tidak Diuji Lab)			TMS			
			TIE	Kedalu Wakt	Rusak	MK Penandaan TMS Uji Lab	TMK Penandaan MS Uji Lab	TMK Penandaan TMS Uji Lab	
Obat	139	118	0	0	0	2	19	0	
Kosmetik	323	224	0	0	0	6	92	1	
SK	55	45	0	0	0	4	5	1	
OT	175	122	0	0	0	17	31	5	
Jumlah	692	509 (73,55%)	0	0	0	29	147	7	
Jumlah TMK Penandaan							154 (84,15% dari jumlah TMS)		
Jumlah TMS & TMK			183 (26,44% dari jumlah sampel)						

Sampel *targeted* Obat adalah sampel obat covid, obat JKN (BPJS), obat kasus Inspeksi, sampel rokok. Sampel *targeted* Obat tradisional dan suplemen kesehatan adalah sampel yang disampling secara

online, sampel yang mempunyai riwayat TMS, sampel kasus dari bidang Inspeksi, sampel UMKM, sampel unggulan daerah dan sampel import. Sampel *targeted* kosmetik adalah track record, China/Taiwan, online, menengah ke bawah dan sampling mandiri Balai. Dari tabel di atas, 692 sampel obat yang masuk, sebanyak 509 sampel memenuhi syarat, dan 183 sampel (26,44%) tidak memenuhi syarat. Lebih dari 50% total sampel TMS dikarenakan TMK penandaan (84,15%) dan sebagian besar adalah sampel obat tradisional. Hal ini menunjukkan masih perlu peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha untuk mentaati CPOTB melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- PPKM ketat pada periode Juli-Agustus menyebabkan:
 - a. kegiatan uji terhambat sehingga pengujian sampel tidak selesai pada bulan berjalan.
 - b. terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan ke sarana produksi dan distribusi serta KIE kepada masyarakat

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- a. Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian untuk membuat perencanaan ulang sampling sampai dengan bulan Desember.
- b. Melakukan pembinaan kepada sarana produksi terkait hasil uji yang TMS.
- c. Mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Penandaan dan Iklan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika pada bulan April 2021.
- d. Penyusunan perencanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan kajian analisis resiko sehingga sarana produksi dan distribusi dengan *track record* tidak memenuhi ketentuan dan produk tidak memenuhi syarat lebih intensif mendapatkan pengawasan, pembinaan dan pendampingan.





- e. Memaksimalkan kegiatan pengawasan, pembinaan, pendampingan sarana produksi dan distribusi, dan KIE secara luring, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui daring.
- f. Mengevaluasi kembali kemampuan laboratorium dalam menguji sampel obat sesuai pedoman sampling, untuk melihat adanya peluang peningkatan
- g. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.

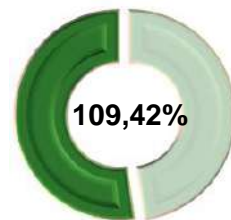
● **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Di tahun 2021 telah dilaksanakan pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB Bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.

IK 1.4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

● **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja prosentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 sebesar 84,80% atau dengan nilai capaian **109,42%** jika dibandingkan target 77,5% dengan kategori **BAIK**. Capaian ini diperoleh dari persentase sampel targeted yang memenuhi syarat terhadap target. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,22% dibandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2020 yaitu dari 77,58% menjadi 84,80% ditahun 2021.



● **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.4 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

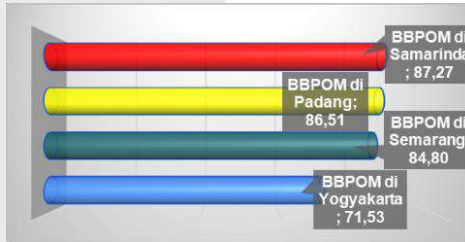
Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
84.80	77,8	79	81	88	76,5	77,5	79	81,5

Meski realisasi tahun 2021 melebihi target 2021-2023 tetapi jika dibandingkan dengan target renstra 2024 masih membutuhkan 3,2% untuk mencapainya.





- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 8 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu BBPOM Klaster 2

Grafik di samping menunjukkan capaian indikator kinerja BBPOM di Semarang dalam kategori **Baik**, berada pada posisi ketiga setelah BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Padang, dan diatas BBPOM di Yogyakarta yang mendapat capaian pada kategori Cukup. Jika dibandingkan dengan target nasional Realisasi 2021 telah melebihi target nasional 2024 (81,5)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 109,42% dengan kategori **Baik**. Hal yang mendukung pencapaian tersebut antara lain:

1. Pembinaan pada pelaku usaha dalam rangka permohonan ijin produksi, berupa bimbingan teknis UMKM dan bantuan uji laboratorium untuk pendaftaran pangan pada UMKM.
2. Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang melibatkan sekolah, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat, Instansi lintas sektor baik secara tatap muka dengan protokol kesehatan maupun melalui web dan media sosial (facebook, twitter, facebook, instagram).
3. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap produsen dan sarana distribusi pangan sehingga produk pangan yang beredar di area Jawa Tengah merupakan produk yang aman dan bermutu.
4. Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPMB, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran pangan untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
5. Pelaksanaan Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Imlek, Lebaran, Natal dan Tahun Baru sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.
6. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

Sampling PJAS mulai dilakukan pada bulan September dengan kendala kantin/ pedagang yang berjualan di area sekolah masih sedikit karena masih dalam masa pandemi Covid-19.





- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Persentase makanan yang aman dan bermutu dicapai melalui kegiatan sampling *targeted*, pengawasan penandaan dan pengujian. Adapun rincian capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 10 MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2021

Jumlah Sampling	MS (MK Penandaan MS Hasil Uji)	TMK			TMS		
		TIE	Kedalu arsa	Rusak	MK Penandaan TMS Uji Lab	TMK Penandaan MS Uji Lab	TMK Penandaan TMS Uji Lab
356	307 (86,24%)	1	0	0	45 (12,64%)	3 (0,84%)	0
TMS Penandaan					3 (7,81%)		
Jumlah TMK & TMS					49 (13,76%)		

Sampel makanan yang aman dan bermutu adalah sampel yang disampling *targeted*, yaitu: minyak goreng, tepung terigu, garam beryodium, dan sampel pendampingan UMKM.

Dari total 356 sampel yang disampling, 49 sampel yang TMS sebagian besar TMS terhadap mutu.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja.**

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja tahun 2020, yang telah dilakukan di tahun 2021 antara lain:

1. Menyelenggarakan pendampingan, pembinaan dan sertifikasi pemenuhan CPPB, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran pangan untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
2. Meningkatkan mutu pengujian dengan menerapkan jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi/validasi metode dan uji profisiensi maupun uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.
3. Sampling PJAS tidak hanya di area sekolah (kantin/ pedagang sekolah) namun juga ke toko/pedagang yang sering dikunjungi oleh anak-anak sekolah sesuai dengan juklak yang baru.
4. Pembinaan kepada sarana produksi pangan MD dan PIRT terkait hasil uji yang TMS.
5. Penyusunan perencanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan kajian analisis resiko.
6. Memaksimalkan kegiatan pengawasan, pembinaan, pendampingan sarana produksi dan distribusi dan KIE secara luring, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui daring.
7. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.

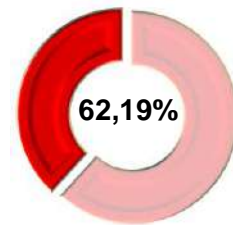




IK1.5 Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat

- Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2021 sebesar 58,46% atau dengan nilai capaian **62,19%** jika dibandingkan target 94,00% dengan kategori **KURANG**. Persentase Pangan Fortifikasi ini baru menjadi target Indikator kinerja pada tahun 2021 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Perhitungan indikator ini berdasarkan hasil uji sampel yang disampling *targeted/purpose* terhadap pangan fortifikasi yang meliputi garam beryodium, tepung terigu dan minyak goreng sawit.

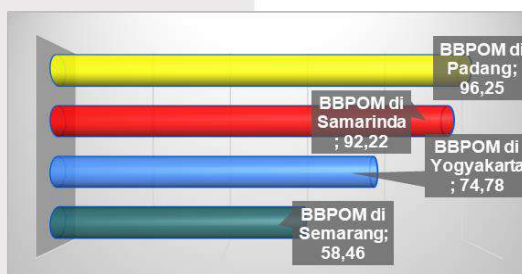
- Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan target jangka menengah

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.5 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
84.80	94	95	96	97	88	89	90	90

Realisasi indikator kinerja ini ditargetkan mencapai 94% pada tahun 2022 dan 97% pada akhir Renstra 2024. Diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut mengingat realisasi pada tahun 2021 masuk kategori Kurang. Yang dapat dilakukan yaitu merevisi penurunan target dengan justifikasi kondisi komoditi pangan fortifikasi di Jawa Tengah yang belum mendukung pencapaian indikator ini.

- Perbandingan realiasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster



Grafik di samping menunjukkan capaian indikator kinerja BBPOM di Semarang berada pada posisi paling rendah diantara Balai seklaster. Jika di bandingkan target nasional masih jauh di bawah target nasional 2021 yaitu 88.

Gambar 3. 9 Perbandingan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat BBPOM Klaster 2





- **Analisis penyebab kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisa penyebab pencapaian indikator kinerja “persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” berada di kategori kurang yaitu:

- a. Banyaknya sampel fortifikasi yang TMS terutama TMS kadar yodium pada garam dan TMS kadar vitamin A pada minyak goreng sawit.
- b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha garam terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan.
- c. Pencampuran garam dengan Iodium yang tidak merata pada sarana produksi karena teknik pencampuran masih dilakukan secara manual.
- d. Pengujian kadar yodium yang dilakukan oleh produsen garam menggunakan test kit, dimana test kit tersebut disimpan pada kondisi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan sehingga hasil pengujian tidak sesuai yang sebenarnya.
- e. Adanya iklan/ pendapat yang menyebutkan minyak goreng yang baik adalah minyak goreng yang bening karena adanya dua kali penyaringan, masyarakat lebih menyukai minyak goreng yang bening sehingga produsen berlomba-lomba untuk membuat produk minyak goreng menjadi bening. Sedangkan adanya penambahan vitamin A sebanyak 45 IU disarana produksi menyebabkan warna minyak goreng berwarna agak kecoklatan.
- f. Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit sudah diberlakukan secara wajib sejak 1 Januari 2021 (Kemenperindustrian memberikan waktu tenggat 6 bulan – 1 tahun dari tenggat 1 Januari 2020 bagi industri melaksanakan kewajiban SNI minyak goreng berfortifikasi vitamin A), namun penerapan sanksi bagi perusahaan yang melanggar belum diterapkan secara tegas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.**

- a) Memaksimalkan kegiatan pengawasan, pembinaan, pendampingan sarana produksi dan distribusi dan KIE secara luring, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui daring.
- b) Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.
- c) Sosialisasi terkait mandatory kewajiban penambahan fortifikasi pada minyak goreng sawit.
- d) Bimtek penambahan fortifikasi yang benar kepada pelaku usaha.
- e) Untuk fortifikasi garam sudah dilakukan bimtek kepada pelaku usaha bersama lintas sektor dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta kerjasama berupa pembinaan bekerjasama dengan Universitas Dian Nuswantoro





g. Rekomendasi perbaikan kinerja.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja adalah:

- a) Pembinaan kepada sarana produksi pangan terkait hasil uji yang TMS.
- b) Melaksanakan bimtek ke para pelaku usaha industri garam dan audiensi ke pemerintah daerah terkait usaha industri garam.
- c) Penyusunan perencanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan kajian analisis resiko

SK
2

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Mutu Obat Dan Makanan Di BBPOM Di Semarang

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi.

Indeks dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa

Survei pengukuran tingkat kesadaran masyarakat dilakukan pada seluruh komoditas obat dan makanan berdasarkan indikator pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK:

1. **Pengetahuan (*knowledge*)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. **Sikap (*attitude*)** untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.





3. **Perilaku (*practices*)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Pencapaian Sasaran Kegiatan Kedua pada tahun 2021 diukur dengan **1 (satu) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 **PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KEDUA**

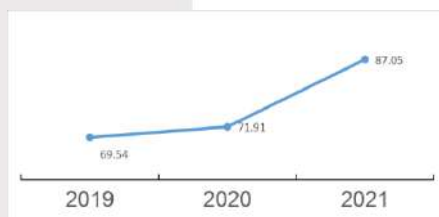
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	75	87,05	116,07%	Sangat Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				116,07%	Sangat Baik

Sumber : Data Kinerja Triwulan IV yang di olah

NPS SK 2 **sebesar 116,07%**, menggambarkan bahwa Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Mutu Obat Dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah meningkat dengan kategori **SANGAT BAIK**.

IK 2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

- Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3. 10 Grafik Perbandingan realisasi indeks kesadaran masyarakat dari tahun 2019-2021

Bila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 2019 maka realisasi kinerja indeks kesadaran masyarakat (*Awareness Index*) terus meningkat dari tahun ke tahun.





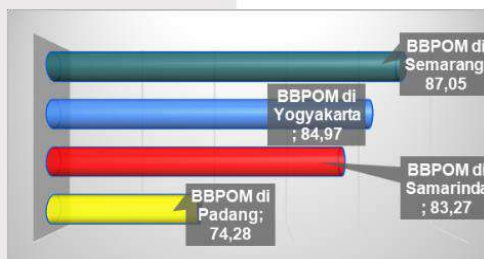
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 2.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
84.80	75	78	81	84	77	80	83	85

Perbandingan realisasi kinerja indeks kesadaran masyarakat dengan target jangka menengah sudah jauh melampaui target bahkan sampai akhir renstra (84), berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan revisi target renstra.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 11 Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) BBPOM Klaster 2

Bila dibandingkan nilai Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar seklaster, BBPOM di Semarang memperoleh realisasi Indeks Kinerja yang tertinggi dibandingkan dengan Balai Besar yang lainnya. Jika dibandingkan dengan target Nasional 2021 (77), nilai indeks kesadaran masyarakat di wilayah Provinsi Jawa

Tengah jauh lebih tinggi bahkan mendekati target nasional 2024, ini menunjukkan bahwa upaya BBPOM di Semarang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan telah berhasil dengan sangat baik.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Tercapainya Indeks Kesadaran Masyarakat dengan kriteria sangat baik, didukung oleh:

- Tersedianya media sosial (instagram, facebook, twitter, website) BBPOM di Semarang, pemanfaatan secara optimal media cetak, media elektronik yaitu radio-TV dan media online lainnya.
- Tersedianya alat peraga untuk KIE yang lebih beragam misalnya dalam bentuk permainan seperti ular tangga, monopoli, kwartet anak dan kwartet dewasa, dalam bentuk flip chart, poster, booklet, banner, dan leaflet yang dibagikan kepada masyarakat saat melakukan KIE atau kunjungan/pembinaan agar materi KIE lebih mudah dipahami.





c. Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan berbagai bentuk KIE kepada masyarakat

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Untuk pencapaian Indeks dengan kategori sangat baik, BPOM di Semarang telah melakukan program/kegiatan yang mendukung keberhasilan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Optimalisasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, melalui berbagai kegiatan baik daring ataupun luring dan pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, dll), media cetak, media elektronik yaitu radio-TV dan media online lainnya.
- b. Menyisipkan informasi cek KLIK di semua materi KIE yang disesuaikan dengan target masyarakatnya, agar dapat dipahami dengan lebih baik.
- c. Pemberdayaan dilakukan terhadap berbagai organisasi masyarakat diantaranya Aisyiyah, Salimah, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI), PKK, Dan Pramuka. Dari masing-masing organisasi masyarakat ini ditunjuk beberapa orang untuk dijadikan kader keamanan pangan dan setiap kader diwajibkan melakukan sosialisasi kembali ilmu yang sudah didapat kepada komunitasnya dan secara mandiri juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat lain di sekitarnya.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunitas Sekolah dan Komunitas Pasar
- e. Pemberdayaan komunitas pramuka melalui pelatihan anggota SAKA POM yang selanjutnya mensosialisasikan kembali kepada pramuka lainnya.
- f. Kegiatan inovasi Sekilas Info Untuk PeLANggan BPOM (SIULAN) berupa siaran langsung melalui Instagram Live
- g. Program pembinaan yang intensif dan komprehensif kepada produsen pangan yang masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya melalui program inovasi Pangan Unggulan Sehat, Keamanannya Terjaga dan Bergizi.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

- a. Frekuensi, kualitas, dan kuantitas penyelenggaraan KIE kepada komunitas masyarakat yang diberdayakan terus ditingkatkan dengan membuat materi-materi KIE di media sosial (instagram, facebook, twitter) dan kegiatan inovasi SIULAN yang lebih informatif dan menarik.
- b. Mengunggah berita-berita aktual di website dan media social serta membuat siaran langsung melalui Instagram Live.
- c. Penyelenggaraan program inovasi SeRentak MemberIKAN PenDidikan (SRIKANDI) berupa pemberian informasi terkait profil BPOM di Semarang dan pengetahuan tentang obat dan makanan secara daring dan masif





sehingga dapat lebih banyak mengikutsertakan masyarakat umum dan komunitas tertentu.

- d. Pemberdayaan kader yang dibentuk dari program Desa Pangan Aman dan Intervensi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) dalam kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang aman.

SK 3 *Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha Dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Di BBPOM Di Semarang*

Pencapaian Sasaran Kegiatan ketiga pada Tahun 2021 diukur dengan **3 (tiga) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 **PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KETIGA**

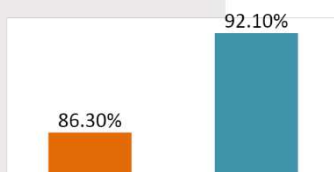
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,1	92,10	105,74%	Baik
IK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,73	72,56	102,59%	Baik
IK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	91,84	102,04%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				103,46%	Baik

Sumber : Data Kinerja Triwulan IV yang di olah

NPS SK 3 **sebesar 103,46%**, menggambarkan bahwa Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang meningkat dengan kategori **BAIK**.

IK 3.1 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

- Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3. 12 Perbandingan Realiasi IK 3.1 tahun 2020 dan 2021

Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan indikator baru dalam Renstra BPOM 2020-2024. Indeks ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level 0, sasaran strategis 3 yaitu Meningkatkan Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku



Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan. *Cascading* IKU ini terdapat pada level I (Kedepujian I, II, dan III) dan level II (Balai Besar/Balai POM).

Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang terhadap target 2021 adalah **sebesar 105,74%** kriteria **BAIK**.



Perbandingan realisasi tahun 2021 (92,10) dengan tahun 2020 (86,03) yang merupakan awal ditetapkan IK ini menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Perbandingan realisasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, belum bisa dilakukan karena tahun 2020 merupakan awal ditetapkan IK ini.

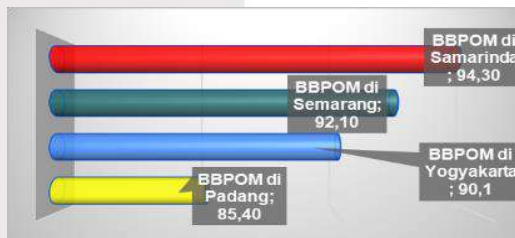
• **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Realisasi tahun 2021 (92,10) telah melampaui target jangka menengah BBPOM di Semarang maupun target jangka menengah Nasional, namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha.

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
92,1	87,1	88,2	89,3	90,4	88	89	90	91

• **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 13 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Klaster 2

Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Semarang apabila dibandingkan BBPOM seklaster menempati urutan kedua setelah BBPOM di Samarinda.

Jika dibandingkan dengan target Nasional (88) dan realisasi nasional (86,5), maka BBPOM klaster 2 di atas target Nasional kecuali BBPOM di Padang.

PRKOM melakukan penilaian Indeks Unit Penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) yang dilakukan untuk melihat kualitas capaian unit berdasarkan pertimbangan jumlah kegiatan, jumlah responden,





dan gap capaian indeks terhadap target. Indeks Unit Penyelenggara KBP di BBPOM klaster 2, BBPOM di Semarang berada pada peringkat 1 dengan skor 11 kategori A (Sangat Baik). Jika secara Nasional, BBPOM di Semarang menempati peringkat ketiga setelah BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Makassar.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha melebihi target balai, target nasional, dan capaian nasional adalah pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi maupun registrasi produk, serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara luring, maupun daring seperti kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang berkompeten.

Kenaikan realisasi tahun 2021 (92,10) terhadap tahun 2020 (86,03) yang cukup signifikan didukung oleh faktor aplikasi survei indeks kepuasan pelaku usaha dari PRKOM di tahun 2021 yang sudah cukup mumpuni sehingga lebih mobile friendly untuk mencegah kesalahan pengisian survey, pertanyaan survey disesuaikan dengan pelaksanaan KBP pada kondisi pandemi, serta penghitungan indeks yang dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi. Pembobotan jenis kegiatan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) sehingga bobot yang digunakan menjadi lebih ilmiah. Bobot yang diperoleh yaitu pendampingan 0,326, desk 0,303, bimtek 0,260, dan sosialisasi 0,110. Disamping itu, kondisi pandemi Covid 19 pada tahun 2021 sudah mulai mereda sehingga kegiatan bimbingan dan pembinaan secara luring sudah dapat dilaksanakan. Kegiatan bimbingan dan pembinaan secara luring lebih diminati oleh pelaku usaha dan narasumber karena lebih interaktif dan materi KBP dapat diterima dengan lebih baik.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya Indeks kepuasan pelaku usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang tahun 2021 selama periode yang ditetapkan PRKOM, yaitu 4 Januari 2021 – 30 November 2021 adalah 13 kegiatan yang meliputi 4 kegiatan pendampingan, 3 kegiatan desk, dan 6 kegiatan bimtek untuk komoditi Obat, OT, SK, Kosmetik, dan Pangan Olahan, dengan metode luring dan daring.





- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM adalah:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis UMKM Pangan Olahan Jawa Tengah Menuju MD untuk komoditi pangan olahan yang dilaksanakan di Hotel Grand Candi, Kota Semarang secara luring dan daring dengan metode yang lebih interaktif dan menghadirkan narasumber dari DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah dan BBPOM di Semarang sehingga pelaku usaha dapat menyampaikan permasalahan dan kendala yang dialami secara langsung dan narasumber dalam memberikan alternatif solusi secara langsung.
2. Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM Semarang: Kiat UMKM Pengolah Pangan Menuju MD, merupakan salah satu kegiatan BBPOM di Semarang yang banyak diminati oleh pelaku usaha karena tetap dapat diikuti di masa pandemi dan memberikan pengetahuan teknis terkait registrasi Pangan Olahan yang sedang banyak diminati oleh UMKM di Jawa Tengah.
3. Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam rangka Sertifikasi dan Registrasi Produk memberikan dampak langsung terhadap percepatan penyelesaian proses sertifikasi maupun registrasi yang sedang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga layanan ini mendapat apresiasi yang baik dan meningkatkan kepuasan pelaku usaha.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Hasil pengukuran kinerja BBPOM di Semarang terkait kepuasan pelaku usaha terhadap layanan bimbingan dan pembinaan memperoleh nilai 92,10 menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang “Sangat Puas” (rentang 76-100) terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan, sehingga diharapkan dapat berpengaruh pada pemahaman pelaku usaha atas regulasi BPOM yang kemudian berdampak pada kepatuhan dalam memenuhi persyaratan sehingga mendorong peningkatan mutu, khasiat, manfaat, dan keamanan produk Obat dan Makanan.

Pendistribusian jumlah kegiatan untuk tiap komoditi dan jumlah responden pada setiap kegiatan kurang merata menyebabkan kurang meratanya kesempatan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan layanan bimbingan dan pembinaan dari BBPOM di Semarang. Hal tersebut terjadi karena jumlah pelaku usaha untuk tiap komoditi yang tidak seragam.

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini memperoleh banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan selanjutnya, dan sebagainya. Kondisi pandemi juga mempengaruhi pemilihan media pelaksanaan bimbingan dan



pembinaan, yang dulunya dilakukan secara tatap muka langsung menjadi online. Pelayanan online memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka langsung sehingga berpengaruh pada kepuasan pelaku usaha, diantaranya kendala jaringan internet, materi bimbingan dan pembinaan yang kebanyakan bersifat teknis dan mendetail untuk dapat disampaikan secara online.

Sesuai rekomendasi tahun 2020, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan BBPOM di Semarang fokus pada materi yang berdampak langsung terhadap percepatan perizinan/sertifikasi pelaku usaha, dan pada tahun 2021 nilai pada aspek tersebut meningkat. Hal ini tetap direkomendasikan untuk pelaksanaan tahun kedepan karena parameter ini merupakan tujuan utama dari pelaku usaha.

Berdasarkan hasil survei periode 2021, direkomendasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan BBPOM di Semarang memperhatikan kecukupan waktu pelaksanaan dan juga hal-hal dalam aspek tangible karena merupakan aspek yang nilainya berada di bawah aspek yang lain. Peran dan awareness penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam perencanaan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan KBP dan monitoring KBP. Dengan adanya target, maka dapat ditentukan minimal responden yang diharapkan sehingga data survei menjadi lebih baik dan lebih representatif. Pendalaman untuk menggali persepsi petugas penyelenggara KBP terhadap kegiatan yang diselenggarakan juga akan memperkaya hasil survei IKEPU dan menajamkan rekomendasi yang disusun karena dapat memotret gambaran yang lebih komprehensif dari dua sisi; sisi pelaku usaha yang diberi layanan KBP dan sisi petugas yang menyelenggarakan layanan.

Penilaian Indeks Unit Penyelenggara KBP oleh PRKOM menunjukkan capaian BBPOM di Semarang (105,8%) lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Jakarta (100,1%) dan BBPOM di Makassar (104,6%), namun BBPOM di Semarang berada pada peringkat ketiga secara nasional setelah kedua BBPOM di atas dengan skor yang sama, yaitu 11 kategori A (Sangat Baik), hasil tersebut disebabkan penilaian indeks tersebut dilakukan untuk melihat kualitas capaian unit berdasarkan pertimbangan jumlah kegiatan, jumlah responden, dan gap capaian indeks terhadap target. Sehubungan dengan hal tersebut dan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, maka perlu direviu kembali target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diatas akan ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan bimbingan dan pembinaan di tahun 2022 ini.



Tabel 3. 16 RINCIAN KEGIATAN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA DI WILAYAH KERJA BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2021

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
1	Bimbingan Teknis / Sinai Online Sareng BBPOM Semarang : Kiat UMKM Pengolah Pangan Menuju MD	Daring	2021-03-23 s.d 2021-03- 23	28	95,11
2	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP	Luring dan Daring	2021-01-04 s.d 2021-12- 31	19	89,7
3	Pendampingan / Pendampingan terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPKB dan Notifikasi Kosmetik	Luring dan Daring	2021-01-04 s.d 2021-12- 31	6	95,52
4	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional	Luring dan Daring	2021-01-04 s.d 2021-12- 31	3	100
5	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis CPPOB dan E- Registrasi Pangan Olahan	Luring	2021-04-08 s.d 2021-04- 08	33	97,23





No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
6	Desk / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan di Semarang 1	Daring	2021-06-21 s.d 2021-06-22	43	90
7	Desk / Pelayanan Prima Registrasi OTSK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar di Semarang	Luring dan Daring	2021-06-02 s.d 2021-06-04	35	88,59
8	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Seluk Beluk Denah Kosmetik	Daring	2021-05-10 s.d 2021-05-10	6	94,82
9	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis UMKM Pangan Olahan Jawa Tengah Menuju MD	Luring dan Daring	2021-06-22 s.d 2021-06-22	40	95,21
10	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Sistem Jemput Bola Pelayanan Publik Ekspor Pangan Olahan	Luring	2021-09-08 s.d 2021-09-08	6	81,03
11	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi CPPOB	Luring	2021-10-06 s.d 2021-10-06	20	88,45
12	Pendampingan / Pekan Gelar Pendampingan UMK Frozen Food di Kota Semarang	Luring	2021-11-02 s.d 2021-11-02	17	95,43





No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
13	Desk / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput bola Registrasi Pangan Olahan di Balai Besar POM Semarang (Batch 2)	Daring	2021-11-04 s.d 2021-11-05	48	86,41

IK 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mengukur keberhasilan program dan capaian target kinerja pengawasan obat dan makanan, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap indikator kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan secara sistematis dan *scientific based*.

Kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BBPOM di Semarang. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan merupakan kepuasan secara tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat karena terkait *outcome* kinerja BBPOM di Semarang. Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan adalah 72,56 termasuk dalam kategori **BAIK**, dimana persentase capaian terhadap target indeks yang telah ditetapkan adalah sebesar 102,59%.



- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh dari penilaian persepsi tingkat kepuasan



Masyarakat terhadap keseluruhan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang.



Pada periode tahun 2021 bila nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan BBPOM di Semarang dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat meskipun target lebih rendah. Jika dibandingkan dengan target nasional (74) nilai indeks kepuasan masyarakat

masih dibawah target, yang berarti bahwa upaya BBPOM di Semarang masih perlu untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap keseluruhan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Jawa Tengah.

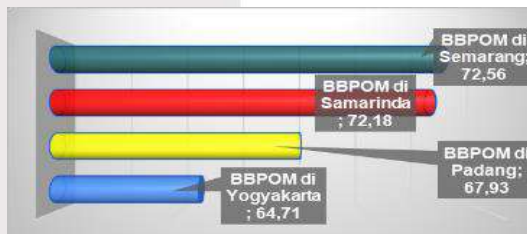
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
2021	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
72,56	70,78	72,16	78,58	75,01	74	77	80	83

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra, nilai Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dibandingkan target masih dalam kategori **BAIK**, maka BBPOM di Semarang harus menaikan realisasi lebih tinggi dari yang direncanakan. Target tahun 2022-2024 masih memungkinkan untuk dicapai dengan kinerja yang tinggi.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 15 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Klaster 2

Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang apabila dibandingkan BBPOM seklaster yang lain adalah yang tertinggi, tetapi jika dibandingkan dengan target Nasional 2021 (74) belum memenuhi target, sehingga perlu dilakukan peningkatan layanan kepada masyarakat dan perbaikan

komprehensif pada setiap lini proses pengawasan.





- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hal yang mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan adalah:

1. Terpenuhinya standar pelayanan pengaduan dan informasi konsumen Balai Besar POM di Semarang setiap saat melalui media sosial dan nomor whatsapp layanan pengaduan dan informasi.
2. Melibatkan partisipasi dari berbagai komunitas masyarakat dalam melaksanakan KIE melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan media luar ruang (spanduk, banner dan poster) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang obat dan makanan.
3. Upaya terus menerus BBPOM di Semarang dalam meningkatkan kinerja pengawasannya meskipun di tengah era pandemik yang berlangsung sepanjang tahun.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Publikasi kegiatan/program untuk melindungi masyarakat melalui berbagai media seperti media sosial (instagram, facebook, twitter, dan subsite), media elektronik (radio) dan media cetak (surat kabar), serta media luar ruang sebagai sumber informasi bagi masyarakat.
2. Penyebaran informasi kepada berbagai komunitas masyarakat melalui penyelenggaraan KIE secara luring maupun daring terkait produk obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan.
3. Pemberian informasi kepada masyarakat melalui penyediaan produk informasi di instansi lintas sektor terkait seperti leaflet, brosur dan banner di DPMPTSP, Mal Pelayanan Publik, dan Perpustakaan daerah

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

- a) Optimalisasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- b) Penegakan hukum secara adil dan tegas
- c) Program Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang hari raya keagamaan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.
- d) Program pembinaan yang intensif dan komprehensif kepada produsen pangan yang masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya melalui program inovasi Pangan Unggulan Sehat, Keamanannya Terjaga dan Bergizi.
- e) Pelayanan Pengaduan secara Komprehensif.



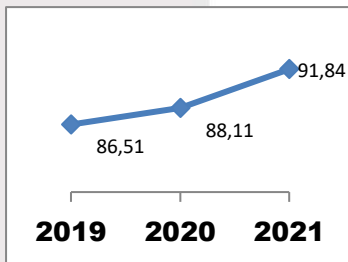


IK 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang dihitung melalui survei yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM terhadap 183 responden yang telah menerima 3 (tiga) jenis layanan yaitu layanan pengujian, layanan SKI/SKE dan layanan informasi dan pengaduan. Responden mengisi survei melalui link yang disediakan oleh Inspektorat Badan POM dimana responden tersebut ditentukan oleh pihak BBPOM di Semarang.

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh inspektorat, diperoleh realisasi Survei Kepuasan Masyarakat BBPOM di Semarang terhadap penyelenggaraan layanan publik tahun 2021 sebesar 91,84, nilai ini di atas target nilai yang ditetapkan yaitu 90,00. Berdasarkan mutu layanan, realisasi survei kepuasan masyarakat dengan nilai 91,84 termasuk kategori **BAIK**. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh capaian dengan persentase sebesar **102,04%**, sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu layanan BBPOM di Semarang mendapat kategori **BAIK**.



Gambar 3.16 Grafik Perbandingan IK 3.3 Realisasi tahun 2019-2021

Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BBPOM di Semarang sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya upaya terus menerus yang dilakukan BBPOM di Semarang dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Sebelum tahun 2019, BBPOM di Semarang melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara mandiri, baru mulai tahun 2019 Inspektorat Utama menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat berskala nasional, meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik baru dimasukkan sebagai Indikator Kinerja per 2020. Oleh karena itu perbandingan hasil persepsi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Semarang tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020, dikarenakan metode pengukurannya berbeda.





Pada tahun 2021, terjadi peningkatan perolehan nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana pada tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 88,11, sedangkan pada tahun 2021 diperoleh nilai sebesar 91,84, terjadi peningkatan sebesar 3,73 poin.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

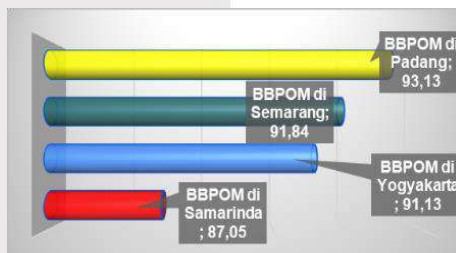
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.3 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
91,84	90	91	92	93	88,46	89,45	90,35	91,29

Berdasarkan tabel diatas, realisasi nilai BBPOM di Semarang tahun 2021 (91,84) telah melampaui target jangka menengah BBPOM di Semarang maupun target jangka menengah Nasional, dengan persentase capaian masih dalam kategori **BAIK**.

Namun demikian, BBPOM di Semarang harus mempertahankan dan selalu melakukan upaya peningkatan kinerja agar target akhir renstra dapat tercapai terus menerus baik dari segi target jangka menengah maupun nasional.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Klaster 2

Pada tahun 2021, jika nilai indeks yang diperoleh BBPOM di Semarang dibandingkan dengan nilai BBPOM dalam satu cluster, maka dapat disimpulkan bahwa nilai indeks BBPOM di Semarang berada di urutan kedua nilai tertinggi setelah BBPOM di Padang.

Jika dibandingkan dengan target Nasional (88,46), maka realisasi BBPOM di Semarang melampaui target Nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Semarang didukung oleh:

- a. Petugas yang kompeten dalam melakukan layanan informasi dan pengaduan.
Adanya persamaan persepsi antar petugas dalam melakukan layanan informasi dan pengaduan yang diperoleh melalui pelatihan, sosialisasi,





- seminar dan pembentukan *whatsapp group* antar sesama petugas untuk saling berbagi informasi terkini.
- b. Sikap dan perilaku petugas yang melayani dengan sepenuh hati berdasarkan prinsip 5S yaitu sambut dengan senyum dan salam didasari semangat melayani untuk memberikan solusi.
 - c. Fasilitas pelayanan publik yang memadai dan selalu ditingkatkan untuk kenyamanan konsumen. Pada tahun 2021 telah dilakukan pengadaan melengkapi toilet dengan WC jongkok dan sarana cuci tangan.
 - d. Materi pendukung yang telah tersedia dalam bentuk leaflet, banner, poster, dokumen elektronik lainnya.
 - e. Perluasan cangkupan responden, dengan menambahkan responden baru penerima layanan atau informasi ditambah dengan lintas sektor terkait.
 - f. Tersedianya sarana pelayanan informasi dan pengaduan melalui on line (*whatsapp*, email, telepon), media sosial (*instagram*, facebook, twitter, website), sehingga pelanggan yang membutuhkan informasi tetap memiliki alternatif sarana komunikasi yang mudah diakses tanpa harus tatap muka.
 - g. Melakukan Up-date peraturan dan mengevaluasi Standar Pelayanan Publik BBPOM di Semarang.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:
 - a. Survei kepuasan masyarakat kepada pelanggan yang dilakukan secara mandiri oleh BBPOM di Semarang, dan dievaluasi setiap bulan. Pelaksanaan SKM di Balai bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan untuk mendapatkan saran/masukan dari pelanggan.
 - b. Kegiatan “Lakone Sekti” (LAYanan KONSultasi Efektif Sertifikasi regisTrasi obat dan makanan) yang dilaksanakan sebagai salah satu inovasi untuk mendekatkan BBPOM di Semarang hadir langsung ke masyarakat yang berasal dari Kabupaten yang jauh dari kota Semarang (untuk periode tahun 2021, pelaksanaan kegiatan ini terbatas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen).
 - c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui:
 - “SOS” (Sinau on line sareng) BBPOM di Semarang,
 - Inovasi “SIULAN” (Sekilas Info Untuk PeLANggan BPOM) yang dilakukan rutin sebulan sekali berupa siaran langsung melalui Instagram *Live* , dan
 - Inovasi “Melon Manis” (MELalui Online MemberikAN InformaSi) yang memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada





masyarakat serta menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**
 - a. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui pelatihan, sosialisasi, seminar.
 - b. Menambah jadwal dan lokasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik di beberapa daerah.
 - c. Sebelum mengisi survei, responden diberi informasi terlebih dahulu bahwa pengisian survei terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai termasuk sarana pendukungnya, bukan layanan dari badan POM, dan juga diberi informasi tentang jenis pelayanan yang diterima (Pelayanan Pengujian/Pelayanan SKI-SKE/Pelayanan Informasi dan Pengaduan). Hal ini untuk mengurangi adanya perbedaan persepsi dari responden terhadap isian survei.
 - d. Perbaikan sarana dan prasarana di ruang layanan, misalnya:
 - Menyediakan mesin antrian elektronik bagi pelanggan.
 - Membuat jalur penuntun dan petunjuk (*Guiding Block*) bagi penyandang disabilitas.

3.2.2 CAPAIAN INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

SK
4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat Dan Makanan Serta Pelayanan Publik Di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Pada tahun 2021, BBPOM di Semarang telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah BBPOM di Semarang dengan nilai **NPS 103,13%** kriteria **BAIK**.





Tabel 3. 19 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KEEMPAT

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100,00	112,36%	Sangat Baik
IK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78	72,77	93,29%	Baik
IK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99,79	100,79%	Baik
IK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	53,56	105,02%	Baik
IK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	74,81	106,88%	Baik
IK 4.6	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,37	100,46%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				103,13%	Baik

Sumber : Data Kinerja Triwulan IV yang di olah

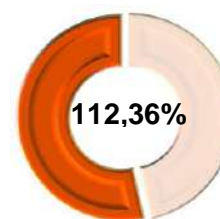
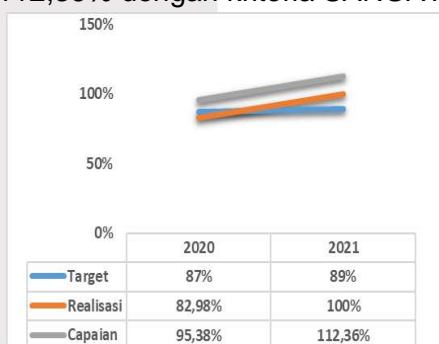
Pencapaian tersebut didukung oleh 6 indikator sebagai berikut:

IK 4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan meliputi : 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan dan ditindaklanjuti oleh BBPOM di Semarang; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti BBPOM di Semarang; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan BBPOM di Semarang yang ditindaklanjuti oleh Pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti oleh BBPOM di Semarang.

• Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pada tahun 2021, BBPOM di Semarang telah menindaklanjuti keputusan/rekomendasi 100% dari target 89% sehingga capaian indikator ini sebesar 112,36% dengan kriteria SANGAT BAIK.



Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana capaian indikator ini sebesar 95,38% kriteria BAIK maka tahun 2021 telah terjadi peningkatan cukup signifikan

Gambar 3. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.1. Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya





sebesar 16,98%. Perbandingan capaian IK 4.1 dengan tahun 2019 atau kurun waktu lima tahun terakhir tidak dapat dilakukan karena belum ditetapkan sebagai indikator kinerja.

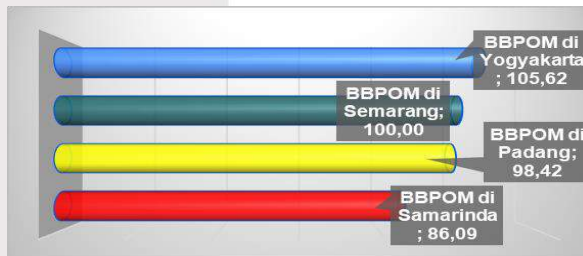
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
2021	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
100	89	91	93	95	89	91	93	95

Target jangka menengah sebesar 95% telah dapat dicapai BBPOM di Semarang dengan realisasi 100% pada tahun 2021. Hal ini merupakan suatu keberhasilan dan perlu dipertahankan di tahun berikutnya.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM Klaster

2

Target keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada target Nasional sebesar 89% dapat dicapai BBPOM di Semarang. Di antara Balai seklaster, capaian realisasi kinerja IK 4.1 BBPOM di Semarang lebih baik dibanding BBPOM di Padang dan BBPOM di Samarinda.

- **Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi/distribusi dilaksanakan yaitu :

- Tersedianya peraturan di bidang obat dan makanan sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut
- Tersedianya pedoman tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana produksi/distribusi obat dan makanan
- Koordinasi yang baik dan berkesinambungan dengan Badan POM, UPT lain dan pemangku kepentingan terkait





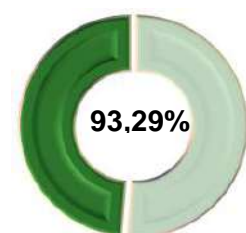
- d) Pemantauan pelaksanaan pembuatan surat tindak lanjut secara konsisten untuk memastikan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang disampaikan dapat dilaksanakan.
 - e) Penggunaan aplikasi sikd.pom.go.id yang memudahkan pembuatan, monitoring, dan pendokumentasian surat tindak lanjut.
 - f) Kompetensi inspektur yang memadai dalam menentukan tindak lanjut yang tepat.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana dilaksanakan, antara lain :
 - a) Agenda rutin kegiatan pertemuan lintas sektor setiap tahun dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait
 - b) Peningkatan kompetensi inspektur melalui pelatihan internal/diseminasi baik secara online maupun tatap muka.
 - **Rekomendasi perbaikan kinerja**
Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ke depan perlu dilakukan :
 - a) Konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
 - b) Pengembangan aplikasi/metode penyusunan draft surat rekomendasi/tindak lanjut terhadap hasil inspeksi sarana yang lebih mudah dan cepat.
 - c) Meningkatkan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan.

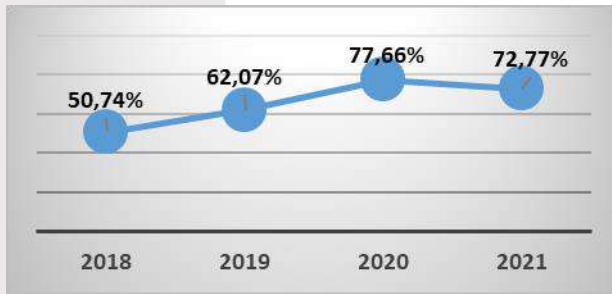
IK 4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terdiri dari rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait. Rekomendasi hasil inspeksi yang memenuhi ketentuan berupa laporan hasil pemeriksaan, sedangkan untuk hasil tidak memenuhi ketentuan diberikan sanksi administratif berupa surat perintah perbaikan/pencegahan, peringatan, peringatan keras, dan penghentian sementara kegiatan.

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Pada tahun 2021, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi oleh BBPOM di Semarang yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait sebesar 72,77% dari target 78% sehingga capaian indikator ini 93,29% dengan kriteria BAIK.





Gambar 3. 20 Grafik Realisasi IK 4.2. tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018-2020, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi oleh BBPOM di Semarang yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait tahun 2021 menunjukkan tren kenaikan.

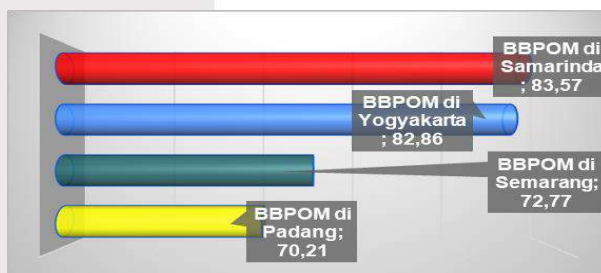
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
2021	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
72,77	78	80	83	85	60	65	70	75

Target jangka menengah sebesar 85% belum dicapai BBPOM di Semarang pada tahun 2021. Untuk itu di tahun berikutnya diperlukan upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut dan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi BBPOM Klaster 2

Target Nasional tahun 2021 sebesar 60% telah dapat dicapai oleh BBPOM di Semarang. Di antara Balai seklaster, realisasi kinerja IK 4.2 BBPOM di Semarang di posisi ketiga, namun hal ini juga disebabkan target BBPOM di Semarang sebesar 78% paling tinggi di antara Balai Seklaster (70-76%).

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan antara lain :

- a) Konsistensi monitoring dan evaluasi terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang harus ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan,





sehingga jika batas waktu penyampaian surat terlewat dilakukan komunikasi kepada pelaku usaha/lintas sektor terkait.

- b) Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha dalam menyusun tindakan perbaikan dan pencegahan.
 - c) Adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait, baik instansi pemegang kebijakan maupun organisasi profesi, sehingga mereka komitmen dan berpartisipasi aktif dalam mengawal pelaksanaan keputusan/rekomendasi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dimana Badan POM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan bersinergi dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan.
 - d) Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang obat dan makanan tahun 2021 yang memfasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan melakukan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut yang diberikan BBPOM di Semarang.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
Keberhasilan pencapaian kinerja keputusan/rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :
 - a) Pelatihan/bimbingan teknis kepada pelaku usaha/penanggung jawab sarana dengan tatap muka maupun secara online.
 - b) *Desk CAPA (Corrective Action and Preventive Action)* dengan pelaku usaha untuk mempercepat pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi.
 - c) Peningkatan kompetensi petugas agar selalu mengetahui peraturan dan kebijakan terkini di bidang obat dan makanan.
 - d) Penggunaan aplikasi SMART BPOM yang memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - e) Hambatan pelaksanaan program yaitu :
 - f) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota masih fokus pada penanganan wabah Covid-19 yaitu melaksanakan 3T (testing, tracing and treatment) dan vaksinasi sehingga belum maksimal menindaklanjuti keputusan/rekomendasi BBPOM di Semarang.
 - g) Penerapan PPKM berdampak pada beberapa pelaku usaha terutama skala UMKM, untuk sementara tidak aktif bahkan ada yang menutup usahanya karena permintaan pasar menurun.
 - **Rekomendasi perbaikan kinerja**
Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja diperlukan :
 - a) Konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut hasil inspeksi.

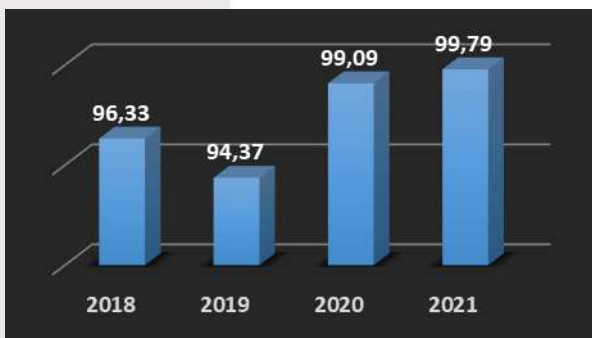


- b) Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait baik secara formal maupun informal.
- c) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi peraturan terkini, dan pendampingan penyusunan CAPA.

IK 4.3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

• **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Keputusan penilaian sertifikasi meliputi Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2, dan 3) dalam rangka pendaftaran produk OT, hasil pemeriksaan sarana produksi Suplemen Kesehatan dalam rangka pendaftaran produk, surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik, surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar, hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik, dan Pangan Olahan, surat rekomendasi hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen Kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, SK, dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi tepat waktu BBPOM Semarang tahun 2021 dengan target 99% dan realisasi 99,79% adalah sebesar 100,79% dengan kategori **Baik**.



Gambar 3. 22 Grafik Perbandingan Realisasi IK 4.3 Tahun 2018-2019

Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di BBPOM Semarang dari tahun 2018 mengalami sedikit penurunan. Hal ini disebabkan karena target kinerja dari tahun 2018 mengalami peningkatan target kinerja menjadi 99%.

• **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah**

Pada tahun 2021, jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan capaian sebesar 100,79% (kriteria baik). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Balai Besar POM di Semarang bahkan target jangka menengah nasional, capaian kinerja BBPOM di Semarang tahun 2021 sudah melebihi target.



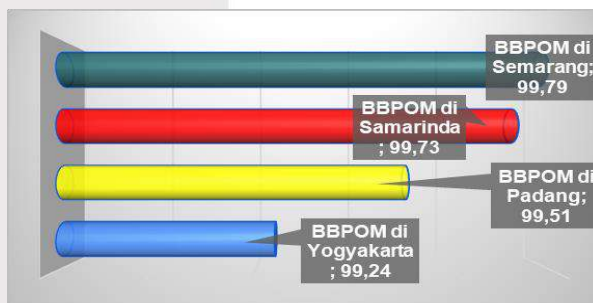


Tabel.... Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.3 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.3 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
99,79	99	99,2	99,4	99,6	88	91	94	97

• **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi BBPOM Klaster 2

Jika dilihat dari gambar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian BBPOM di Semarang untuk persentase keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu menempati urutan kedua jika dibandingkan dengan balai seklaster.

• **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang sehingga capaian kinerja melebihi dari target tahunan serta target jangka menengah bahkan target nasional antara lain adalah BBPOM di Semarang aktif melakukan kegiatan pelayanan berupa pendampingan pelaku usaha dalam rangka penyelesaian CAPA hingga pendampingan dalam pendaftaran produk.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- a) Melakukan *regulatory assistance* untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) serta pelayanan konsultasi *online* maupun *offline* dalam rangka sertifikasi CDOB
- b) Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB Bertahap, CPKB, Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik, Rekomendasi PSB, serta Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan dan BTP





- c) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
- d) Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa: bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya
- e) Pendampingan registrasi melalui *online* dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941

• **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- a) Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme Pegawai
- b) Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- c) Dengan adanya masa darurat COVID-19, tetap dilakukan upaya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang GMP dan registrasi melalui webinar (secara daring)
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pemenuhan timeline pelayanan sertifikasi sesuai dengan SOP

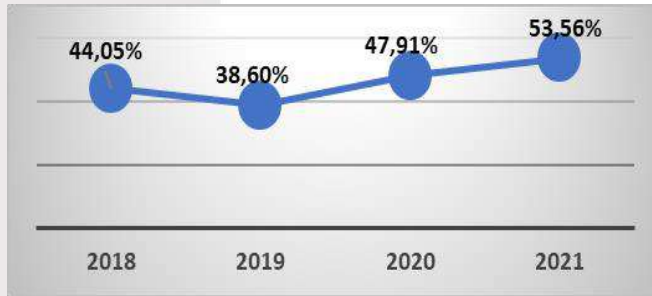
IK 4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa meliputi Industri Farmasi (IF), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), sarana produksi Suplemen Kesehatan, sarana produksi kosmetika (golongan A dan B), dan sarana produksi pangan (MD dan IRTP). Hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan adalah jika: 1) tidak ada temuan kritikal; 2) temuan mayor kurang dari lima; 3) nilai A dan B untuk produksi pangan MD; atau 4) level I dan II untuk produksi pangan IRTP.



- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Pada tahun 2021 persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 53,56% dari target 51% maka capaian kinerja yaitu 105,02% dengan kriteria BAIK.



Gambar 3. 24 Realisasi IK 4.4. tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018-2020, realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 menunjukkan tren kenaikan.

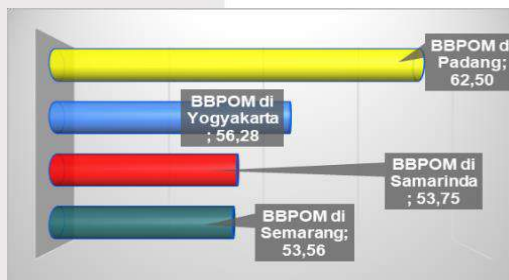
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.4 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang					Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
53,56	51	53	55	60	65	55	60	65	70

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 53,56% belum mencapai target jangka menengah (60%). Di tahun mendatang BBPOM di Semarang harus meningkatkan realisasi kinerja pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 53,56% belum mencapai target Nasional 2021 (55%) namun di antara Balai seklaster, capaian kinerja IK 4.4 BBPOM di Semarang lebih baik dibanding BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Yogyakarta.

Gambar 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM Klaster 2





- **Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh :

- a) Keberhasilan inspektur melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan, juga pendampingan bagi pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan atas temuan pemeriksaan, sehingga pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika dan Pangan Olahan yang Baik semakin meningkat.
- b) Kebijakan pemeriksaan sarana secara online pada masa pandemi Covid-19, terutama terhadap sarana produksi pangan MD dengan syarat riwayat pemeriksaan sebelumnya memenuhi ketentuan (nilai A/B) maka target sarana yang diperiksa adalah sarana yang telah menerapkan sistem keamanan pangan yang baik, sehingga hasil pemeriksaan sarana tersebut memberikan kontribusi terbesar memenuhi ketentuan.
- c) Terbitnya PerBPOM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika menjadi pedoman dalam penetapan kriteria hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dan kosmetika.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja hasil pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan memenuhi ketentuan antara lain :

- a) Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Badan POM memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, terutama skala industri pangan rumah tangga.
- b) Pendampingan dan pembinaan bagi UMKM obat tradisional melalui program Sipemandu dari Kedeputan 2 Badan POM sehingga semakin banyak UMKM obat tradisional yang mengajukan legalitas usaha dan sertifikasi CPOTB bertahap.
- c) Adanya pelatihan dan forum komunikasi inspektur pangan, CPOB, CPOTB, dan CPKB baik secara daring maupun luring sebagai sarana dalam meningkatkan kompetensi inspektur, menyamakan persepsi pada saat pemeriksaan dan penetapan tindak lanjut serta permasalahan di lapangan yang perlu dibahas di tingkat nasional sebagai masukan perbaikan standar/peraturan.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dilakukan melalui upaya :

- a) Pendampingan dan pembinaan sarana produksi obat dan makanan diprioritaskan kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah sehingga



pemahaman terhadap peraturan dan Cara Produksi yang Baik semakin meningkat.

- b) Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya, tindak lanjut yang diberikan, dan tindakan perbaikan/pencegahan yang telah dilakukan oleh sarana

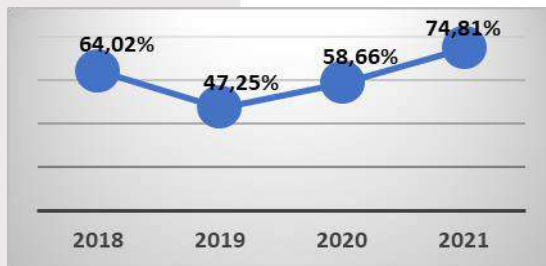
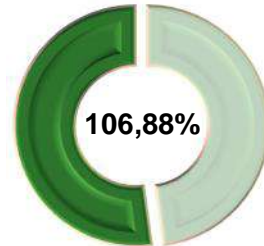
IK 4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Cakupan sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa meliputi :

- 1) Sarana distribusi obat (instalasi farmasi kabupaten/kota, pedagang besar farmasi)
- 2) Sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin)
- 3) Sarana distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan (depot/toko jamu, distributor obat tradisional, distributor suplemen kesehatan)
- 4) Sarana distribusi kosmetika (toko kosmetika, klinik kecantikan, counter kosmetika, distributor kosmetika)
- 5) Sarana distribusi pangan (toko, minimarket, hypermarket, distributor pangan)

• Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pada tahun 2021 persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 74,81% dari target 70% maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu 106,88% dengan kriteria BAIK.



Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018-2020, realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 menunjukkan tren kenaikan.

Gambar 3. 26 Grafik Realisasi IK 4.5. tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya





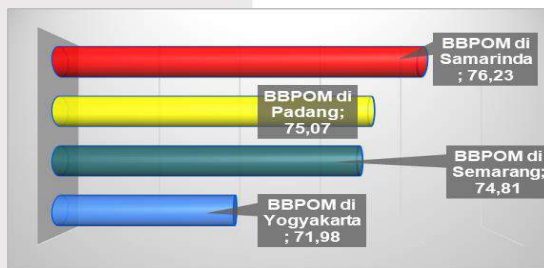
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.5 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
74,81	70	71	72	73	63	66	68	71

Realisasi kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 sebesar 74,81% telah melampaui target jangka menengah (73%).

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM Klaster 2

Realisasi kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 sebesar 74,81% telah melampaui target Nasional (63%). Di antara Balai seklaster, capaian kinerja IK 4.5 BBPOM di Semarang lebih baik dibanding BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Yogyakarta.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan capaian kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan kriteria BAIK didukung oleh antara lain :

- Keberhasilan inspektur melakukan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, juga pendampingan bagi pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan atas temuan pemeriksaan, sehingga pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan obat dan makanan semakin meningkat.
- Pada tahun 2021 target pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian diprioritaskan terhadap puskesmas dalam rangka pemantauan pengelolaan vaksin Covid-19, melalui pendampingan dan pembinaan maka sebagian besar hasil pemeriksaan puskesmas memenuhi ketentuan.
- BBPOM di Semarang berperan aktif sebagai anggota tim dan narasumber dalam penyusunan petunjuk teknis/pedoman operasional mekanisme pengawasan obat dan makanan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah.





- d) Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan dan organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia, Gabungan Pengusaha Farmasi, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, dll) sehingga pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian lebih optimal.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain :
 - a) Pertemuan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Loka POM di Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan sinergisme lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan.
 - b) Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan, karena pada masa pandemi Covid-19 maka dilakukan secara daring. Bimbingan teknis di bidang obat yang dilakukan antara lain Bimtek Pengelolaan Vaksin dan Bimtek Anti Microbial Resistance (AMR).
 - c) BBPOM di Semarang berperan aktif sebagai narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis kepada penanggung jawab/pelaku usaha di bidang obat dan makanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan sumber biaya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - d) BBPOM di Semarang secara berkala melakukan pendampingan dan monitoring evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran DAK Non Fisik tahun 2021 agar serapan dan output yang dihasilkan maksimal.
 - **Rekomendasi perbaikan kinerja**
Perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dilakukan melalui upaya :
 - a) Pendampingan dan pembinaan sarana distribusi obat dan makanan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha.
 - b) Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya, tindak lanjut yang diberikan, dan tindakan perbaikan/pencegahan yang telah dilakukan oleh sarana.
 - c) Peningkatan kompetensi inspektur/petugas melalui kegiatan pelatihan/sosialisasi/bimtek terkait peraturan dan pedoman terkini di bidang obat dan makanan.

IK.4.6 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik BBPOM di Semarang berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi :

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- 2) Profesionalitas SDM (18%)





- 3) Sarana Prasarana (15%)
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana penilaiannya dilakukan oleh Tim penilai Internal Pelayanan Publik Badan POM.

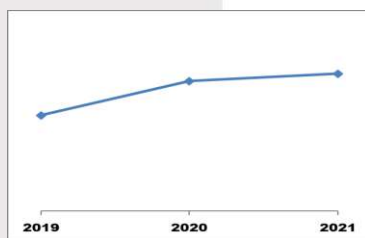
Pelaksanaan survei oleh Tim Penilai Internal Pelayanan Publik Badan POM menggunakan aplikasi Simolekdesi (Sistem Monitoring Elektronik dan Evaluasi Kinerja), sehingga responden dapat secara langsung mengisikan jawaban kuesioner yang terdiri dari 11 pertanyaan Unsur Pelayanan dan 6 pertanyaan terkait Anti Korupsi.

• **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Hasil Capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang adalah 4,37, berada diatas target dengan capaian 100,46% dengan kategori **BAIK**.



Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai tersebut termasuk dalam kategori **BAIK**. Indikator Kinerja IPP baru dimasukkan menjadi target penilaian pada tahun 2020, dengan menggunakan baseline capaian tahun 2019 sehingga belum ada target IPP pada tahun 2019, namun mulai tahun 2020 sampai dengan seterusnya sudah ditentukan targetnya.



Gambar 3. 28
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang dengan tahun sebelum-sebelumnya

Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, penilaian IPP BBPOM di Semarang terus mengalami peningkatan. Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa perbaikan pada setiap komponen/ aspek penilaian IPP yang dilakukan BBPOM di Semarang setiap tahunnya memberikan hasil respon yang positif bagi pengguna layanan publik.

Realisasi IPP tahun 2021 (4,37) telah melampaui target IPP tahun 2021 (4,35). Hal ini berarti bahwa BBPOM di Semarang harus mempertahankan serta terus meningkatkan capaiannya sehingga dapat memenuhi capaian target tahun berikutnya dengan kategori **BAIK**.





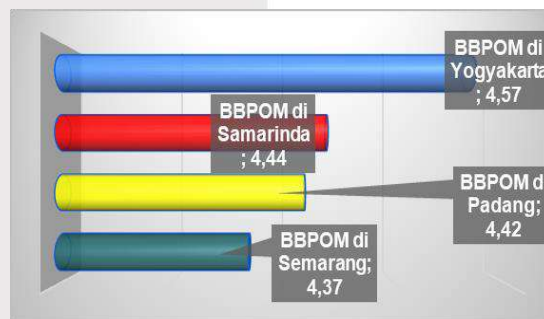
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 4.6 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4,37	4,35	4,45	4,51	4,55	4,16	4,28	4,39	4,51

Realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang tahun 2021 (4.37) belum melampaui target jangka menengah BBPOM di Semarang. BBPOM di Semarang akan terus meningkatkan capaiannya setiap tahun agar dapat memenuhi target jangka menengah BBPOM di Semarang maupun nasional.

- **Perbandingan realisasi kinerja BBPOM di Semarang dengan standar nasional dan balai seklaster**



Berdasarkan gambar Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks IPP klaster 2 BBPOM Semarang masuk pada posisi paling terendah. dan BBPOM Semarang belum dapat melampaui target nasional

Gambar 3. 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM Klaster 2

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang sebagai berikut:

- Penerapan Standar Pelayanan Publik dilakukan secara konsisten dan tepat waktu sesuai *time line* yang telah ditentukan untuk menjamin kepuasan konsumen.
- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang layanan yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, antara lain:
 - Ruang Pelayanan ber-AC;
 - Meja Pelayanan;
 - Komputer;
 - Fasilitas untuk penyandang disabilitas meliputi alur jalan khusus, meja layanan khusus difabel, dan penyediaan toilet khusus difabel.;
 - Toilet biasa;
 - Ruang Tunggu;
 - Maklumat Pelayanan
 - Kotak Saran;





- Informasi tarif elektronik;
 - Perangkat Survey Kepuasan Pelanggan online;
 - Air Minum;
 - *Charging Box*;
 - Sistem Antrian (manual : first in first out);
 - Perpustakaan/Buku Referensi;
 - Display Produk Obat dan Makanan yang ilegal/TMS
 - *Co working space*
 - *Free Wifi*
 - Fasilitas Difable (Kursi Roda & Tongkat Kaki Tiga);
 - Tempat Parkir Biasa (Mobil dan Motor);
 - Tempat Parkir Difable (Mobil dan Motor);
 - Mushola;
 - Kantin Kejujuran; dan
 - Ruang Laktasi.
 - Fasilitas bermain anak, sehingga anak-anak bisa bermain dengan lebih nyaman pada saat orang tua berkonsultasi.
 - c. Pemanfaatan media sosial BBPOM di Semarang untuk menyebarkan informasi obat dan makanan sesuai informasi terkini
 - d. Tersedianya anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung terlaksanakannya program inovasi.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Menjaring masukan dan informasi yang diperlukan sebagai langkah perbaikan terhadap layanan yang sudah ada dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik secara berkala.
 - Perbaikan sarana dan prasana untuk dapat memenuhi standar pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pemenuhan sarana yang telah dilakukan di tahun 2021 adalah pengadaan sarana melengkapi toilet dengan WC jongkok dan sarana cuci tangan.
 - Peletakan produk informasi di instansi lintas sektor seperti leaflet, brosur dan banner di DPMPSTP, Mal Pelayanan Publik, dan Perpustakaan daerah.
 - Penyebaran informasi obat dan makanan melalui media elektronik seperti radio dan media cetak seperti koran serta media luar ruang seperti baliho.
 - Penyusunan list gap kompetensi, sehingga petugas layanan yang masih belum memenuhi kompetensi bisa diprioritaskan untuk mendapatkan pelatihan.
 - Pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan publik.
 - Pembuatan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu Kegiatan Lakone Sekti (LAYanan KONSultasi Efektif Sertifikasi)





regisTrasi obat dan makanan) yang merupakan salah satu inovasi untuk mendekatkan BBPOM di Semarang hadir langsung ke Masyarakat yang berasal dari Kabupaten yang jauh dari kota Semarang (untuk periode tahun 2021, pelaksanaan kegiatan ini terbatas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen).

- Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui *Sinau on line* sareng (SOS) BBPOM di Semarang.
 - Inovasi SIULAN (Sekilas Info Untuk PeLANggan BPOM) yang dilakukan rutin sebulan sekali secara *live* di media sosial Instagram.
 - Inovasi “Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) yang memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat serta menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.
 - Pendampingan kepada pelaku usaha dan masyarakat secara langsung melalui kegiatan sosialisasi tentang obat dan makanan aman.
- **Rekomendasi perbaikan kinerja**
 - Membuat inovasi-inovasi baru terkait pelayanan publik yang lebih mendekatkan diri dengan masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya.
 - Menyusun rencana penggunaan anggaran guna pemenuhan maupun fasilitas layanan publik yang lebih baik dan berkesinambungan baik secara kualitas maupun kuantitas.

SK
5

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke-lima pada Tahun 2020 diukur dengan **4 (empat) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3. 26 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KELIMA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IK 5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,5	92,50	101,09%	Baik
IK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	41	45,00	109,76%	Baik
IK 5.3	Jumlah desa pangan aman	19	19,00	100,00%	Baik
IK 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10	10,00	100,00%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				102,71%	Baik

Sumber : Data Kinerja Triwulan IV yang di olah



NPS SK 5 sebesar 102,71%. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

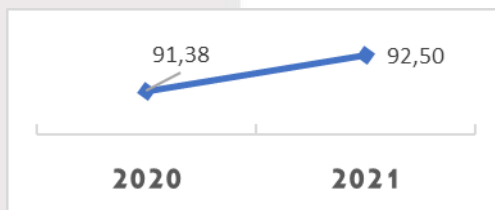
Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

IK 5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Semarang Tahun 2021 adalah 92,50. Dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 91,5, maka capaian Indeks RB BBPOM di Semarang sebesar 101,09% dengan kriteria Baik.

Pencapaian realisasi kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan



Gambar 3. 30 Perbandingan Realisasi IK 5.1 tahun 2020-2021



Makanan di Semarang pada periode tahun 2021 hanya dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 karena Indikator Kinerja ini adalah indikator baru yang ditetapkan periode tahun 2020 – 2024. Adapun realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 terjadi peningkatan dari 91,38 di tahun 2020 menjadi 92,50.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Realisasi Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat Dan Makanan terhadap target pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020, namun demikian nilai efektivitas KIE tahun 2021 ini telah melampaui target nasional (92).



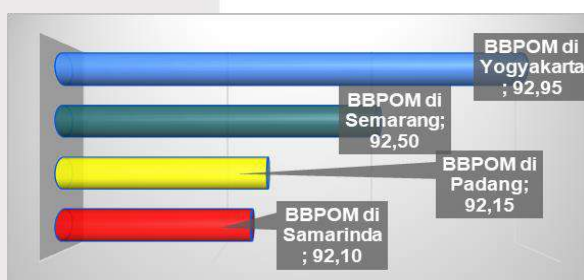


Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 5.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
92,5	91,5	93	94	95	90	93	95	97

Nilai indikator kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat Dan Makanan sebesar 92,50 jika dibandingkan dengan target akhir renstra masih dalam kategori **BAIK**, sehingga BBPOM di Semarang hanya perlu mempertahankan atau menalkan capaiannya. Berdasarkan hal ini tidak perlu dilakukan revisi terhadap target renstra.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat Dan Makanan BBPOM Klaster 2

Jika dibandingkan dengan BBPOM seklaster, maka nilai IK Tingkat Efektivitas KIE Obat Dan Makanan BBPOM di Semarang di urutan kedua setelah BBPOM di Yogyakarta.

Namun demikian nilai Indeks efektivitas KIE tersebut telah memenuhi target Nasional (92).

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang mendukung tercapainya tingkat efektivitas KIE, yaitu:

1. Penggunaan metode lain selain tatap muka dalam pelaksanaan kegiatan KIE yaitu dengan melakukan KIE secara daring.
2. Peningkatan frekuensi KIE melalui media sosial dengan setiap hari mengunggah berita-berita aktual dan juga melalui inovasi SIULAN berupa siaran langsung melalui Instagram Live.
3. Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.
4. Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
5. Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ *audience* yang akan mengikuti kegiatan, untuk memudahkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan.





- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah:

1. KIE melalui inovasi “Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.
2. Selain dilakukan kepada masyarakat umum, KIE juga dilakukan kepada kelompok masyarakat lain yang tingkat pemahaman terhadap konten informasinya lebih tinggi yaitu organisasi-organisasi masyarakat seperti Persatuan Dharma Wanita Provinsi Jawa Tengah, Persatuan Ibu Karyawan Dan Karyawati PT. PLN (Persero) UPT Semarang, Bhayangkari, Aisyiyah, Persatuan Istri Tentara (Persit), dan Salimah.
3. Penyebaran kuesioner evaluasi penyelenggaraan KIE, untuk mengetahui kualitas nara sumber, materi, panitia penyelenggara, dan sarana prasarana yang diharapkan oleh peserta.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Rekomendasi yang disampaikan pada pengukuran kinerja indikator ini adalah pada saat pelaksanaan KIE, disediakan alokasi waktu untuk pengisian kuesioner sehingga responden dapat mengisi kuesioner dengan seksama dan tepat waktu serta diberikan penjelasan tentang pengisian kuesioner tersebut.

IK 5.2 Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman

Intervensi keamanan PJAS merupakan program yang bertujuan untuk menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce serta sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA.

Jumlah Sekolah Dengan PJAS Aman merupakan jumlah sekolah baru yang



mendapatkan penghargaan Sertifikat Sekolah Dengan PJAS Aman atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman.

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS yang menjadi target tahun 2021 adalah 41 sekolah terdiri dari 23 sekolah di 7 Kabupaten/Kota (Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Demak, Banyumas, Pati, Grobogan, dan Blora) target tahun 2021 ditambah 18 sekolah di 3 Kabupaten/Kota (Kabupaten Brebes, Pemalang, dan Klaten) target tahun 2020 yang telah menerima Sertifikat Sekolah Dengan PJAS Aman Level. Pencapaian target 109,76% dengan kategori capaian BAIK.



Untuk mendapatkan Sertifikat Sekolah Dengan PJAS Aman pada tahun 2021 ini, sekolah-sekolah tersebut harus melewati 7 tahapan yaitu :

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS
2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah
3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan
6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman
7. Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Usia Sekolah (PJAS)

Sekolah yang menerima Sertifikat Sekolah Dengan PJAS Aman diukur dengan indikator adanya :

1. SK Tim Keamanan Pangan Sekolah
2. Surat Pernyataan Komitmen Kepala Sekolah untuk menjaga keamanan pangan jajanan anak usia sekolah
3. Dokumen Rencana Aksi Program Keamanan Pangan Sekolah
4. Dokumentasi sosialisasi keamanan pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada siswa dan orang tua siswa
5. Nilai pre test dan post test siswa dan Orangtua siswa/komite sekolah setelah diberikan sosialisasi keamanan pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah
6. Dokumentasi pelaksanaan inovasi intervensi keamanan pangan lain yang dilakukan komunitas sekolah, jika ada
7. Rekap nilai Pengetahuan, sikap dan perilaku siswa dan kader keamanan pangan sekolah sebelum dan sesudah intervensi.



Dari sekolah-sekolah yang melaksanakan indikator tersebut diatas diperoleh 45 sekolah layak menerima Sertifikat Sekolah Dengan PJAS Aman, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Jumlah Sekolah Dengan PJAS Aman menjadi 109,76%.

Berbeda dengan capaian kinerja tahun 2020 dalam kategori **SANGAT BAIK**, capaian pada tahun 2021 meskipun dalam kategori **BAIK** tetapi realisasinya melebihi target yang telah ditentukan.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

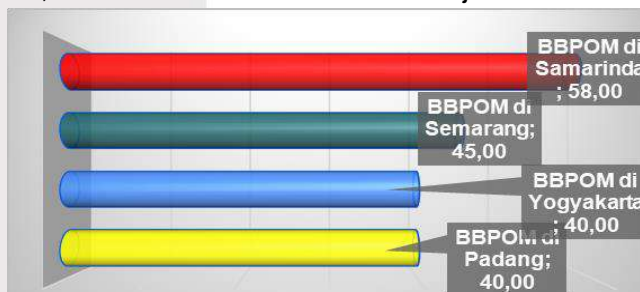
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 5.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
45	41	79	119	161	1330	2010	2700	3400

Realisasi Kinerja tahun 2021 untuk Indikator Kinerja Jumlah Sekolah Dengan PJAS Aman tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena realisasi indikator kinerja ini merupakan realisasi kumulatif.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**

Jika dibandingkan dengan BBPOM klaster 2 dimana target awal BBPOM di Yogyakarta, Padang, Samarinda adalah 40 dan BBPOM di Semarang adalah 41, maka realisasi Indikator Kinerja Jumlah Sekolah Dengan PJAS Aman



Gambar 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Sekolah Dengan PJAS Aman BBPOM Klaster 2

BBPOM di Semarang dengan BBPOM yang lain lebih tinggi. Meskipun BBPOM di Samarinda realisasinya lebih tinggi tetapi capaian tidak dapat disimpulkan.

Realisasi Kinerja tahun 2021 untuk Jumlah desa pangan ama Jumlah Sekolah Dengan PJAS

Aman n tidak dapat dibandingkan dengan Target Nasional karena realisasi indikator kinerja ini merupakan realisasi kumulatif.





- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang mendukung tercapainya kriteria baik (109,76%) adalah:

1. Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen lintas sektor terkait yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini
2. Sekolah yang diintervensi memiliki komitmen yang besar dalam mengimpementasikan kegiatan ini
3. Sekolah memiliki kader keamanan pangan sekolah yang aktif
4. Kader Keamanan Pangan Sekolah melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
5. Sekolah mempunyai Dokumen Rencana Aksi Keamanan Pangan Sekolah
6. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan yang dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dan mempermudah dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Penyegaran pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah melalui tahapan pengawalan, sehingga mampu membuat Kepala Sekolah/Guru dan Pengelola Kantin sebagai kader keamanan pangan menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah, dan mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan pada komunitas sekolah.
2. Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan berupa buku, poster, permainan edukasi, dan flashdisk berisi materi-materi dan video tentang keamanan pangan yang dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.
3. Bersinergi dengan Kegiatan yang merupakan inovasi dari BBPOM Semarang yaitu kegiatan Layanan Laboratorium Melayani Sekolah dan Masyarakat (Layla Mesem) yang juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan komunitas sekolah pada keamanan pangan dan mendekatkan layanan laboratorium BBPOM di Semarang pada masyarakat, sehingga kegiatan dapat menunjang keberhasilan indikator ini.





- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Tahapan kegiatan intervensi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi tahun 2022.

IK.5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Pada program Desa Pangan Aman, dilakukan gerakan keamanan pangan desa pada beberapa desa. Adapun desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Keberhasilan program desa pangan aman diukur dari beberapa output dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Desa memiliki Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- b. Desa melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa yang dimiliki,
- c. Desa mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan program desa pangan aman dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- 1). Advokasi Lintas Sektor
Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor/pemangku kepentingan di daerah.
- 2). Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa
Pelatihan dilakukan terhadap kader yang telah dipilih oleh pihak desa sebagai ujung tombak yang akan menyebarkan materi dan praktek keamanan pangan di desanya masing-masing. Untuk masing-masing minimal dibentuk 15 kader yang terdiri dari 5 kader dari ibu PKK, 5 kader dari karang taruna dan 5 kader dari guru yang mengajar sekolah dasar di desa intervensi.
- 3). Bimtek Komunitas Desa dan Intensifikasi Keamanan Pangan
Bimbingan teknis terhadap komunitas yang ada di desa masing-masing, dan dilakukan oleh kader yang sudah terlatih. Tiap desa terdiri dari minimal 50 komunitas yang merupakan perwakilan dari ibu PKK, pelaku usaha ritel, pelaku usaha IRTP, pedagang kreatif lapangan, komunitas sekolah dan komunitas remaja. Bersamaan dengan kegiatan bimtek, juga dilakukan sampling dan uji produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dalam kegiatan intensifikasi keamanan pangan desa.
- 4). Fasilitasi Keamanan Pangan Desa





Kegiatan pemantauan praktek keamanan pangan desa yang dilakukan oleh kader keamanan pangan desa dengan berkunjung ke rumah/sarana tempat komunitas berada untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek keamanan pangan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

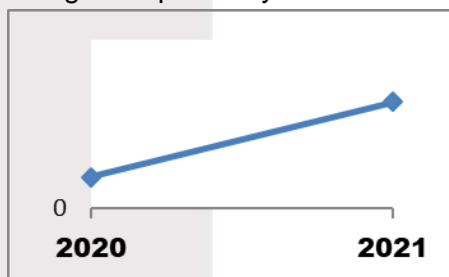
- 5). Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monev dilakukan untuk mengetahui efektifitas intervensi yang telah dilakukan, sekaligus untuk mengetahui rencana kerja selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak desa terkait dengan keamanan pangan.
- 6). Pengawasan
Pengawasan dilakukan terhadap desa intervensi tahun sebelumnya untuk mengetahui program kerja mandiri yang telah dilaksanakan.
- 7). Lomba Desa
Lomba desa dilaksanakan untuk memotivasi desa yang telah menerapkan program keamanan pangan secara mandiri dengan pemberian *award* atau penghargaan.

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Target jumlah desa tahun 2021 sebanyak 19 desa meliputi 6 desa intervensi tahun 2020 dan 13 desa intervensi tahun 2021. Pada tahun 2020, masih terdapat 1 desa yaitu Desa Banyumudal yang tidak selesai diintervensi pada tahun 2020 (hanya sampai tahap pelatihan kader) dikarenakan desa tersebut menutup akses masuk warga dari luar dan menghentikan kegiatan dengan alasan ada warga yang meninggal akibat Covid-19. Tahapan program Desa Pangan Aman yang belum dilaksanakan di desa tersebut dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun 2021 dimana kegiatannya meliputi pelaksanaan bimbingan teknis komunitas dan fasilitasi serta monev. Semua tahapan program Desa Pangan Aman terhadap desa yang diintervensi pada akhirnya dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2021. Dari pelaksanaan program Desa Pangan Aman tahun 2021 diperoleh hasil 17 desa dan 2 kelurahan di 10 Kabupaten telah selesai diintervensi, totalnya 19 desa.



Dengan terpenuhinya 19 desa intervensi desa pangan aman maka dapat disimpulkan bahwa prosentase capaian jumlah desa pangan aman pada tahun 2021 sebesar 100,00 % dengan kriteria **BAIK**.



Gambar 3. 33 Perbandingan Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian indikator kinerja jumlah desa pangan aman tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2020, masih dalam kategori **BAIK**



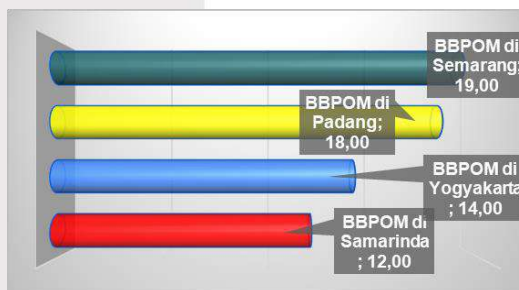
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 5.3 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
2021	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
19	19	28	37	47	427	648	874	1105

Berdasarkan tabel diatas, diketahui target jumlah desa pangan aman setiap tahunnya meningkat. Realisasi Kinerja tahun 2021 untuk Jumlah desa pangan aman tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dan realisasi indikator kinerja ini merupakan realisasi kumulatif. Tetapi BBPOM di Semarang harus tetap mempertahankan dan selalu meningkatkan kinerjanya dalam mendukung program desa pangan aman agar target tercapai dengan baik.

- **Perbandingan realisasi kinerja BBPOM di Semarang dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM Klaster 2

Realisasi indikator kinerja jumlah desa pangan aman yang dicapai oleh BBPOM di Semarang sebanding dengan BBPOM yang lain jika dilihat dari target awal masing BBPOM dalam kluster 2. Realisasi Kinerja tahun 2021 untuk Jumlah desa pangan aman tidak dapat dibandingkan dengan Target Nasional karena realisasi indikator kinerja ini merupakan realisasi kumulatif.

- **Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian Desa Pangan Aman**
 - a. Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait dan desa berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen yang tinggi dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan kegiatan ini.
 - b. Metode sosialisasi pelaksanaan program Desa Pangan Aman dilakukan dengan 2 cara yaitu secara luring dan daring. Untuk luring dilakukan dengan metode tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Untuk daring dilakukan melalui *zoom meeting*.
 - c. Desa memiliki kader keamanan pangan yang aktif
 - d. Desa mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri baik dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.



- e. Adanya sinergitas antara program Desa Pangan Aman dengan kegiatan inovasi Pangan Unggulan Sehat, Keamanannya Terjaga dan Bergizi di salah satu Kota/Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan program Desa Pangan Aman.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
 - a. Penyegaran pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah melalui tahapan pengawalan
 - b. Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan berupa buku, poster, permainan edukasi, flipchart dan flashdisk berisi materi-materi dan video tentang keamanan pangan yang dapat digunakan oleh kader keamanan pangan desa sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan desa
- **Rekomendasi perbaikan kinerja**
 - a. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan lintas sektor terkait dan dengan Tim Keamanan Pangan Desa, agar tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai yang dijadwalkan.
 - b. Tahapan kegiatan desa pangan aman selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi covid-19.
 - c. Stikerisasi “Tidak Menggunakan Bahan Kimia Berbahaya” terhadap tempat pengolahan pangan (IRTP dan Rumah Makan).

IK.5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Tahun 2020, program pasar aman dari bahan berbahaya direvitalisasi menjadi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang melibatkan stakeholder antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar. Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan pasar yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pemajangan dan penyerahan, juga untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Pada tahun 2021 telah dilakukan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Advokasi Lintas Sektor



- Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor /pemangku kepentingan di daerah.
- 2) **Survey Pasar**
Survei dan identifikasi kondisi pasar, dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dibantu pengelola pasar.
 - 3) **Bimbingan Teknis Petugas Pasar**
Pelatihan terhadap petugas pasar agar dapat mendeteksi pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, dapat melakukan pengambilan sampel, dan dapat melakukan pengujian dengan menggunakan rapid tes kit uji bahan berbahaya (formalin, boraks, methanyl yellow, rhodamin B).
 - 4) **Monitoring dan Evaluasi tahap I dan tahap II**
Pelaksanaan sampling dan pengujian kimia yang dilakukan oleh petugas pasar dan pengujian mikrobiologi yang dilakukan oleh petugas BBPOM Di Semarang dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan. Hasil uji diinformasikan kepada pedagang sekaligus dilakukan pembinaan dan dilaporkan ke Badan POM.
 - 5) **Penyuluhan pedagang pasar**
Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan kepada pedagang pasar tentang Bahan Berbahaya dalam Pangan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang.
 - 6) **Kampanye Pasar**
Kampanye yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dalam bentuk pameran, pemberian leaflet/brosur, dan pemberian informasi melalui radio pasar.
 - 7) **Lomba Pasar**
Untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas, partisipasi komunitas pasar dalam mengambil peran lebih besar demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas serta memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, maka diselenggarakan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Indikator keluaran dari program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah terlaksananya program kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan total target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang harus diintervensi oleh BBPOM di Semarang.





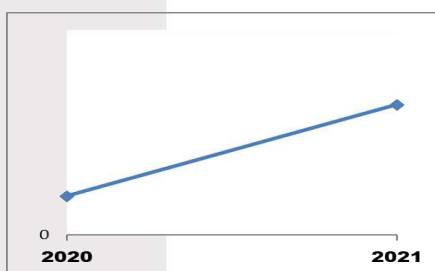
- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja taun-tahun sebelumnya**

Realisasi program pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 10 pasar terdiri dari 7 pasar yang diintervensi tahun 2021 dan 3 pasar yang diintervensi tahun 2020, sehingga realisasi terhadap target terpenuhi seluruhnya yaitu sejumlah 10 pasar dengan capaian sebesar 100,00 % dengan kriteria **BAIK**.



Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas baru dapat dihitung pada tahun 2020 karena targetnya baru ditentukan pada tahun 2020, sehingga capaiannya juga baru bisa diukur pada tahun 2020.

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2021 adalah akumulasi dengan realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2020. Pada tahun 2021, target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas untuk BBPOM di Semarang ditentukan sebanyak 10 pasar (3 pasar di tahun 2020 dan 7 pasar di tahun 2021), dan realisasinya tercapai 10 pasar, sehingga prosentase capaiannya sebesar 100%.



Gambar 3. 35 Perbandingan Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 5.4 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
10	10	16	22	28	165	225	350	450

Berdasarkan tabel diatas, diketahui target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas setiap tahunnya meningkat. Realisasi Kinerja tahun 2021 untuk Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena realisasi indikator kinerja ini merupakan realisasi kumulatif. Tetapi BBPOM di Semarang harus tetap mempertahankan selalu meningkatkan kinerjanya dalam mendukung program pasar pangan berbasis komunitas agar target tercapai dengan baik.





- **Perbandingan realisasi kinerja BBPOM di Semarang dengan standar nasional dan balai seklaster**

Realisasi program pasar pangan aman berbasis komunitas yang dicapai BBPOM di klaster 2 ini seluruhnya memenuhi target (100%) dilihat dari target awal masing-masing BBPOM.



Realisasi Kinerja tahun 2021 untuk Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tidak dapat dibandingkan dengan Target Nasional karena realisasi indikator kinerja ini merupakan realisasi kumulatif.

Gambar 3. 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman BBPOM Klaster 2

- **Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian pasar pangan aman berbasis komunitas**

- a. Peningkatan pengetahuan petugas pasar tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya setelah mengikuti bimtek.
- b. Petugas pasar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya secara mandiri dan melaporkan ke BBPOM Di Semarang.
- c. Partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan CRPB di pasar rakyat
- d. Dukungan serta komitmen penuh dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan program pasar pangan aman berbasis komunitas
- e. Pedagang pasar yang sudah mendapatkan ilmu keamanan pangan dan CRPB memahami dan menerapkan pengetahuannya tersebut dalam melakukan aktivitas perdagangan di pasar.
- f. Pengunjung pasar yang sudah terpapar pengetahuan tentang keamanan pangan melalui kampanye yang dilakukan oleh petugas BBPOM Di Semarang menjadi lebih cerdas dalam memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Bersinergi dengan Kegiatan yang merupakan inovasi dari BBPOM Semarang yaitu kegiatan Layanan Laboratorium Melayani Sekolah dan Masyarakat (Layla Mesem) yang juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan melalui kampanye kepada pengunjung pasar dan sampling serta pengujian menggunakan rapid test kit terhadap pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Sehingga masyarakat mampu memilih pangan yang aman dari bahan





berbahaya untuk dikonsumsi. Selain itu juga bertujuan untuk mendekatkan layanan laboratorium BBPOM di Semarang pada masyarakat sehingga kegiatan dapat menunjang keberhasilan indikator ini.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Adapun upaya tindak lanjut yang akan dilakukan BBPOM di Semarang dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian diatas adalah:

- Melakukan pendampingan dan pengawalan kepada petugas pasar yang melakukan sampling dan pengujian terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.
- Memberikan masukan kepada pengelola pasar untuk memberikan pembinaan kepada pedagang pasar yang masih menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya
- Berkomunikasi kepada pengelola pasar untuk mendisplay pangan yang mengandung bahan berbahaya di tempat strategis di lingkungan pasar agar dapat dilihat oleh pedagang dan pengunjung pasar.

SK
6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk Dan Pengujian Obat Dan Makanan Di BBPOM Di Semarang

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke-enam pada Tahun 2021 diukur dengan 2 (**dua**) **indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 31 **PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KEENAM**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00%	Baik
IK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				100,00%	Baik

Sumber : Data Kinerja Triwulan IV yang di olah

NPS SK 6 **sebesar 100%** menggambarkan bahwa **efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat Dan Makanan di BBPOM di Semarang telah tercapai** dengan kategori **BAIK**.





IK 6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Target indikator kinerja ini untuk tahun 2021 adalah 100,00% dan realisasinya sebesar 100 % serta capaian kinerja 100% dengan kriteria baik. Realisasi Tahun 2020 sama ini menandakan BBPOM di Semarang mempertahankan dan mematuhi standar pemeriksaan dan pengujian sampel. Tetapi realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan sebelumnya karena memiliki definisi operasional indikator yang berbeda.



Indikator kinerja ini tersusun dari 2 komponen yaitu:

- Perbandingan jumlah sampel obat, OT, SK, dan kosmetik yang diperiksa sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun.
Definisi pemeriksaan sesuai ketentuan meliputi pemeriksaan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.
 - Perbandingan jumlah sampel obat, OT, SK, dan kosmetik yang diuji sesuai standar dengan jumlah target sampel setahun.
Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pengujian parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam pedoman sampling.
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 6.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

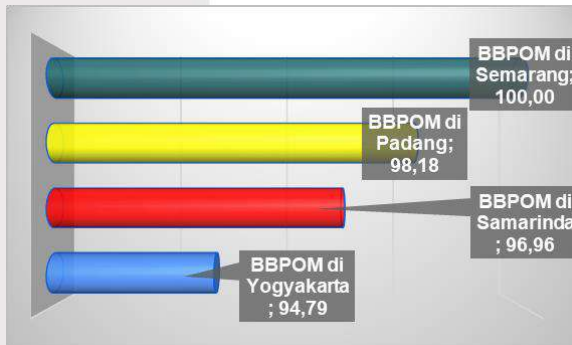
Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
100	100	100	100	100	85	100	100	100

Realisasi kinerja tahun 2021 (100%) telah memcampai target RENSTRA tahun 2022 -2024 (100,00%), namun demikian BBPOM di Semarang akan terus meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan pengujian sampel Obat sesuai standar.





- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM Klaster 2

Berdasarkan grafik di samping terlihat bahwa realisasi kinerja sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 tertinggi adalah BBPOM di Semarang sedangkan yang realisasinya terendah adalah BBPOM di Yogyakarta namun realisasi keempat balai seklaster masih di atas target nasional yang telah ditetapkan 85,00%.

Parameter uji kritis adalah parameter uji yang ditetapkan berdasarkan kajian risiko keamanan dan mutu yang dapat berpengaruh langsung pada kesehatan dengan mempertimbangkan bentuk sediaan dan sifat kimia fisika zat aktif. Parameter uji kritis telah ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat dan Makanan tahun 2021

TABEL 21 JUMLAH SAMPEL YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Jenis Sampel	Target sampel	Jumlah Sampel yang diperiksa sesuai standar	Jumlah Sampel Yang diuji sesuai standar
obat & Napza	656	663	663
OT	509	523	515
SK	180	181	180
Kosmetika	951	951	946
Jumlah	2296	2318	2304

Pada tahun 2021 telah diperiksa sampel obat, OT, SK, dan kosmetik sebanyak 2318 melebihi target yaitu 2296 sampel, dan telah diuji sesuai standar sebanyak

2304. Empat belas (14) sampel tidak diuji karena merupakan sampel TIE.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan BBPOM di Semarang adalah:

1. Personil pemeriksaan dan pengujian dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan, standar pemeriksaan meliputi pemeriksaan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label serta standar pengujian





adalah menguji sampel sesuai parameter uji kritis yang telah ditetapkan dalam Pedoman Sampling.

2. Kegiatan pengembangan kompetensi personil pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan teknis dan bimbingan teknis yang secara kontinyu baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.
3. Aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian melalui uji profisiensi, kolaborasi, melaksanakan verifikasi metode Analisa dan kalibrasi alat-alat laboratorium.
4. Konsisten menerapkan Sistem Mutu dengan diperolehnya sertifikat ISO /IEC 17025:2017 pada bulan Januari 2021.
5. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sehingga jika terjadi kendala bisa segera dicarikan solusi untuk perbaikan di bulan selanjutnya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Pengadaan reagensia, media mikrobiologi, peralatan dan suku cadang yang dijadwalkan di awal tahun dan tepat waktu serta ketersediaan baku pembanding yang selalu dimonitor sehingga pengujian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai timeline yang telah ditetapkan
2. Program kalibrasi alat laboratorium yang dilaksanakan secara terjadwal setiap tahun oleh PPPOMN dan pihak eksternal, yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran yang valid sesuai dengan standar nasional dan internasional.
3. Penggunaan media online untuk melakukan pengecekan kesesuaian penandaan sampel dengan penandaan yang telah disetujui oleh Badan POM, seperti sharing folder dan asrot.pom.go.id. sehingga hasil pemeriksaan terhadap parameter penandaan menjadi lebih tepat/akurat.
4. Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Tindak lanjut untuk penyempurnaan kinerja berdasarkan evaluasi sebelumnya telah dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan dan memelihara konsistensi penerapan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2005 dan ISO 9001:2015 serta selalu meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara kontinyu.
2. Peningkatan kompetensi personil terutama terkait pemeriksaan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.



IK 6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Target indikator kinerja ini untuk tahun 2021 adalah 100,00% dan realisasinya sebesar 100%, dengan capaian kinerja 100% kriteria baik. Dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020 yaitu 111,11% mengalami sedikit penurunan namun tetap melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan sebelumnya karena memiliki definisi operasional indikator yang berbeda.

Pada sampel makanan, indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu:

1. Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun,
Definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.
2. Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pengujian parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam pedoman sampling.



- **Perbandingan realisasi kinerja dan tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 6.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
100	100	100	100	100	77	100	100	100

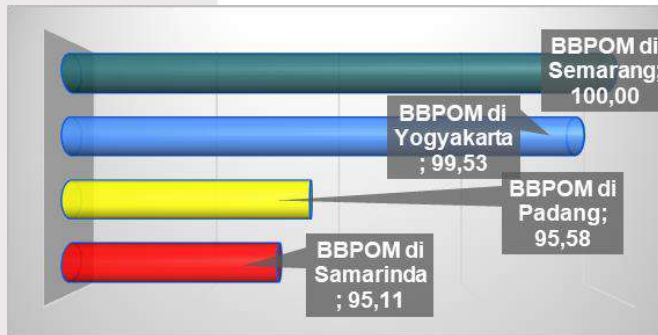
Realisasi tahun 2021 (100%) telah melampaui target RENSTRA tahun 2022 -2024 (100,00%), namun demikian BBPOM di Semarang akan terus meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan pengujian sampel makanan yang sesuai standar.





- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**

Pada grafik di samping terlihat capaian realisasi kinerja BBPOM di Semarang



Gambar 3. 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM Klaster 2

apabila dibandingkan BBPOM seklaster, menempati urutan tertinggi yaitu 100% dan terendah adalah BBPOM di Samarinda, namun semua BBPOM dalam kluster ini memperoleh capaian melebihi standar nasional yang telah ditetapkan sebesar 77,00%.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain disebabkan oleh:

1. Kedisiplinan semua pihak dalam menepati ketentuan dan standar yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan pengawasan yang melekat dari atasan sehingga jika ada kendala segera bisa dicari solusinya.
2. Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis secara kontinyu secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh PPPOMN maupun provider pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil dalam pengujian sampel pangan
3. Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi, kolaborasi metode, melaksanakan verifikasi metode Analisa dan kalibrasi alat-alat laboratorium.
4. Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu dengan diperolehnya sertifikat ISO /IEC 17025:2017 pada bulan Januari 2021.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Pengadaan reagensia, media mikrobiologi, peralatan dan suku cadang yang dijadwalkan di awal tahun dan tepat waktu serta ketersediaan baku pembanding yang selalu dimonitor sehingga pengujian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai timeline yang telah ditetapkan





2. Program kalibrasi alat di laboratorium pangan yang dilaksanakan secara terjadwal setiap tahun oleh PPPOMN dan pihak eksternal, yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran yang valid sesuai dengan standar nasional dan internasional.
3. Penggunaan media online (sharing folder) untuk melakukan pengecekan kesesuaian penandaan sampel dengan penandaan yang telah disetujui oleh Badan POM, sehingga hasil pemeriksaan terhadap parameter penandaan menjadi lebih tepat/akurat.
4. Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

● **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, rekomendasi untuk perbaikan kinerja telah dilakukan yaitu:

1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian dan konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2005 dan ISO 9001:2015.
2. Peningkatan kompetensi personil terutama terkait pemeriksaan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

SK
7

Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang

Pencapaian Sasaran Kegiatan ketujuh pada Tahun 2020 diukur dengan **1 (satu) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 34 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KETUJUH

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,5	81,40	112,28%	Sangat Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				112,28%	Sangat Baik

Sumber : Data Kinerja Triwulan IV yang di olah

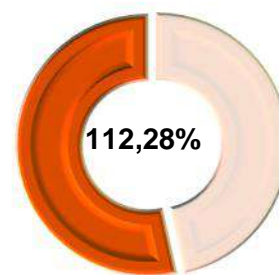
NPS SK 7 **sebesar 112,28%** menggambarkan bahwa **efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang meningkat** dengan kategori **SANGAT BAIK**.



IK 7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun- tahun sebelumnya**

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang di tahun 2021 merupakan indikator yang harus dicapai oleh BBPOM di Semarang. Target persentase keberhasilan penindakan di BBPOM di Semarang pada tahun 2021 adalah sebesar 72,50 %. Realisasi persentase keberhasilan penindakan BBPOM di Semarang tahun 2021 adalah 81,40 % dengan capaian 112,28% dan kriteria Sangat Baik.



Tahapan Penindakan yang dilakukan dalam perhitungan capaian keberhasilan penindakan, antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 7.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
81,4	72,5	75	78	80	69	73	77	81

Sasaran strategis Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Semarang yang ditetapkan tahun 2021 menggunakan parameter indikator yang sama dengan tahun 2020 yaitu meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Tetapi berbeda dengan tahun 2019 yang dimana sasaran strategis tahun 2019 adalah meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan dengan indikator data presentasi perkara yang diselesaikan hingga tahap II,

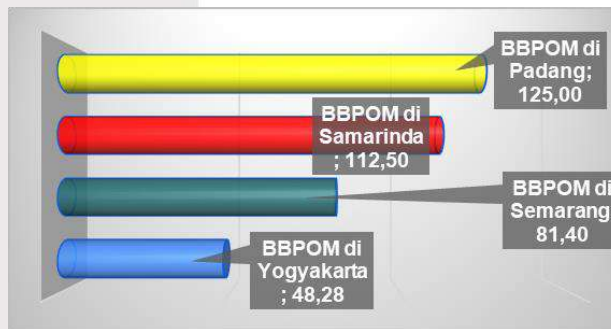


sehingga realisasi dan capaian tahun 2021 hanya dapat diperbandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2020

Realisasi Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Semarang tahun 2021 adalah 81,40 % melampaui target tahun 2022 (75,00 %) tahun 2023 (78%), maupun tahun 2024 (80%). Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Semarang akan terus berusaha meningkatkan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan menyarankan untuk menaikan target di tahun 2022.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan Balai seklaster**

Realisasi keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di



wilayah Kerja BBPOM di Semarang dibandingkan BBPOM Klaster 2 lain, menempati urutan ketiga setelah BBPOM di Padang dan BBPOM di Samarinda. Apabila dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan BBPOM di Semarang telah melampaui target nasionak 2024.

Gambar 3. 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan BBPOM Klaster 2

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Terdapat beberapa kendala/hambatan yang ditemui selama melakukan kegiatan penindakan di tahun 2020 yang berpengaruh kepada capaian kinerja, antara lain:

1. Pandemi Covid-19, sehingga proses pemberkasan dan koordinasi dengan lintas sektor menjadi tertunda, sehingga berdampak pada penanganan kasus menjadi *Carry Over*.
2. Tersangka melakukan upaya hukum gugatan Pra Peradilan terhadap BBPOM di Semarang dimana hal tersebut mengakibatkan bertambah lamanya proses pemberkasan sehingga kasus tidak bisa diselesaikan hingga akhir tahun berjalan (*carry over*)
3. Budaya kerja dari lintas sektor yang berbeda dengan budaya kerja Badan POM membuat pencapaian target kinerja Balai menjadi tidak pasti (bisa lebih cepat atau lebih lambat dari target).
4. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan berubahnya pola budaya pada masyarakat, salah satunya adalah pergeseran budaya jual beli yang tidak lagi mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertatap





muka atau bertemu langsung, termasuk kegiatan distribusi (jual/beli) obat dan makanan Tanpa Izin Edar, untuk melakukan jual beli atau kegiatan distribusi di masa sekarang ini para pihak bisa memanfaatkan beberapa aplikasi *e-commerce* yang sudah menjamur di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kegiatan distribusi obat dan makanan ilegal semakin sulit untuk terlacak, sehingga perlu adanya *upgrade* SDM di bidang IT dan juga *upgrade* sarana dan prasarana.

5. Kewenangan PPNS terkait penangkapan dan penahanan yang terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menaunginya, seperti saksi yang tidak menghadiri panggilan untuk BAP, sudah diterbitkan Daftar Pencarian Orang tetapi tidak diketahui keberadaannya sementara PPNS tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pada tahun 2021, Kelompok Substansi penindakan BBPOM di Semarang masih menyelesaikan berkas perkara yang belum selesai (*Carry Over*) pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebanyak 1 perkara dengan status tersangka DPO (Daftar Pencarian Orang) dan tahun 2020 sebanyak 1 perkara dengan status perkara sudah P21 (berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum), namun Jaksa Penuntut Umum mensyaratkan agar tersangka dititipkan di Penjara, Kondisi pandemi membuat Kemenkumham membatasi jumlah penghuni penjara, sehingga dengan demikian, proses Serah Tahap II menjadi mundur, menyesuaikan kondisi okupansi / tingkat isian daripada penjara . Sehingga total perkara *carry over* yang ditangani tahun 2021 oleh BBPOM Semarang sebanyak 2 perkara.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

{(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Tahap penyelesaian perkara di tahun 2020 sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan capaian keberhasilan penindakan, pada tahun 2021 BBPOM di Semarang mendapatkan nilai capaian kinerja sebesar 81,40%



sedangkan target yang harus dicapai yaitu sebesar 72,50%. Sehingga persentase pencapaian kinerja BBPOM di Semarang apabila dibandingkan dengan target perkara adalah sebesar 112,28%.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Kelompok Substansi Penindakan akan lebih Meningkatkan koordinasi informal maupun informal dengan lintas sektor agar keseluruhan proses kerja Penindakan dapat berjalan lebih lancar dan lebih cepat dan memaksimalkan peran serta *Criminal justice System* dalam rangka penegakan hukum pelanggaran peraturan perundangan yang diampu oleh PPNS BBPOM di Semarang

Untuk menghadapi perkembangan teknologi yang berimbas pada pergeseran budaya masyarakat Indonesia yang cenderung melakukan jual beli melalui media sosial, e commerce dll, petugas Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Semarang selalu meningkatkan kapabilitas dan kemampuan di bidang IT untuk mencegah terjadinya pelanggaran distribusi obat dan makanan secara daring/ online.

3.2.3 CAPAIAN LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

SK
8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Bbpom Di Semarang Yang Optimal

Pencapaian Sasaran Kegiatan kedelapan pada Tahun 2021 diukur dengan 2 (**dua**) **indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 36 **PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KEDELAPAN**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
IK 8.1	Indeks RB BBPOM di Semarang	86	85,97	99,97%	Baik
IK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	78,5	79,16	100,84%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				100,40%	Baik

Sumber: Data Kinerja Triwulan IV yang di olah

NPS SK 8 sebesar **100,40%** menggambarkan bahwa **BBPOM di Semarang telah mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal** dengan kategori **BAIK**.



IK 8.1 Indeks RB BBPOM di Semarang

Indeks RB merupakan salah satu indikator pada Sasaran Kegiatan 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal. Bertujuan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dari waktu ke waktu.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja Menuju Predikat WBK/ WBBM adalah sebagai berikut:

Komponen pengungkit sebesar 60%

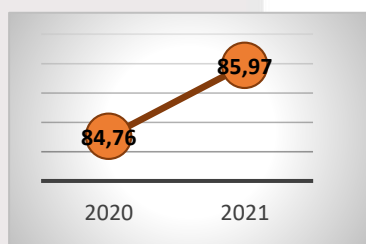
1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Komponen hasil sebesar 40%:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

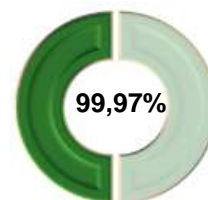
• Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Utama selaku Tim



Gambar 3. 40
Perbandingan Realisasi
Indeks RB Tahun 2020-
2021

Penilai Internal (TPI), Indeks RB BBPOM di Semarang Tahun 2021 adalah 85,97. Dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 86,



maka capaian Indeks RB BBPOM di Semarang sebesar 99,97% dengan kriteria Baik. Pada tahun 2020, BBPOM di Semarang berhasil meraih **Predikat WBK** dan diharapkan pada tahun 2022 dapat meraih Predikat WBBM dari Kementerian PAN dan RB.





Pencapaian realisasi kinerja Indeks RB BBPOM di Semarang pada periode tahun 2021 hanya dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 karena Indikator Kinerja ini adalah indikator baru yang ditetapkan periode tahun 2020 – 2024. Adapun realisasi Indeks RB tahun 2021 terjadi peningkatan dari 84,76 di tahun 2020 menjadi 85,97.

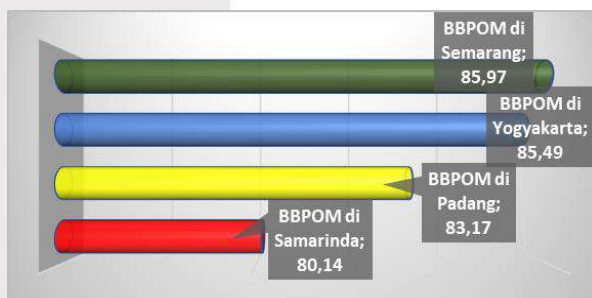
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 8.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang					Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
85,97	86	87	88	89	89	83	85	87	89

Realisasi tahun 2021 belum melampaui target jangka menengah baik Renstra BBPOM di Semarang maupun Nasional, maka BBPOM di Semarang masih harus meningkatkan kinerjanya di tahun 2022 untuk mencapai target 86, dibutuhkan kenaikan indeks sebesar 0,03 dari realisasi tahun 2021 (85,97).

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks RB BBPOM Klaster 2

Apabila dibandingkan dengan realisasi BBPOM Klaster 2, maka capaian realisasi Indeks RB BBPOM di Semarang menempati peringkat tertinggi. Jika dibandingkan dengan target Nasional (83) BBPOM di Semarang telah mencapai target Nasional dengan realisasi 85,97.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Pembangunan ZI dilakukan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan unit kerja. Terhadap pelaksanaan rencana kerja dilakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulan termasuk terhadap capaian target prioritas;
2. Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari *Agent of Change* (AoC) bersama dengan Kepala Balai yang telah berperan sebagai *role model*

perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi;



3. Manajemen SDM telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan adanya perencanaan kebutuhan pegawai, mutasi internal, pengembangan kompetensi, penegakan aturan disiplin dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian
 4. Telah mengembangkan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun inovasi yang mendorong efisiensi pengelolaan kinerja dan penguatan integritas antara lain, QR CODE Registrasi, LAKONE SEKTI, BPOM SIMPATIC, Sinare SEMAR, Aplikasi Penilaian PFM, Aplikasi SiBOS, QR CODE pelaporan gratifikasi dan Aplikasi ADITS;
 5. Disamping mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, BBPOM di Semarang telah menetapkan Standar Pelayanan unit kerja dan mengimplementasikan sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**
 1. Belum terdapat tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan ZI;
 2. Belum terdapat monitoring dan evaluasi atas dari pengembangan kompetensi terhadap perbaikan kinerja;
 3. Pimpinan unit dan seluruh jajaran telah terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja namun demikian belum terdapat tindak lanjut atas hasil pemantauan
 4. Penanganan pengaduan masyarakat sudah dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik namun belum terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut;
 5. Telah mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai inovasi untuk peningkatan pelayanan publik namun belum terdapat replikasi dari unit kerja lain/instansi lain
 - **Rekomendasi perbaikan kinerja**
 1. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan ZI secara konsisten dan berkelanjutan;
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pengembangan kompetensi terhadap perbaikan kinerja;
 3. Menyusun dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil pemantauan pencapaian kinerja;





4. Menyusun dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
5. Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan *stakeholder* disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi lain;
6. Melaksanakan *continues improvement* pada seluruh area Pembangunan ZI dalam rangka menuju WBBM.

IK 8.2 Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Tabel 3. 38 KOMPONEN PENILAIAN NILAI AKIP

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021
Perencanaan Kinerja	30	25,46	26,58
Pengukuran Kinerja	25	17,50	18,75
Pelaporan Kinerja	15	13,29	13,30
Evaluasi Internal	10	7,43	6,89
Capaian Kinerja	20	13,80	13,64
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,49	79,16
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada BBPOM di Semarang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020, dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor: PI.04.7.72.10.21.159 tanggal 10 Oktober 2021. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah cukup akuntabel dan berkinerja baik serta memiliki manajemen kinerja yang handal dengan rincian seperti pada tabel di atas.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, maka implementasi SAKIP Tahun 2021 pada BBPOM di Semarang dapat dikategorikan **BB** atau **Sangat Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik,





memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan

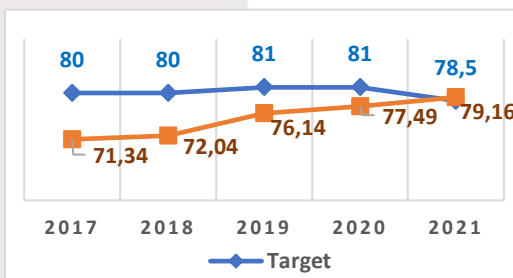
- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Berdasarkan Gambar 27 pada tahun 2021, pencapaian indikator nilai SAKIP BBPOM di Semarang adalah baik, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 100,84%.



Jika capaian tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019

terdapat kenaikan sebesar 1,67% dengan kriteria yang baik.



Berdasarkan grafik di samping menunjukkan bahwa realisasi selama 4 (lima) tahun masih di bawah target yang diharapkan tetapi nilai SAKIP dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan di tahun 2021, realisasinya menjadi di atas target karena adanya penurunan target.

Gambar 3. 42 PERBANDINGAN REALISASI NILAI AKIP BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2017-2021

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 8.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

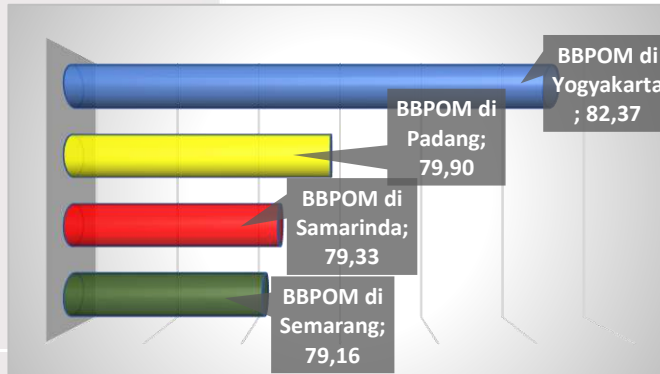
Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
79,16	78,5	79,5	80,5	81,5	81	82	83	84

Realisasi tahun 2021 belum melampaui target jangka menengah baik Renstra BBPOM di Semarang maupun Nasional, maka BBPOM di Semarang masih harus meningkatkan kinerjanya di tahun 2022 untuk mencapai target 79,5, dibutuhkan kenaikan nilai sebesar 0,34 dari realisasi tahun 2021 (79,16).





- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Dibandingkan dengan 3 (tiga) Balai yaitu Yogyakarta, Padang, dan Samarinda, Semarang menempati posisi ke 4 (empat). Tertinggi diraih oleh BBPOM di Yogyakarta terealisasi 83,37%.

Gambar 3. 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP BBPOM Klaster 2

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
2. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada BBPOM di Semarang
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya
5. Memberikan informasi kinerja pada BBPOM di Semarang
6. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas ada BBPOM di Semarang

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

1) Perencanaan

- a. BBPOM di Semarang telah menerapkan sistem AKIP tercermin dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU). PK telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan, serta telah





dilengkapi dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). BBPOM di Semarang telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 yang memuat tujuan, sasaran dan indikator tujuan yang berupa Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang merupakan indikator dari Sasaran Kegiatan (SK). SK telah berorientasi hasil, IKSK telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMN.

- b. Terdapat peningkatan nilai komponen perencanaan kinerja karena pada tahun 2020 telah dilakukan reviu terhadap Renstra dan RAPK telah dilengkapi dengan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung masing-masing IKSK. Namun Renstra 2020-2024 baru disahkan pada bulan Mei 2020 dan Penetapan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan belum didukung dengan kertas kerja penetapan target, dasar basis data yang memadai serta cara perhitungan yang logis sebagai dasar penetapan target kinerja. Berdasarkan hasil mapping visi – misi – sasaran – kebijakan – strategi terdapat perbedaan mapping tujuan – SK antar BB/BPOM karena belum ada panduan dari pusat dan 1 (satu) SK digunakan dalam mapping beberapa tujuan sehingga sasaran tidak spesifik dalam pencapaian tujuan.
- c. RAPK telah dilengkapi dengan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung masing-masing indikator namun belum dimanfaatkan dalam rangka perbaikan perencanaan seperti target tahun selanjutnya yang telah dicapai pada tahun 2020. Target kinerja yang disusun telah diukur capaiannya secara berkala namun belum dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (*reward*) dan *punishment*. BBPOM di Semarang memberikan *reward* berdasarkan capaian terhadap realisasi anggaran.

2) Pengukuran

- a. Dalam rangka pengukuran kinerja, BBPOM di Semarang telah menyusun perjanjian kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV dan telah melakukan pengukuran indikator kinerja sampai dengan eselon IV. Telah memiliki SOP untuk mengumpulkan data kinerja yaitu SOP Perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan SOP POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.13A.01. Telah menunjuk pihak yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik melalui SK Kepala BBPOM di Semarang No HK.02.02.104.1041.07.20.825 tentang Penetapan Penanggungjawab Monitoring dan Evaluasi Kinerja BBOM di Semarang TA 2020, telah mendokumentasikan hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah melalui data monitoring RAPK dan laporan kinerja interim triwulanan.
- b. Terdapat peningkatan nilai komponen pengukuran kinerja karena Pengumpulan dan pengukuran data kinerja pada BBPOM di Semarang menggunakan aplikasi kipas rambut, IKU BBPOM di Semarang telah





direviu dan terdapat IKU tambahan, telah mendokumentasikan hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah melalui data monitoring RAPK, laporan kinerja interim triwulanan, serta laporan progresif bulanan. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu belum seluruh capaian indikator kinerja eselon III/IV yang diperjanjikan terkait langsung dengan capaian indikator kinerja level di atasnya, keselarasan indikator masih harus direviu kembali, SOP Perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan SOP POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.13A.01 telah dilakukan reviu, namun belum memuat mekanisme otorisasi apabila terdapat revisi data sebelum dilakukan pengumpulan/penginputan data perbaikan, belum terdapat dokumentasi yang memadai atas tindak lanjut hasil evaluasi atas pengukuran kinerja hingga eselon IV pada setiap periode. Penggunaan aplikasi kipas rambut dan e-performance merupakan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengumpulan data kinerja/capaian indikator belum berupa pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengukuran

kinerja. Hasil pengukuran capaian IKU dan target kinerja eselon III dan IV belum dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan pemberian *reward & punishment*. Pemberian *reward* dilakukan berdasarkan capaian realisasi anggaran.

Masih terdapat perbedaan penyajian realisasi capaian IKU pada indikator "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sara produksi/distribusi yang dilaksanakan" antara Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja interim Triwulan IV, evaluasi internal triwulan IV dan aplikasi e-performance. Pada Laporan Kinerja Tahunan, evaluasi internal triwulan IV dan aplikasi e-performance, realisasi indikator "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sara produksi/distribusi yang dilaksanakan" sebesar 82,98, sedangkan pada lakip interim tercatat 81,57.

- c. Atas monitoring/capaian kinerja jangka menengah yang disajikan melalui data monitoring RAPK dan laporan kinerja interim triwulanan belum menyajikan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pada periode sebelumnya.

3) Pelaporan

- a. BBPOM di Semarang telah menyusun laporan kinerja dan telah disampaikan tepat waktu melalui esr.menpan.go.id. Laporan kinerja yang disusun telah mencantumkan efisiensi penggunaan sumber daya dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU. Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, standar nasional atau RPJMN dan capaian BBPOM yang setara.





- 2) Pengukuran
 - a. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* and *punishment*;
 - b. Melakukan pengukuran terhadap seluruh IKU termasuk IKU tambahan dan mendokumentasikannya secara memadai;
 - c. Menyempurnakan mekanisme pengumpulan data kinerja yang memuat mekanisme otorisasi apabila terdapat revisi data sebelum dilakukan pengumpulan/penginputan data perbaikan;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas pengukuran kinerja hingga eselon IV/koordinator pada setiap periode;
 - e. Mendokumentasikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi atas capaian kinerja di setiap periode pengukuran;
 - f. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengukuran kinerja Badan POM;
- 3) Pelaporan
 - a. Menyempurnakan penyajian efisiensi sumber daya pada laporan kinerja yang memuat analisis penggunaan sumber daya pada level sasaran.
 - b. Menyempurnakan penyajian analisis seluruh capaian IKU termasuk IKU tambahan.
- 4) Evaluasi Internal
 - a. Melaksanakan dan mendokumentasikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja dan arahan pimpinan setiap periode evaluasi;
 - b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan.
- 5) Capaian Kinerja

Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dengan mendokumentasikan data dukung yang memadai dan tepat dan mampu telusur.





SK
9

Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang Yang Berkinerja Optimal

Pencapaian Sasaran Kegiatan kesembilan pada Tahun 2020 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 40 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KESEMBILAN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
IK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	85,6	81,57	95,29%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				95,29%	Baik

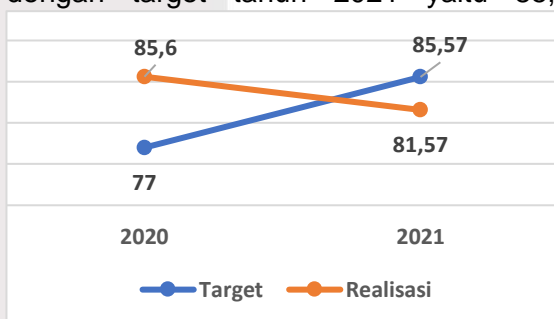
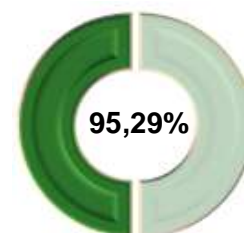
Sumber : Data Kinerja Triwulan IV yang di olah

NPS SK 9 sebesar 95,29%, menggambarkan bahwa **BBPOM di Semarang telah dapat mewujudkan SDM yang berkinerja optimal** dengan kategori **BAIK**.

IK 9.1 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN BBPOM di Semarang Tahun 2021 sebesar 81,57 dengan kategori Baik. Dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 85,6, maka indeks



profesionalitas ASN ini telah memenuhi target dengan capaian sebesar 95,29%.

Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang hanya dapat dibandingkan dengan periode tahun 2020 karena Indikator Kinerja ini adalah indikator baru yang ditetapkan periode tahun 2020 – 2024. Realisasi tahun 2021 menurun dibandingkan dengan realisasi 2020.

Gambar 3. 44 PERBANDINGAN REALISASI INDEKS PROFESIONALITAS asn BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2020-2021





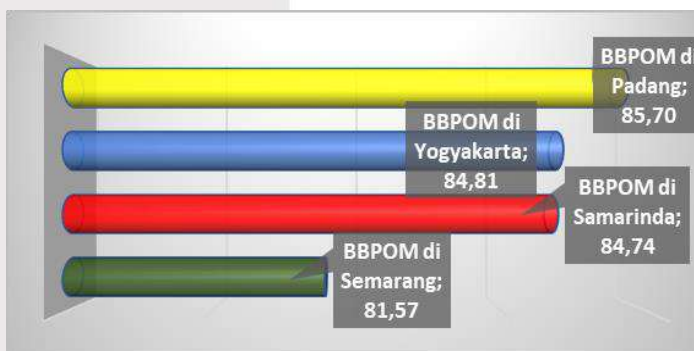
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 9.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
81,57	85,6	85,8	86	86,2	83	84	85	86

Realisasi tahun 2021 belum melampaui target jangka menengah baik Renstra BBPOM di Semarang maupun Nasional, maka BBPOM di Semarang masih harus meningkatkan kinerjanya di tahun 2022 untuk mencapai target 85,8, dibutuhkan kenaikan nilai sebesar 4,23 dari realisasi tahun 2021 (81,57).

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Klaster 2

Capaian Indeks Profesionalitas ASN di BBPOM di Semarang apabila dibandingkan BBPOM Klaster 2 lainnya, menempati urutan keempat. Jika dibandingkan dengan target Nasional (83), realisasi BBPOM di Semarang 81,57 sehingga masih di bawah target nasional yang ditetapkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)
2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)
3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)





Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Profesionalitas BBPOM di Semarang'.

Yang dilakukan BBPOM di Semarang dalam mencapai target kinerja Indeks Profesionalitas ASN adalah:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
- b. Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar.
- c. Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
- d. Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Adapun Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang menurun, yaitu karena:

- a. Masih terdapat ASN BPOM di Unit Kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan SMP sederajat, SMA sederajat dan Diploma;
- b. Masih terdapat pejabat fungsional belum mengikuti diklat fungsional dan mengikuti diklat teknis jabatan 20 JP; dan
- c. Masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan dan mengikuti diklat teknis jabatan 20 JP.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN Badan POM pada Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan nilai dimensi kualifikasi dapat dilakukan dengan pegawai diberikan penugasan untuk mengikuti tugas belajar/ijin belajar.
- b. Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dapat dilakukan dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

SK
10

*Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data Dan Informasi
Pengawasan Obat Dan Makanan*

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke-sepuluh pada Tahun 2021 diukur dengan **2 (dua) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 42 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KESEPULUH

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	81,17	102,75%	Baik
IK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2	2,50	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				113,87%	Sangat Baik

Sumber : Data Kinerja Triwulan IV yang di olah

Nilai Pencapaian Sasaran SK10 113,87% dengan kategori sangat baik, kedua capaian indikator tersebut dapat menggambarkan bahwa **BBPOM di Semarang telah dapat menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan.**

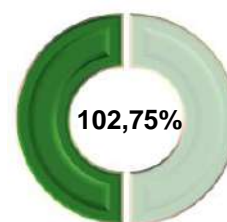
IK 10.1 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Adapun cara perhitungannya diperoleh berdasarkan nilai assesmen ulang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN).

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Secara keseluruhan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Semarang adalah 81,17%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 79% dengan capaian kinerja sebesar **102,75%** termasuk kategori **BAIK**. Target nilai minimal GLP yang ditetapkan oleh P3OMN adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi Personel laboratorium > 75,
3. Standar Peralatan Laboratorium > 70



Hasil assesmen GLP yang dilakukan P3OMN, BBPOM di Semarang tahun 2021 memperoleh nilai sebagai berikut:



Tabel 3. 43 NILAI PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM TAHUN 2021

Standar	Standar P3OMN	Capaian BBPOM di Semarang
Ruang Lingkup	65	78,79%
Kompetensi Personel Lab	75	90,19%
Peralatan Laboratorium	70	74,54%
Rata-rata	70	81,17%

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, persentase realisasi tahun 2021 naik sebesar 5,97% (dari 75,2% menjadi 81,17%), dengan target naik sebesar 4% (dari 75% menjadi 79%) sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 capaian kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP **lebih baik** jika dibandingkan dengan tahun 2020.

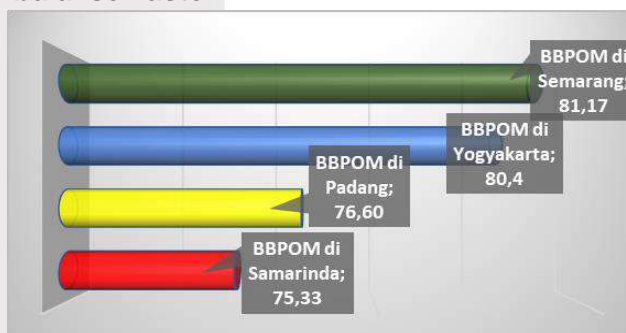
- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 10.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
81,17	79	84	89	94	76	81	86	91

Laboratorium BBPOM di Semarang harus meningkatkan realisasinya sebesar 2,83% dari realisasi tahun 2021 agar target sebesar 84% di tahun 2022 tercapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan BBPOM Klaster 2

Realisasi keberhasilan pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan BBPOM di Semarang sesuai standar GLP apabila dibandingkan BBPOM seklaster, menempati urutan pertama diikuti BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Padang.





Apabila dibandingkan dengan target nasional (76%), realisasi BBPOM di Semarang (81,17), BBPOM di Yogyakarta (80,4%) dan BBPOM di Padang (76,55%) di atas target nasional yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi BBPOM di Samarinda (75,33%) dibawah target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini antara lain

1. Pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi kebutuhan peralatan sesuai standar dan pengadaan suku cadang alat laboratorium sesuai kebutuhan laboratorium.
2. Pengadaan baku pembanding secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan baku pembanding yang tidak tersedia di P3OMN.
3. Peningkatan kompetensi personel pengujian melalui pelatihan secara luring maupun daring.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Analisis program/kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian minimal GLP

1. Laboratorium pengujian BBPOM di Semarang meningkatkan kemampuan ujinya dengan mengikuti kolaborasi metode analisa, kolaborasi baku pembanding serta uji profisiensi sehingga standar ruang lingkup pengujian dapat terpenuhi.
2. Laboratorium selalu berupaya untuk melakukan pengujian sesuai metode analisis yang terbaru, sesuai dengan standar ruang lingkup pengujian yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Capaian kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dalam kategori baik dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Agar kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dapat terus meningkat dan mencapai target perlu ditingkatkan kemampuan ruang lingkup pengujian, kompetensi personil laboratorium dan pemenuhan peralatan laboratorium sesuai standar disertai dengan monitoring dan evaluasinya secara berkala, sehingga kendala yang ada bisa segera diatasi.





IK 10.2 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Semarang yang Optimal

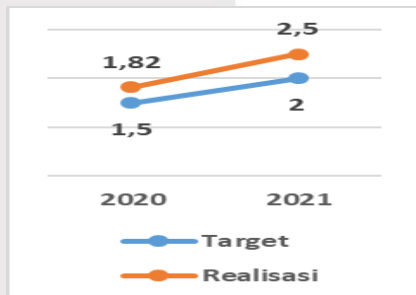
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dihitung dari Indeks Pemanfaatan System Informasi BPOM yang terdiri dari Sharing Folder, BCC, Berita Aktual, Email. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC yang diperoleh dari SIPT dan Spimker.

Hasil penilaian indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3. 45 HASIL PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2021

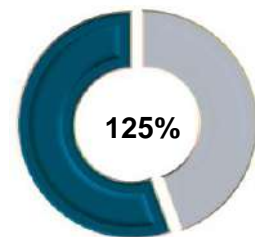
Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah	Total Nilai $i = c + h / 2$
SIPT (a)	SPIMKer (b)	$c = a + b$	Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BOC (f)	Berita Aktual (g)	$h = d+e+f+g/4$	
80%	20%							
2,4	0,6	3	2	3	1	2	2	2,5
Sangat dimanfaatkan	Sangat dimanfaatkan	Sangat dimanfaatkan	dimanfaatkan	sangat dimanfaatkan	Kurang dimanfaatkan	dimanfaatkan	dimanfaatkan	Sangat Dimanfaatkan

- Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3. 47 Perbandingan Indeks pemanfaatan data dan informasi Tahun 2020-2021

Indeks pemanfaatan data dan informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang



digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di BBPOM di Semarang. Realisasi 2,5 dibandingkan dengan target 2, maka capaian kinerja indikator kinerja ini adalah **125%** dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN. Realisasi pada Tahun 2021 ini BBPOM di Semarang jauh melampaui target yang telah ditetapkan dan meraih **ranking 1 (satu) dari seluruh BB/BPOM**. Jika dibandingkan tahun 2020 terjadi kenaikan nilai sebesar 0,68.





- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 10.2 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2,5	2	2,25	2,5	3	2	2,25	2,5	3

Realisasi tahun 2021 belum melampaui target jangka menengah baik Renstra BBPOM di Semarang maupun Nasional, tetapi realisasi 2021 telah melampaui jika di bandingkan dengan target 2022 dan mencapai target tahun 2023.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan data dan Informasi BBPOM Klaster 2

Capaian Indeks Pengelolaan data dan Informasi di BBPOM di Semarang apabila dibandingkan BBPOM Klaster 2 lainnya, menempati urutan pertama. Jika dibandingkan dengan target Nasional (3), realisasi BBPOM di Semarang 2,5 sehingga masih di bawah target nasional yang ditetapkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sharing Folder

Jika dihitung secara akumulasi banyaknya jumlah akses terhadap sharing folder masuk dalam kriteria sangat dimanfaatkan yang artinya jumlah akses dalam satu bulan melebihi 100, Hal tersebut terjadi antara lain :

1. semua petugas mengetahui adanya sharing folder.
2. semua petugas mengetahui dan mendapatkan akses masuk ke dalam sharing folder.

Berita Aktual, SIPT, Spimker

Secara umum beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target:

1. Dashboard belum digunakan secara maksimal untuk melakukan penelusuran.
2. Sebagian besar rumah Sakit telah mengirimkan data SPIMKER secara periodik.
3. Data yang diinput diverifikasi pada bulan yang sama.





4. Masih terdapat kendala di sistem SIPT untuk melakukan input baik hasil pemeriksaan sarana maupun sampel.
5. SIPT belum berjalan maksimal, tidak dapat digunakan dari awal tahun, baru bisa digunakan pada bulan April 2021 dan masih banyak kendala di sistem.
6. Tersedia menu “Tiket” yang berfungsi menyampaikan kendala yang ditemui, tetapi lama mendapat respon oleh Pusdatin.

Email

1. Pemanfaatan email untuk menyampaikan link zoom apel setiap senin dan kamis
2. Pemanfaatan email untuk menyampaikan data atau informasi terkait tupoksi instansi

Dasboard BPOM Operational Center (BOC)

Login dan mengakses/view melalui akun Direktur/Kepala Pusat/Biro/Kepala Balai kurang 4 kali sebulan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Data SPIMKER

Diperoleh dari data kasus keracunan yang diverifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit dalam aplikasi Spimker. Pada tahun 2021 TW I data yang masuk ke dalam aplikasi SPIMKER yang diinput 20 dan yang diverifikasi 20 (Indeks data = 100), pada TW 2 jumlah data yang diinput 35 dan yang diverifikasi 34 (Indeks data = 98,48), TW 3 jumlah data yang diinput 35 dan yang diverifikasi 28 (Indeks data = 93,43), TW 4 jumlah data yang diinput 258 dan yang diverifikasi 258 (Indeks data = 95,08).

Data SIPT

Pada triwulan pertama, SIPT sangat dimanfaatkan oleh BBPOM di Semarang. Adapun hasil pemutahiran SIPT adalah sebagai berikut

Tabel 3. 47 INDEKS PEMUTAHIRAN SIPT BBPOM DI SEMARANG

TW	% Sarana	% Sampling	% Pengujian	Rata-rata	Nilai Indeks	Komposit SIPT (80%)
1	45,59	0	0	45,59	1	0,8
2	83,73	112,6	0	98,17	3	2,4
3	67,38	96,23	70,1	77,9	2	1,6
4	115,77	88,85	70,49	91,7	3	2,4

Berita Aktual

Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stake holder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.



Tabel 3. 48 PROFIL BERITA AKTUAL BBPOM DI SEMARANGTAHUN 2021

Jenis Berita	Berita Aktual
Pengawasan Obat dan Makanan	8
Penindakan	7
Lintas Sektor/Stakeholder	33
Bimtek	23
Reformasi Birokrasi	3
Kepegawaian	7
Penandatanganan MOU	3
Laboratorium	3
Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	11
QMS	2
Total	100

Email

Perhitungan pemanfaatan email BBPOM di Semarang Tahun 2021 sebesar 81,38% dan masuk dalam kategori dimanfaatkan dengan nilai indeks 2. Perhitungan indeks pemanfaatan email ini berdasarkan pada tiga aspek yaitu aspek login, aspek pemanfaatan unit dan aspek pemanfaatan individu. Belum maksimalnya pemanfaatan email dikarenakan pada akhir tahun masih terdapat 8 akun email pegawai yang belum diaktifkan dan digunakan.

Dashboard BPOM Operational Center (BOC)

Perhitungan pemanfaatan BOC secara akumulasi dari bulan Januari 2021. Pada bulan Februari sampai dengan Mei terjadi kealpaan dalam penggunaan BOC, maka perhitungan pada akhir tahun hanya mencapai 67,92% dan masuk indeks 1 dengan kategori kurang dimanfaatkan.

Sharing Folder

Indeks Pemanfaatan Sharing Folder tahun 2021 yaitu 3 atau dapat diartikan sangat dimanfaatkan. Ini karena Subtansi Inspeksi telah menggunakan sharing folder secara optimal. Adapun yang aktivitas yang dilakukan yaitu : login Sharing Folder, melihat, mencari dan mendownload label.

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Sharing Folder

Perlu ditingkatkan data pre market dan post market yang dapat diakses pada sharing folder, misal pada data produk obat tradisional label/penandaan yang disetujui belum semuanya dapat tersedia.

Email

Meningkatkan penggunaan email *corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke pusat maupun *stakeholder*.



Berita Aktual

Upload berita aktual terkait kegiatan Balai Besar/Balai POM dalam waktu 3 (tiga) Bulan minimal 10 berita

Spimker

1. Menghimbau rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER.
2. Menghimbau data yang diinput semuanya diverifikasi pada bulan yang sama.
3. Menghimbau kepada lintas sektor terkait (seperti : Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, atau Laboratorium Kesehatan Daerah/ Labkesda Provinsi Jawa Tengah) untuk menyampaikan data hasil uji pengujian sampel KLB ke BBPOM di Semarang.

SIPT

4. Agar SIPT dapat digunakan dari awal tahun sehingga input sampel, sarana dan hasil pengujian tidak menumpuk di pertengahan sampai dengan akhir tahun.
5. Melakukan pengembangan bitly kartu kendali pemeriksaan sarana di seksi inspeksi sehingga dapat digunakan untuk sistem monitoring input SIPT sarana, selain untuk monitoring tindak lanjut dan feedback CAPA dari sarana.
6. Komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan Pusdatin Badan POM tentang kendala yang dihadapi terkait SIPT baik secara WAGrup atau melalui menu "Tiket".
7. Secara aktif melakukan monitoring realisasi input SIPT.

Dashboard BPOM Operational Center (BOC)

Login dan mengakses/*view* melalui akun Direktur/Kepala Pusat/Biro/Kepala Balai minimal 4 kali sebulan.





SK
11

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang Secara Akuntabel

Pencapaian Sasaran Kegiatan Kesebelas pada Tahun 2020 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 49 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN KESEBELAS

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
IK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	92,9	90,62	97,55%	Baik
IK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	91	100,00	109,89%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				103,72%	Baik

Sumber : Data Kinerja Triwulan IV yang di olah

NPS SK 11 sebesar 103,72% menggambarkan bahwa **BBPOM di Semarang telah mengelola Keuangan secara akuntabel** dengan kategori **BAIK**.

IK 11.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

- **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Semarang Tahun 2020 berdasarkan monev SMART DJA pada aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id adalah 90,62%. Nilai NKA sendiri diperoleh dari 40% nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan 60% Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Dari target yang telah ditetapkan (92,9%) diperoleh capaian 97,55% (Baik).





Sumber : Aplikasi Smart DJA 2020

Gambar 3. 49 Nilai SMART EKA dan IKPA

Realisasi kinerja Anggaran BBPOM di Semarang pada periode tahun 2021 hanya dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 karena Indikator Kinerja ini adalah indikator baru yang ditetapkan periode tahun 2020 – 2024. Realisasi tahun 2021 turun 0,62 poin dari realisasi tahun 2020 (91,24)

IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah**

Tabel 3. 50 Perbandingan Realisasi Kinerja IK 11.1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Dan Target Nasional

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang				Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
90,62	92,9	93,5	94,7	95,9	93	93,5	94,5	95,6

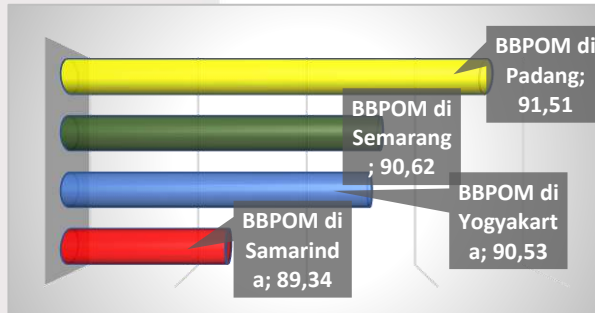
Realisasi tahun 2021 belum melampaui target jangka menengah baik Renstra BBPOM di Semarang maupun Nasional.

Dibandingkan terhadap target tahun 2022, maka BBPOM di Semarang masih harus meningkatkan kinerjanya di tahun 2021 untuk mencapai target 93,5, dibutuhkan kenaikan nilai sebesar 2,88.





- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 50 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Klaster 2

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Semarang apabila dibandingkan BBPOM Klaster 2 lainnya, menempati urutan kedua setelah BBPOM di Padang dan belum mampu mencapai Standar Nasional (93).

- **Analisis penyebab kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai Nilai Kinerja Anggaran diantaranya melalui:

1. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan mengenai penyerapan anggaran terhadap PoA (*Plan of Action*) dan RPD (Rencana Penarikan Dana) setiap minggu/bulan.
 2. Masing-masing penanggung jawab kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana.
 3. Mereviu anggaran yang diprediksi tidak terlaksana agar dialihkan ke bentuk kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sama dalam pengawasan Obat dan Makanan
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**
 1. Pengalihan metode penyelenggaraan beberapa kegiatan menjadi secara daring.
 2. Melakukan desk anggaran antara pimpinan dengan penanggung jawab dan pengelola anggaran pada masing-masing program/kegiatan.
 - **Rekomendasi perbaikan kinerja**
Monitoring secara aktif oleh petugas Monev terhadap nilai IKPA dan EKA khususnya terkait unsur-unsur meliputi: Monitoring Realisasi DIPA, Hal III DIPA, Capaian Keluaran Kegiatan (CKK), Efisiensi, Saldo Minus, revolving UP, data kontrak, dispensasi SPM, Renkas, Kesalahan SPM, monitoring tagihan, rekonsiliasi keuangan dan monitoring penyampaian LPJ Bendahara, penyelesaian retur serta capaian output.





IK 11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang

- Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang baik. Hal ini bisa dilihat secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kerjanya. Namun masih ada 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang masih perlu ditingkatkan efisiensinya yaitu Sasaran Kegiatan 1 “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang” dan Sasaran Kegiatan 9 “Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal”.



Gambar 3. 51 GRAFIK PERBANDINGAN TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BBPOM DI SEMARANG 2020-2021

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, tahun 2020 masih menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang relative efisien.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah

TABEL 3. 51 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA IK 11.2 TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DAN TARGET NASIONAL

Realisasi	Target Jangka Menengah BBPOM di Semarang					Target Jangka Menengah Nasional			
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
100	91	-	-	-	-	92,7	-	-	-

Realisasi tahun 2021 melampaui target jangka menengah baik Renstra BBPOM di Semarang maupun Nasional.

Tidak terdapat target untuk tahun 2022-2024, tahun 2022 untuk SK 11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel hanya diukur dengan indicator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Semarang.





- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan balai seklaster**



Gambar 3. 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM Klaster 2

Berdasarkan realisasi jika dibandingkan dengan 3 (tiga) BBPOM Klaster 2 lainnya, yaitu 3 balai memiliki realisasi 100% yaitu Semarang, Padang dan Samarinda. Apabila dilihat dari capaiannya BBPOM di Semarang menduduki urutan pertama.

- **Analisis penyebab kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor keberhasilan pencapaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang, diantaranya:

1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi.
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
3. Ketelitian pejabat serta pengelola keuangan dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D
4. Revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Dengan demikian upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan money realisasi anggaran setiap hari senin minggu ke 2.
2. Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.



3. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
4. Melakukan monitoring pelaksanaan refocusing anggaran penanganan Covid-19.
5. Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang hanya di tetapkan sampai dengan tahun 2021, sehingga tidak dapat dievaluasi maupun analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode selanjutnya

- **Rekomendasi perbaikan kinerja**

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang membandingkan antara capaian anggaran dengan capaian kegiatan. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, misalnya memperhitungkan kapasitas SDM yang dimiliki oleh BBPOM di Semarang dengan dukungan data yang lebih memadai sehingga diperoleh tingkat efisiensi yang lebih optimal. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran laporan ini.

Meskipun tahun 2022 tidak ada indikator ini tetapi setiap pelaksana kegiatan di setiap Subtansi tetap harus menyiapkan dan mematuhi *Plan of Action* (POA) yang telah dibuat, karena hal tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi rencana dalam maksud menghasilkan setiap sasaran hasil kinerja instansi.

3.3 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT UTAMA ATAS HASIL EVALUASI (LHE) AKIP TAHUN 2020

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Terhadap kelemahan yang masih ada direkomendasikan kepada Kepala BBPOM di Semarang beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Melakukan reuiu Renstra 2020 - 2024 yang meliputi pemetaan sasaran dan indikator kinerja terhadap tujuan dan IKU selain yang telah ditetapkan Badan POM Pusat.



- b. Mempublikasikan dokumen IKU 2020-2024, PK 2020, dan RAPK 2020 pada salah satu media publikasi seperti Website BPOM/Subsite Unit/Sosial Media Unit yang mudah di akses oleh *stakeholder/masyarakat*;
- c. Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan;

2. Pengukuran

- a. Melakukan publikasi IKU dan PK sesuai Renstra 2020 - 2020 pada Website Badan POM/Subsite/Media sosial BBPOM di Semarang agar mudah di akses oleh *stakeholder/masyarakat*.
- b. Melakukan pengukuran terhadap seluruh IKU termasuk IKU tambahan dan mendokumentasikannya secara memadai.
- c. Mendokumentasikan pemantauan kinerja termasuk kinerja Eselon III dan IV secara memadai dengan memuat kendala/hambatan beserta rencana tindak lanjutnya.
- d. Menyempurnakan mekanisme pengumpulan data kinerja yang memuat mekanisme verifikasi dalam penyediaan data yang valid dan jika terjadi kesalahan data capaian kinerja.
- e. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- f. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi *e- performance* BPOM.

3. Pelaporan

- a. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra
- b. Menyempurnakan penyajian efisiensi sumber daya pada laporan kinerja yang memuat analisis penggunaan sumber daya pada level sasaran.
- c. Menyempurnakan penyajian analisis seluruh capaian IKU termasuk IKU tambahan.





4. Evaluasi Internal

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
- b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.

5. Capaian Kinerja

Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

- **Perbaikan kinerja yang telah dilakukan**

Terhadap kelemahan yang masih ada direkomendasikan kepada Kepala BBPOM di Semarang beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Telah melakukan reuiu Renstra 2020 - 2024 yang meliputi pemetaan sasaran dan indikator kinerja terhadap tujuan dan IKU selain yang telah ditetapkan Badan POM Pusat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Nomor Hk.02.02.13a.12.21.4660 Tahun 2021 Tentang Reuiu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2020-2024 Tanggal 23 Desember 2021
- b. Telah Mempublikasikan dokumen IKU 2020-2024, PK 2020, dan RAPK 2020 pada salah satu media publikasi seperti Website BPOM/Subsite Unit/Sosial Media Unit yang mudah di akses oleh stakeholder/masyarakat;
- c. Telah membuat Matrik alokasi anggaran per Indikator yang mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan;

2. Pengukuran

- a. Melakukan publikasi IKU dan PK sesuai Renstra 2020 - 2020 pada Website Badan POM/Subsite/Media sosial BBPOM di Semarang agar mudah di akses oleh *stakeholder*/masyarakat.



- b. Pengukuran Indikator Kinerja tambahan ditiadakan karena sudah masuk dalam perhitungan Indikator Kinerja Utama
- c. Notulen Rapat Progresif telah didokumentasikan pemantauan kinerja termasuk kinerja Eselon III dan IV secara memadai dengan memuat kendala/hambatan beserta rencana tindak lanjutnya.
- d. Merevisi SOP Penganggaran, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang memuat mekanisme verifikasi dalam penyediaan data yang valid dan jika terjadi kesalahan data capaian kinerja.
- e. Telah membuat Cascading kinerja sampai dengan Level pegawai serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian anggaran per Bidang tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- f. Telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi *e- performance* BPOM.

3. Pelaporan

- a. Telah menyajikan informasi dalam laporan kinerja mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra. dan tetapi efisiensi sumber daya pada laporan kinerja belum memuat analisis penggunaan sumber daya pada level sasaran secara mendetail.
- b. Pembahasan Lakip 2020 lebih lengkap dan mendetail

4. Evaluasi Internal

- a. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
- b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan yaitu dengan dilakukan pembahasan untuk realisasi setiap indikator dibandingkan dengan target jangka menengah pada Laporan Akuntabilitas Kinerja 2020 dan selanjutnya sebagai dasar untuk merevisi perjanjian Kinerja 2021-2022



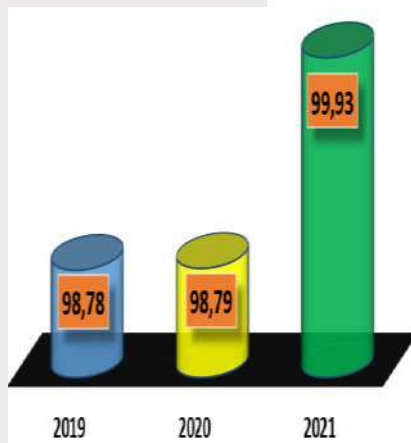


5. Capaian Kinerja

Melakukan pengembangan Googlesite Monev “KiBaS rAmbut - Kinerja Balai Besar POM di Semarang Anti Geseh Anti Mbulet” sebagai sarana Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

3.4 REALISASI ANGGARAN BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2021

Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 52.306.317.000,-. Anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan anggaran tahun 2020. Pada tanggal 3 Juni 2021 terdapat pengurangan pagu DIPA menjadi Rp.51.501.656.000.



Gambar 3. 53 Perbandingan realisasi anggaran tahun 2019-2021

Pada tanggal 25 Juli 2021 terdapat pengurangan pagu DIPA kembali menjadi Rp.49.284.983.000,-. Pada tanggal 5 Agustus 2021 terdapat pengurangan anggaran kembali dalam rangka Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat menjadi Rp.46.459.983.000,-. Realokasi anggaran yang digunakan untuk honor penguji covid dan belanja modal alat pengolah data berasal dari Anggaran Belanja Modal pengadaan AHU BSL-2 dan kegiatan lain yang tidak mempengaruhi capaian target dan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Realisasi anggaran tahun 2021 adalah Rp. 46.428.958.765,- atau 99,93%.

Pengelolaan anggaran BBPOM di Semarang senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

1. Pelaksanaan Monev anggaran oleh pimpinan dan melibatkan perwakilan seluruh bidang dilakukan berdasarkan POA (*plan of action*) secara berkala (bulanan)
2. Pelaksanaan revisi anggaran untuk meningkatkan capaian kinerja dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
3. Optimalisasi anggaran untuk kegiatan yang telah selesai.





3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan Laporan Kinerja

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Semarang tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :





Tabel 3. 52 Tingkat Efisiensi Kegiatan

Kode	Kegiatan/KRO/RO	TE	Capaian TE	Kategori
3165.ADD	Standarisasi Lembaga	0,0016	100%	Efisien
3165.AEA	Koordinasi	0,0002	100%	Efisien
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	0,0028	100%	Efisien
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	0,0831	100%	Efisien
3165.BKB	Pemantauan produk	0,0023	100%	Efisien
3165.BMB	Komunikasi Publik	0,1923	100%	Efisien
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	0,0003	100%	Efisien
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	0,0006	100%	Efisien
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	0,0581	100%	Efisien
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	0,0194	100%	Efisien
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	0,0261	100%	Efisien
6384.EAA	Layanan Perkantoran	0,0002	100%	Efisien

Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang melaksanakan 12 (dua belas) KRO (Kelompok Rician Output untuk mendukung pencapaian 11 Sasaran Kegiatan dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 0,1923. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Komunikasi Publik mempunyai TE tertinggi karena output tercapai melebihi target dengan anggaran terserap seluruhnya. Tingginya output Komunikasi Publik disebabkan karena realisasi fisik melebihi target yang telah ditetapkan, selain itu penyebaran informasi melalui media sosial juga aktif dilakukan setiap bulan seiring dengan kondisi pandemi covid yang melarang kegiatan tatap muka.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Semarang mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

- **Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Kegiatan**

Nilai efisiensi Sasaran Kegiatan diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap Sasaran Kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:



1) 0 - 0,2	: 100% (Efisien)	6) 1,01 - 1,2	: 86% (Tidak Efisien)
2) 0,21 - 0,4	: 95% (Efisien)	7) 1,21 - 1,4	: 84% (Tidak Efisien)
3) 0,41 - 0,6	: 92% (Efisien)	8) 1,41 - 1,6	: 80% (Tidak Efisien)
4) 0,61 - 0,8	: 90% (Efisien)	9) 1,61 - 1,8	: 78% (Tidak Efisien)
5) 0,81 - 1,0	: 88% (Efisien)	10) > 1,81	: 75% (Tidak Efisien)

Tabel 3. 53 PROFIL TINGKAT EFISIENSI SETIAP SASARAN KEGIATAN BBPOM DI SEMARANG

No.	Sasaran Strategis	Capaian SS(%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Capaian Tingkat Efisiensi	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	89,68%	99,95%	75%	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	116,07%	99,97%	100%	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	103,46%	99,67%	100%	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	103,14%	99,82%	100%	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	102,71%	99,94%	100%	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	100,00%	99,95%	100%	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	112,28%	99,95%	100%	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	100,98%	99,92%	100%	Efisien
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja	95,29%	99,62%	75%	Tidak Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	113,87%	99,91%	100%	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara optimal	103,72%	99,98%	100%	Efisien

Realisasi anggaran di 11 Sasaran Kegiatan baik karena di atas 95%, namun realisasi anggaran pada Sasaran Kegiatan ke 1 dan 9 tidak selaras dengan pencapaian indikator, dimana anggaran yang terserap lebih tinggi dibandingkan pencapaian indikator sehingga terdapat ketidak efisienan. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk



membayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada Sasaran Kegiatan.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Kegiatan berdasar Tabel 3.53 adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada Sasaran Kegiatan pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang” sebesar Rp912.778.753,- atau 1,97% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. 3 dari 5 indikator pada sasaran ini telah tercapai. Untuk indikator “Persentase Obat yang aman dan bermutu” berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian cukup karena terdapat banyak kosmetik yang masih TMS, dan indikator “Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat” dengan capaian kurang karena Banyaknya sampel fortifikasi yang TMS terutama TMS kadar yodium pada garam dan TMS kadar vitamin A pada minyak goreng sawit. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan pertama adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan kurang dari anggaran yang dikeluarkan.
2. Pada Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp6.278.582.330,- atau 13,52% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan dan Kegiatan KIE kepada masyarakat. Kegiatan ini berdampak terhadap peningkatan hasil survey kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu sehingga target tahun 2021 dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan kedua adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
3. Pada Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp202.803.309,- atau 0,44% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemberian layanan publik berupa desk CAPA sertifikasi CDOB, pemeriksaan sarana produksi dalam rangka registrasi/sertifikasi, penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media, serta acara forum komunikasi penerapan dan pelayanan SKI/SKE dengan lintas sektor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat, sehingga semua hasil survey dapat mencapai target tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan





anggaran untuk mencapai saSasaran Kegiatan ketiga adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

4. Pada Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.808.962.868,- atau 3,9% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, peningkatan kompetensi inspektur, pendampingan UMKM. peningkatan kompetensi pelayanan publik, dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik. Secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai saSasaran Kegiatan keempat adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
5. Pada Sasaran Kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.746,238,188,- atau 3,76% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk Penyebaran informasi obat dan makanan dan pelaksanaan intervensi komunitas sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya semua target 4 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai saSasaran Kegiatan kelima adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
6. Pada Sasaran Kegiatan keenam yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp912.778.753,- atau 1,97% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengujian sampel obat dan makanan beserta sarana prasarana penunjang. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya semua target 2 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai saSasaran Kegiatan keenam adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
7. Pada Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp850.043.737,- atau



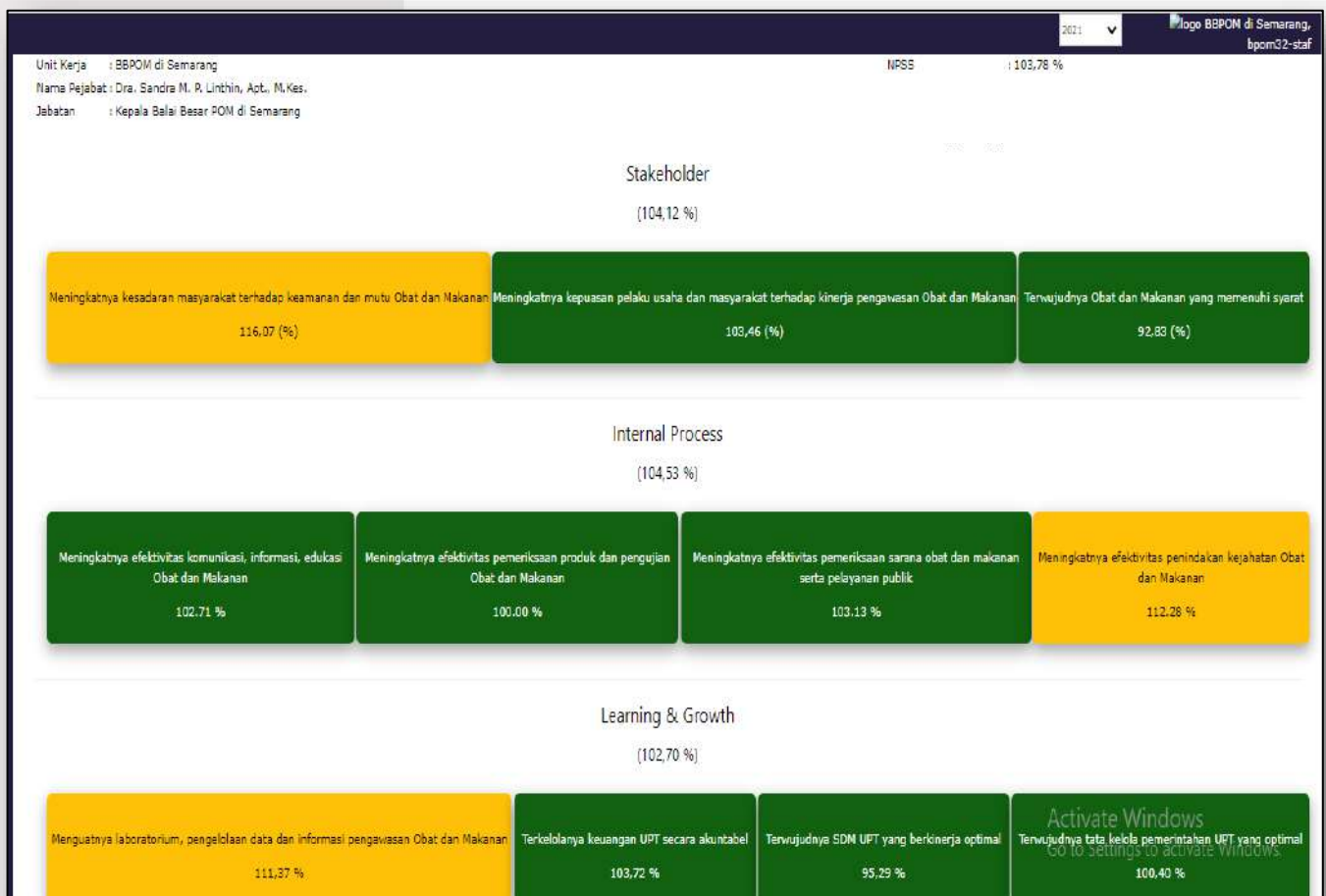


- 1.83% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai saSasaran Kegiatan ketujuh adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
8. Pada Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp34.368.425,- atau 0,07% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran Laporan Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2021. Anggaran ini dipergunakan untuk pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana dan mencapai target indeks RB dan nilai SAKIP tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai saSasaran Kegiatan ketujuh adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
 9. Pada Sasaran Kegiatan kesembilan yaitu “Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp462.064.243,- atau 1% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini meski mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang berdampak langsung pada pencapaian target sasaran. Tetapi berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai saSasaran Kegiatan kesembilan adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan kurang dari anggaran yang dikeluarkan, ini dikarenakan adanya penurunan nilai kompetensi pegawai di tahun 2021.
 10. Pada Sasaran Kegiatan kesepuluh yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp6.854.773.127,- atau 14,76% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana untuk jaminan mutu hasil pengujian, peningkatan kompetensi penguji, koordinasi laboratorium, dan pengadaan sarana prasarana kantor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai saSasaran Kegiatan kesepuluh adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.





11. Pada Sasaran Kegiatan kesebelas yaitu “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp26.375.185.869,- atau 56,80% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan gaji dan tunjangan pegawai, kegiatan koordinasi, evaluasi dan penyusunan laporan serta operasional kantor. kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap terkelolanya keuangan secara akuntabel ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan kesebelas adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.



Sumber : Aplikasi Simetris E-Performance Tahun 2021

Gambar 3. 54 Nilai capaian kinerja pada aplikasi simetris E-Performance Tahun 2021



Langkah-langkah yang sudah dilakukan BBPOM di Semarang dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran antara lain:

- 1) Menjaga komitmen yang tinggi dari level pimpinan hingga staf BBPOM di Semarang, Penyusunan PoA yang selalu dimonitoring. Menguatkan pengendalian internal melalui pembentukan tim penyusun program/kegiatan (PIPK) dan Tim Monev sehingga tersedia informasi data dapat diandalkan.
- 2) Tahun 2021 dengan realisasi anggaran 99,93% BBPOM di Semarang dapat melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian kinerja baik 103,78% sesuai dengan monitoring dan evaluasi di *e-performance* BPOM.





BAB IV PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan dari 11 Sasaran Kegiatan, dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Nilai Pencapaian 11 Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		NPS
<i>CAPAIAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>		104,12
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	92,83
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	116,07
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	103,46
<i>CAPAIAN INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>		104,53
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	103,13
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	102,71
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	100
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	112,28
<i>CAPAIAN LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>		102,70
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	100,41
SK 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	95,29
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	111,38
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	103,72
NPS TOTAL		103,78

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut dari 11 Sasaran Kegiatan yang ditetapkan yaitu :



- ❖ 3 (tiga) Sasaran kegiatan memperoleh NPS '**SANGAT BAIK**'
- ❖ 8 (delapan) memperoleh NPS '**BAIK**'

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) total tahun 2021 adalah sebesar **103,78%**, dengan kriteria **BAIK**.

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 92.83% dengan kriteria BAIK;
2. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 116,07% dengan kriteria SANGAT BAIK;
3. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 103,46% dengan kriteria BAIK;
4. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 103,13% dengan kriteria BAIK;
5. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 102,71% dengan kriteria BAIK;
6. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 100% dengan kriteria BAIK;
7. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 112,28% dengan kriteria BAIK;
8. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal dengan NPS sebesar 100,41% dengan kriteria BAIK;
9. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan SDM BBPOM BBPOM di Semarang yang optimal dengan NPS sebesar 95,29% dengan kriteria BAIK;
10. Pada tahun 2020 BBPOM di Semarang berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 111,38% dengan kriteria SANGAT BAIK;





11. Pada tahun 2021 BBPOM di Semarang berhasil mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel dengan NPS sebesar 103,72% dengan kriteria BAIK dibuktikan dengan nilai IKPA 97.21 dan nilai EKA sebesar 86,22.

Dengan demikian dapat dikatakan seluruh capaian sasaran kegiatan tercapai. Hal tersebut tidak terlepas dari capaian 29 Indikator Kinerja Utama yang sangat berpengaruh terhadap capaian sasaran kegiatan.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Semarang pada tahun 2021 antara 62,19% sampai dengan 125,00%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator "Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat" sebesar 62,19%, disebabkan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Sedangkan capaian indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal" sebesar 125,00%, dan meraih ranking 1 (satu) dari seluruh BB/BPOM hal tersebut merupakan hasil peningkatan pemanfaatan pengelolaan dan informasi di Balai Besar POM di Semarang.

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Semarang kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah khususnya Balai Besar POM di Semarang di masa mendatang.

4.2 SARAN

1. Perlu dilakukan reviu terhadap target dengan capaian diatas 120% atau tidak dapat disimpulkan, yaitu untuk indikator 'Indeks pengelolaan data informasi BBPOM Semarang yang optimal.
2. Perlu direncanakan upaya dan langkah-langkah nyata di tahun 2022 dengan memanfaatkan hasil evaluasi tahun 2021 untuk mencapai target 2 indikator yang belum tercapai di tahun 2021 yaitu untuk indikator ke-5 persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (62,19%) yang belum mencapai target, perlu dilakukan :
 - a) Pembinaan kepada sarana produksi pangan (Fortifikasi) terkait hasil uji yang TMS.
 - b) Melaksanakan bimtek ke para pelaku usaha industri garam dan audiensi ke pemerintah daerah terkait usaha industri garam.
 - c) Penyusunan perencanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan kajian analisis resiko



3. Untuk Indikator ke-3 dengan perolehan hasil 'CUKUP' Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindaklanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja tersebut antara lain:
 - Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian untuk membuat perencanaan ulang sampling sampai dengan bulan Desember.
 - Melakukan pembinaan kepada sarana produksi terkait hasil uji yang TMS.
 - Mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Penandaan dan Iklan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika pada bulan April 2021.
 - Penyusunan perencanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan kajian analisis resiko sehingga sarana produksi dan distribusi dengan *track record* tidak memenuhi ketentuan dan produk tidak memenuhi syarat lebih intensif mendapatkan pengawasan, pembinaan dan pendampingan.
 - Memaksimalkan kegiatan pengawasan, pembinaan, pendampingan sarana produksi dan distribusi, dan KIE secara luring, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui daring.
 - Mengevaluasi kembali kemampuan laboratorium dalam menguji sampel obat sesuai pedoman sampling, untuk melihat adanya peluang peningkatan
 - Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel penguji.
4. Melakukan survey pelayanan publik sebagai masukan peningkatan kualitas layanan publik dan menentukan reward untuk SDM. Survey dilakukan berkala dan hasilnya akan digunakan untuk memilih *employee of the month* pelayanan publik.
5. Pengelolaan arsip pengaduan dan layanan akan dilakukan dengan lebih baik menggunakan system informasi sehingga terdokumentasi lebih baik dan mudah telusur serta mudah diakses.





LAMPIRAN





Lampiran 1 Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TW IV

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target s,d TW IV (Jan-Des)	Realisasi			s,d TW IV (Jan-Des)	Kategori
				s,d TW IV (Jan - Des)				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5	90,5	1203	1388	86,67	95,77%	Baik
	2 Persentase Makanan yang memenuhi	80	80	513	564	90,96	113,70%	Sangat Baik
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu	89,2	89,2	441	595	74,12	83,09%	Cukup
	4 Persentase Makanan yang aman dan	77,5	77,5	251	296	84,80	109,42%	Baik
	5 Persentase pangan fortifikasi yang	94	94	76	130	58,46	62,19%	Kurang
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	75	75	-	-	87,05	116,07%	Sangat Baik
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,1	87,1	-	-	92,10	105,74%	Baik
	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja	70,73	70,73	-	-	72,56	102,59%	Baik
	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	90	90	-	-	91,84	102,04%	Baik
4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89			100,00	112,36%	Sangat Baik
	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil	78	78			72,77	93,29%	Baik
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi	99	99	5135	5146	99,79	100,79%	Baik
	13 Persentase sarana produksi Obat dan	51	51	188	351	53,56	105,02%	Baik
	14 Persentase sarana distribusi Obat dan	70	70	701	937	74,81	106,88%	Baik
15 Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,35	-	-	4,37	100,46%	Baik	
5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	16 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,5	91,5	-	-	92,50	101,09%	Baik
	17 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan	41	41			45,00	109,76%	Baik
	18 Jumlah desa pangan aman	19	19			19,00	100,00%	Baik
	19 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10	10			10,00	100,00%	Baik
6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	20 Persentase sampel Obat yang diperiksa	100	100			100,53	100,53%	Baik
	21 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	-	-	103,92	103,92%	Baik
7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	22 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,5	72,5	-	-	81,4	112,28%	Sangat Baik
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang	23 Indeks RB BBPOM di Semarang	86	86	-	-	85,97	99,97%	Baik
	24 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	78,5	78,5	-	-	79,16	100,84%	Baik
9 Terwujudnya SDM BBPOM di	25 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di	85,6	85,6	-	-	81,57	95,29%	Baik
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	79	-	-	81,17	102,75%	Baik
	27 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2	2	-	-	2,50	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	28 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di	92,9	92,9	-	-	90,62	97,55%	Baik
	29 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	91	91			100	109,89%	Baik





Lampiran 2 Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan di uji sesuai standar

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total													RAPPK 2021		
					TMK				Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji		ngan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa)	
					TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak	TMK Label / Penandaan			MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Ruang Pangan Purpose)					
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
	TOTAL		951		951	5	0	0	141	946	946	793	10	142	1	0	158	0	951	83.39
	Total Obat		132	Targeted	139	0	0	0	17	139	139	118	2	19	0	0	21	0	139	84.89
	Total Obat Tradisional		181		175	0	0	0	29	175	175	122	17	31	5	0	53	0	175	69.71
	Total Suplemen Kesehatan		55	Targeted	55	0	0	0	5	55	55	45	4	5	1	0	10	0	55	81.82
	Total Kosmetik		323		323	0	0	0	93	323	323	224	6	92	1	0	99	0	323	69.35
	Semarang		581	Targeted	595	0	0	0	124	595	595	441	28	120	6	0	154	0	595	74.12
	Kabupaten Banyumas		45		45	0	0	0	18	45	45	27	1	17	0	0	18	0	45	90.00
	Kota Surakarta		45	Targeted	52	0	0	0	2	52	52	41	0	10	1	0	11	0	52	78.85
	Total targeted Obat, OT, Sk		671		692	0	0	0	144	692	692	509	29	147	7	0	183	0	692	73.55
	Total Obat		524	Random	524	0	0	0	67	524	524	460	0	64	0	0	64	0	524	87.79
	Total Obat Tradisional		348		348	8	0	0	45	340	340	265	20	49	6	0	83	0	348	76.15
	Total Suplemen Kesehatan		125		128	1	0	0	7	125	125	114	5	6	0	0	12	0	128	90.48
	Total Kosmetik		628		628	5	0	0	48	623	623	569	4	50	0	0	59	0	628	90.61
	Semarang		1387	Random	1388	13	0	0	139	1375	1375	1203	27	140	5	0	185	0	1388	86.67
	Kabupaten Banyumas		119		119	0	0	0	28	119	119	94	0	24	1	0	25	0	119	78.99
	Kota Surakarta		119		119	1	0	0	2	118	118	111	2	5	0	0	8	0	119	93.28
	Total Random Obat, OT, Sk		1625		1626	14	0	0	167	1612	1612	1408	29	169	6	0	218	0	1626	86.59
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos		2298		2318	14	0	0	311	2304	2304	1917	68	316	13	0	401	0	2318	82.70

Lampiran 3 Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan di uji sesuai standar

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total													RAPPK 2021		
					TMK				Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji		ngan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa)	
					TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak	TMK Label / Penandaan			MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Ruang Pangan Purpose)					
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	Semarang	252	Targeted	296	1	0	0	7	295	295	251	41	3	0	0	45	0	296	84.80
		Kabupaten Banyumas	31		30	0	0	0	1	30	30	27	3	0	0	0	3	0	30	90.00
		Kota Surakarta	30		30	0	0	0	0	30	30	29	1	0	0	1	0	30	96.67	
		Semarang	567	Random	564	1	0	0	86	563	563	513	42	5	3	0	51	0	564	90.96
		Kabupaten Banyumas	35		35	0	0	0	12	35	35	30	3	2	0	0	5	0	35	85.71
		Kota Surakarta	35		35	0	0	0	0	35	35	33	1	1	0	0	2	0	35	94.29
	Total Pangan		313	Targeted	356	1	0	0	8	355	355	307	45	3	0	0	49	0	356	86.24
	Total Pangan		637	Random	634	1	0	0	98	633	633	576	46	8	3	0	58	0	634	90.85
2	Pangan Fortifikasi	Semarang	130	Targeted	130	0	0	0	0	130	130	77	53	0	0	0	53	0	130	59.23
		Kabupaten Banyumas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kota Surakarta	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total Pangan Fortifikasi		130	Targeted	130	0	0	0	0	130	130	77	53	0	0	0	53	0	130	#DIV/0!
	TOTAL PANGAN		1080		1120	2	0	0	106	1118	1118	960	144	11	3	0	160	0	1120	#DIV/0!





Lampiran 4 Nilai SAKIP

	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,46	26,58
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,50	18,75
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,29	13,30
d.	Evaluasi Internal	10	7,43	6,89
e.	Capaian Kinerja	20	13,80	13,64
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,49	79,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Lampiran 5 Indeks RB

PENILAIAN		Nilai	%	Keterangan
PROSES (60)				
A.	I. MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	7,78	97,25%	MS
	II. PENATAAN TATALAKSANA (7)	7,00	100%	MS
	III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)	9,79	97,92%	MS
	IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	9,14	91,38%	MS
	V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)	14,75	98,33%	MS
	VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	9,03	90,25%	MS
TOTAL PENGUNGKIT		57,48		MS
HASIL (40)				
B.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	19,48	97%	MS
	I. 1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	14,48	96,50%	MS
	2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,00	100,00%	MS
	II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	18,55	93%	MS
	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (15)	18,55	92,75%	MS
TOTAL HASIL		38,03		
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		95,51		

Sehubungan adanya perbedaan hasil penilaian TPI dengan KemenPANRB untuk penetapan WBK/WBBM yang cukup tinggi maka nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilaian BB/BPOM dan oleh KemenPANRB dibagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2020. Dari konversi tersebut (0,834) menghasilkan Indeks RB BBPOM di Semarang sebesar **85,97** sebagai salah satu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja.





Lampiran 6 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Perhitungan Indeks UPT

Periode : Triwulan I-IV

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah c = a + b	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah h = d+e+f+g/4	Total Nilai i = c + h / 2
		SIPT (a)	SPIMKer (b)		Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BOC (f)	Berita Aktual (g)		
		80%	70%							
1	Balai Besar POM di Semarang	2,4	0,6	3	2	3	1	2	2	2,50
2	Balai Besar POM di Surabaya	1,6	0,6	2,2	3	3	3	3	3	2,75
3	Balai Besar POM di Jakarta	1,6	0,6	2,2	3	3	2	3	2,75	2,48
4	Balai Besar POM di Manado	1,6	0,6	2,2	2	2	3	3	2,5	2,35
5	Balai POM di Palu	1,6	0,6	2,2	1	3	2	3	2,25	2,22
6	Balai Besar POM di Padang	0,8	0,6	1,4	3	3	3	3	3	2,20
7	Balai Besar POM di Palangka Raya	0,8	0,4	1,2	3	3	3	3	3	2,10
8	Balai Besar POM di Jayapura	1,6	0,2	1,8	2	2	2	3	2,25	2,02
9	Balai Besar POM di Banjarmasin	1,6	0,2	1,8	2	3	1	3	2,25	2,02
10	Balai Besar POM di Samarinda	1,6	0,4	2	2	3	0	3	2	2,00
11	Balai Besar POM di Pekanbaru	1,6	0,4	2	2	3	0	3	2	2,00
12	Balai Besar POM di Palembang	0,8	0,6	1,4	3	3	2	2	2,5	1,95
13	Balai POM di Sofifi	2,4	0,4	2,8	1	1	0	2	1	1,90
14	Balai POM di Kendari	1,6	0,4	2	1	3	0	3	1,75	1,88
15	Balai POM di Bengkulu	1,6	0,4	2	1	3	0	3	1,75	1,88
16	Balai Besar POM di Denpasar	1,6	0,6	2,2	1	3	0	2	1,5	1,85
17	Balai POM di Pangkal Pinang	0,8	0,6	1,4	3	3	0	3	2,25	1,82
18	Balai Besar POM di Serang	0,8	0,6	1,4	1	3	2	3	2,25	1,82
19	Balai Besar POM di Yogyakarta	1,6	0,2	1,8	1	3	0	3	1,75	1,78
20	Balai Besar POM di Mataram	0,8	0	0,8	2	3	3	3	2,75	1,78
21	Balai Besar POM di Medan	1,6	0,2	1,8	2	1	0	3	1,5	1,65
22	Balai Besar POM di Banda Aceh	1,6	0,2	1,8	1	2	0	3	1,5	1,65
23	Balai Besar POM di Makassar	1,6	0,4	2	1	2	0	2	1,25	1,62
24	Balai POM di Ambon	0,8	0,4	1,2	2	3	0	3	2	1,60
25	Balai POM di Manokwari	0,8	0,2	1	2	3	0	3	2	1,50
26	Balai Besar POM di Pontianak	0,8	0,4	1,2	1	3	0	3	1,75	1,48
27	Balai Besar POM di Bandung	0,8	0,6	1,4	2	2	0	2	1,5	1,45
28	Balai POM di Mamuju	1,6	0	1,6	2	1	2	0	1,25	1,42
29	Balai POM di Batam	0,8	0,4	1,2	2	3	0	1	1,5	1,35

Lampiran 7 Indeks Profesionalitas ASN

No.	Nama Unit Kerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		IP	Jumlah Orang	Total IP	IP	Jumlah Orang	Total IP
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	80,94	69	5595	84,44	72	6079,68
2	Balai Besar POM di Medan	83,08	110	9139	84,5	116	9802
3	Balai Besar POM di Padang	83,60	109	9103,5	84,19	107	9008,33
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	77,78	93	7234	82,95	99	8212,05
5	Balai POM di Jambi	85,16	67	5706	83,12	65	5402,8
6	Balai Besar POM di Palembang	84,15	78	6563,5	84,24	82	6907,68
7	Balai POM di Bengkulu	83,30	69	5748	77,41	70	5418,7
8	Balai Besar POM di Bandar Lampung	76,21	87	6630	83	82	6808
9	Balai POM di Batam	85,10	48	4085	85,64	55	4710,2
10	Balai POM di Pangkalpinang	84,15	47	3955	85,11	46	3915,06
11	Balai Besar POM di Jakarta	83,94	115	9653	84,79	119	10090,01
12	Balai Besar POM di Bandung	78,25	138	10799	84,77	146	12376,42
13	Balai Besar POM di Semarang	85,57	152	13007	81,57	146	119909,22
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	85,61	105	8989	84,81	103	8735,43
15	Balai Besar POM di Surabaya	84,79	139	11786	83,11	136	11302,96
16	Balai Besar POM di Serang	82,99	83	6888	85,3	82	6994,6





Lampiran 8 Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index)

Tabel 4.5 Indeks Kesadaran Masyarakat di Setiap Provinsi

No.	Provinsi	Capaian 2021	Target 2021	Persentase Capaian	Gap Indeks
1	DKI Jakarta	87,12	85	102,49%	2,12
2	Jawa Tengah	87,05	75	116,07%	12,05
3	Kepulauan Riau	85,12	81	105,09%	4,12
4	DI Yogyakarta	84,97	80	106,21%	4,97
5	Kalimantan Timur	83,27	84	99,13%	-0,73
6	Kalimantan Selatan	79,08	81	97,63%	-1,92
7	Jawa Barat	78,33	71	110,32%	7,33

Lampiran 9 terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 4.6 Indeks Unit Penyelenggara KBP di UPT

No	Unit Penyelenggara KBP	Jml KBP	Respon den	Capaian Indeks	Target	Persen Capaian	Gap Indeks	Total skor
1	BBPOM di Jakarta	31	1086	86.7	86.6	100.1%	0.1	11
2	BBPOM di Makassar	11	133	87.3	83.5	104.6%	3.8	11
3	BBPOM di Semarang	13	304	92.1	87.1	105.8%	5.0	11
4	BBPOM di Pekanbaru	9	145	90.6	88.2	102.7%	2.4	10
5	BBPOM di Serang	8	634	86.7	84.7	102.3%	2.0	10
6	BBPOM di Surabaya	10	202	84.5	83.6	101.1%	0.9	10
7	BBPOM di Samarinda	9	36	94.3	84.6	111.5%	9.7	9
8	BBPOM di Yogyakarta	6	281	90.1	86.6	104.0%	3.5	9
9	BPOM di Ambon	10	81	89.3	88.5	100.9%	0.8	9
10	BBPOM di Banda Aceh	4	38	94.1	91.1	103.3%	3.0	8
11	BBPOM di Bandar Lampung	8	162	90.2	91.1	99.0%	-0.9	8
12	BBPOM di Bandung	12	180	86.4	91.1	94.8%	-4.7	8





Lampiran 10 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 5. Indeks Kepuasan Masyarakat Per Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah Responden	Capaian Indeks	Target Indeks	Persentase Capaian	Gap Indeks
1	Gorontalo	500	77,43	64,53	119,99%	12,9
2	Kalimantan Tengah	560	69,17	63,25	109,36%	5,92
3	Jambi	520	76,31	70,38	108,43%	5,93
4	Kepulauan Riau	480	74,65	70,27	106,23%	4,38
5	Nusa Tenggara Timur	338	70,01	68,12	102,77%	1,89
6	Jawa Tengah	510	72,56	70,73	102,59%	1,83
7	Kalimantan Barat	489	69,92	68,07	102,70%	1,85
8	Riau	540	65,14	64,28	101,34%	0,86
9	Papua Barat	470	68,87	68,53	100,50%	0,34
10	Kalimantan Timur	460	72,18	72,65	99,35%	-0,47
11	Aceh	510	70,16	70,84	99,04%	-0,68
12	DKI Jakarta	450	73,8	74,98	98,43%	-1,18
13	Sulawesi Tenggara	530	67,2	68,36	98,30%	-1,16
14	Maluku	510	68,02	69,86	97,37%	-1,84
15	Kepulauan Bangka Belitung	500	69,06	71,03	97,23%	-1,97
16	Sulawesi Tengah	530	65,65	67,56	97,17%	-1,91
17	Bali	500	68,09	70,56	96,50%	-2,47
18	Maluku Utara	560	59,95	62,55	95,84%	-2,6
19	Papua	570	61,7	64,76	95,27%	-3,06
20	Sumatera Selatan	440	71,83	75,68	94,91%	-3,85
21	Sulawesi Selatan	460	70,84	75,5	93,83%	-4,66
22	Kalimantan Selatan	430	73,03	78,33	93,23%	-5,3
23	Sumatera Barat	470	67,93	73,87	91,96%	-5,94
24	Bengkulu	400	71,51	78,38	91,24%	-6,87
25	Sumatera Utara	480	64,67	71	91,08%	-6,33
26	Jawa Barat	480	69,12	77,83	88,81%	-8,71
27	Kalimantan Utara	430	69,37	78,45	88,43%	-9,08
28	Jawa Timur	460	66,55	75,64	87,98%	-9,09
29	Lampung	390	66,78	79,54	83,96%	-12,76
30	Sulawesi Utara	400	69,7	83,37	83,60%	-13,67
31	Banten	370	67,69	81,07	83,50%	-13,38
32	Sulawesi Barat	520	61,5	74	83,11%	-12,5
33	DI Yogyakarta	450	64,71	78,17	82,78%	-13,46
34	Nusa Tenggara Barat	450	61,64	76,24	80,85%	-14,6
	Nasional	16.340	68,89	74	93,09%	-5,11





BADAN POM

LAPORAN KINERJA

2021



 **linktree**
linktr.ee/bpomsemarang

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG